Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERIE-A FoLU Net Sink 2030
Nomor: A-01/Renja-PHL/09/2022

RENCANA KERJA

Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030

RENCANA KERJA

Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Diterbitkan oleh:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ISBN:
xxx - xxxx - xxx - xx

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar

REVIEWERS:

Rizaldi Boer, Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto

ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisol Nurofiq, Istanto, Omo Rusdiana, Nana Rusyana, Teguh Prawira, Lailan Syaufina, Nitya Ade Santi, Muhammad Hudzaifah Rihuljihad, Atfi Indriany Putri, Drasospolino, Jo Kumala Dewi, Erik Teguh Primiantoro, R. Basar Manullang

CONTRIBUTORS:

Belinda Arunarwati Margono, Syaiful Anwar, Roosi Tjandrakirana, Herban Heryandana, Laksmi Widyajayanti, Muhammad Said, Catur Endah Prasetiani P, Jefry Susyafrianto, Yazid Nurhuda, Sustyo Iriyono, Edy Nugroho Santoso, Luckmi Purwandari, Syafda Roswandi, Ahmad Munawir, Nandang Prihadi

FACILITATORS:

Hanif Faisol Nurofiq, Triyono Saputro, Ari Sylvia Febriyanti, Nurlela Komalasari, Ali Ma'mur, Dhany Ramdhany, Agung Bayu Nalendro, Romilla Sari, Hasnawati Hamzah, Danny Armando Wikongko, Raden Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Claudia Meitrivane Silalahi

Kata Pengantar

Sebagai upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkn secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Pada peraturan Presiden dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), didukung utamanya oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*). Untuk mempercepat implementasi pencapaian *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk pengendalian perubahan Iklim.

Rencana Operasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan. Agenda ini merupakan rangkuman kegiatan pengelolaan hutan dalam berbagai aspek dan program kehutanan (dan lahan/pertanian) yang secara resultante akan mendapatkan hasil akhir cadangan karbon atau emisi negatif pada tahun 2030.

Sasaran kinerja *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 meliputi pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dengan rotasi regular dan sistematis, rehabilitasi hutan non rotasi pada kondisi lahan kritis menurut kebutuhan lapangan, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen

kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik. Pengkoordinasian pelaksanaannya dalam bidang-bidang utama sektor FOLU meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Konservasi; Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang Instrumen dan Informasi.

Rencana kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari disusun sebagai pedoman pencapaian target *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 dalam bentuk aktifitas yang meliputi; Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan; Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada unit kerja pusat dan unit kerja wilayah (UPT), bersama-sama, kolaborasi dan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara luas, melalui kerja-kerja program struktural, kemitraan dan pembinaan masyarakat.

Jakarta, Oktober 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

B.1. Tujuan

B.2. Sasaran

C. Organisasi Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

C.1. Dasar Hukum

C.2. Struktur Organisasi

C.3. Tugas dan Fungsi

C.4. Tugas Kelompok Kerja

BAB II. Rencana Kerja Tahunan

A. Strategi dalam Mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030

A.1.Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

A.2. Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial

A.3. Strategi Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

B. Target, Program dan Kegiatan Tahun 2022 - 2030

B.1. Target, Program dan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

B.2. Target, Program dan Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

B.3. Target, Program dan Kegiatan Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

C. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022 s/d 2030

C.1.Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

C.2.Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perhutanan Sosial

C.3.Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

D. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

D.1.Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

D.2. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

D.3. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

E. Dukungan Para Pihak

E.1. Para Pihak Kegiatan Kelompok Kerja 1.1.

E.2. Para Pihak Kegiatan Kelompok Kerja 1.2.

E.3.Para Pihak Kegiatan Kelompok Kerja 1.3.

F. Pendanaan Kegiatan

BAB III. Kesimpulan

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

TABEL 1. Kebijakan Kunci dari Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Menuju FOLU *Net Sink* 2030

TABEL 2. Tugas dan Fungsi Organisasi Terkait dengan Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030

TABEL 3. Tugas Kelompok Kerja Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari

TABEL 4. Integrasi Strategi dalam Kelompok Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

TABEL 5. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pengayaan alami di areal definitif PS

TABEL 6. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pembangunan hutan tanaman di areal definitif PS

TABEL 7. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah mineral di areal definitif PS

TABEL 8. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah mineral di areal indikatif PS

TABEL 9. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah gambut di areal definitif PS

TABEL 10. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah gambut di areal indikatif PS

TABEL 11. Integrasi Strategi untuk Kelompok Kerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

TABEL 12. Kegiatan Pengendalian Karhutla

TABEL 13. Hubungan Kegiatan Pengendalian Karhutla dengan Program dan Kegiatan Ditjen di Lingkup KLHK dan Institusi di Luar KLHK 35

TABEL 14. Target, Program dan Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari

TABEL 15. Target volume aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

TABEL 16. Target volume aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 17. Target volume aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

TABEL 18. Target volume aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 19. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/ pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

TABEL 20. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 21. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS, rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan

TABEL 22. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum, jumlah tenaga pendamping PS

TABEL 23. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 24. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/ pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

TABEL 25. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 26. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS, rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan

TABEL 27. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum, jumlah tenaga pendamping PS

TABEL 28. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 29. Target Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari untuk NDC-CM1 dan LTS-LCCP

TABEL 30. Program dan Kegiatan Ditjen PHL yang Berkaitan dengan Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

TABEL 31. Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

TABEL 32. Proyeksi Implementasi Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

TABEL 33. Target dan Gap Alokasi Area untuk Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

TABEL 34. Target Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Degradasi untuk NDC-CM1 dan LTS-LCCP

TABEL 35. Program dan Kegiatan Ditjen PHL yang Berkaitan dengan Perlindungan Hutan dari Degradasi

TABEL 36. Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi

TABEL 37. Proyeksi Implementasi Rencana Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi

TABEL 38. Target dan Gap Alokasi Area untuk Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi

TABEL 39. Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan / Output dan Komponen Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

TABEL 40. Indikator Kinerja Program Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Umum

TABEL 41. Matrik Skenario Pencapaian IKK Dalkarhutla tahun 2022 – 2030

TABEL 42. Matrik Skenario Pencapaian Output Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 202-2030.

TABEL 43. Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Tahun 2020-2024 (Sumber APBN)

TABEL 44. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari

TABEL 45. Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) pengelolaan perhutanan sosial

TABEL 46. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Kebijakan dan Regulasi

TABEL 47. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Teknologi

TABEL 48. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi SDM

TABEL 49. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Kemitraan

TABEL 50. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Anggaran

TABEL 51. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Kebijakan dan Regulasi

TABEL 52. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Teknologi

TABEL 53. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Sumber Daya Manusia

TABEL 54. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Kemitraan

TABEL 55. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Anggaran

TABEL 56. Prioritas Waktu Pengendalian Karhutla Berdasarkan Tingkat Kerawanan

TABEL 57. Prioritas Waktu Pengendalian Karhutla Pada Deforestasi Tidak Terencana

TABEL 58. Prioritas Waktu Pengendalian Karhutla pada Deforestasi Tidak Terencana

TABEL 59. Tata Waktu Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

TABEL 60. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan RIL-C di Area PBPH-HA Tahun 2022-2030 Menurut IPL

TABEL 61. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 62. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 63. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

TABEL 64. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

TABEL 65. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

TABEL 66. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan RIL-C di Area PBPH-HT Tahun 2022-2030 Menurut IPL

TABEL 67. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 68. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 69. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

TABEL 70. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

TABEL 71. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

TABEL 72. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan SILIN di Area PBPH-HA Tahun 2022-2030 Menurut IPL

TABEL 73. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 8

TABEL 74. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 75. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 76. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

TABEL 77. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

TABEL 78. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

TABEL 79. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan SILIN di Area PBPH-HT Tahun 2022-2030 Menurut IPL

TABEL 80. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 9

TABEL 81. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 8

TABEL 82. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 83. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 84. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

TABEL 85. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

TABEL 86. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan SILIN di Area PBPH-RE Tahun 2022-2030 Menurut IPL

TABEL 87. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-RE pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 88. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-RE pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 89. Rekapitulasi Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi “Terencana” di Area KPHP-PBPH-HT Menurut Indeks Prioritas Lokasi

TABEL 90. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi “Terencana” di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 91. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi “Terencana” di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 92. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi “Terencana” di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

TABEL 93. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi “Terencana” di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

TABEL 94. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi “Terencana” di Area

KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

TABEL 95. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 2

TABEL 96. Rekapitulasi Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak terencana" di Area KPHP-PBPH-HT Menurut Indeks Prioritas Lokasi

TABEL 97. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 8

TABEL 98. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 99. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 100. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

TABEL 101. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

TABEL 102. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

TABEL 103. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 2

TABEL 104. Rekapitulasi Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA Menurut Indeks Prioritas Lokasi

TABEL 105. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

TABEL 106. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

TABEL 107. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

TABEL 108. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

TABEL 109. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

TABEL 110. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 2

TABEL 111. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-RE

TABEL 112. Kegiatan Pengendalian Karhutla oleh Dit. PKHL

TABEL 113. Hubungan Kegiatan Pengendalian Karhutla dengan Program dan Kegiatan Ditjen di Lingkup KLHK dan Institusi di Luar KLHK

TABEL 114. Peran Masing-Masing Pihak Beserta Output Capaiannya

TABEL 115. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum

TABEL 116. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 117. PENDANAAN KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG AKSI MITIGASI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN PADA AREAL DEFINITIF PS PADA TAHUN 2022-2030 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA RENCANA KERJA/PENGELOLAAN KPS YANG DISAHKAN, FASILITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS & NILAI TAMBAH HH SERTA JASLING, KUPS YANG DITINGKATKAN MENJADI KELAS GOLD/PLATINUM

TABEL 118. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 119. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

TABEL 120. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 121. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS

TABEL 122. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/ pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan serta jasling

TABEL 123. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kelompok KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum, jumlah tenaga pendamping Perhutanan Sosial

TABEL 124. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan

TABEL 125. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang

ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

TABEL 126. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

TABEL 127. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS, rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan

TABEL 128. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum, jumlah tenaga pendamping PS

TABEL 129. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan

TABEL 130. Tabel Kebutuhan Pendanaan untuk Masing-Masing Aksi Mitigasi

Daftar Gambar

GAMBAR 1. Diagram Aksi *Road Map* Mitigasi NDC

GAMBAR 2. Struktur Organisasi Tim Kerja FOLU *Net Sink* 2030 pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari

GAMBAR 3. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHL Lingkup Ditjen PHL

GAMBAR 4. Skema Pendanaan Menuju Pencapaian FOLU *Net Sink* 2030

GAMBAR 5. Sistem pendanaan untuk mendukung implementasi aksi mitigasi perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019)

GAMBAR 6. Tata Laksana Penyelenggaraan Instrumen NEK

GAMBAR 7. Kerangka Transparansi dalam Implementasi NEK

01

Pendahuluan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen *Enhanced*-NDC Indonesia menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional sebesar 31,89%, setara 915 juta ton CO_{2e}, dengan usaha sendiri (skenario CM1) atau sampai dengan 43,20%, setara 1.240 juta ton CO_{2e} dengan dukungan internasional yang memadai (skenario CM2) pada tahun 2030. Target NDC-CM1 akan dicapai melalui penurunan emisi GRK sebesar 17,4% pada sektor kehutanan, 12,5% pada sektor energi, 1,4% pada sektor limbah, 0,3% pada sektor pertanian, dan 0,2% pada sektor industri. Selanjutnya pada NDC-CM2, kontribusi penurunan emisi ditingkatkan menjadi 25,4% pada sektor kehutanan, 15,5% pada sektor energi, 1,5% pada sektor limbah, 0,4 pada sektor pertanian, dan 0,3% pada sektor industri (Ditjen PPI KLHK, 2022).

Aksi mitigasi pada sektor kehutanan yang juga termasuk sektor penggunaan lahan lainnya yang selanjutnya disebut sektor FOLU, difokuskan pada lima aksi mitigasi utama, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Aksi mitigasi yang diharapkan berkontribusi paling besar dalam pencapaian penurunan emisi sektor FOLU ialah penurunan emisi dari kebakaran gambut, deforestasi, dan dekomposisi gambut, yang disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

Lebih lanjut pemerintah juga sudah menyampaikan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ((*Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience*-LTS-LCCR) dalam rangka menuju netral karbon atau target Paris pada tahun 2060. Dalam mencapai target jangka panjang, NDC berperan untuk menjembatani komitmen penurunan emisi menuju netral karbon melalui penguatan dan peningkatan aksi mitigasi dan dukungan internasional, terutama pada sektor FOLU sebagai salah satu sektor kunci. Dalam komitmen NDC, sektor FOLU mengalami tren penurunan nilai emisi sejak tahun 2010, namun masih sebagai sektor pengemisi GRK (*net emitter*), dengan tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 216 juta ton CO_2e, sementara pada skenario LTS untuk mencapai netral karbon, yang sejalan dari target Paris atau disebut sebagai skenario LTS-LCCP, sektor ini sudah mencapai kondisi *Net Sink* dengan nilai serapan bersih sebesar 140 juta ton CO_2e.

GAMBAR 1. Diagram Aksi *Road Map* Mitigasi NDC

Dalam rangka mendukung kebijakan LTS-LCCR, NDC dan Rencana Aksi kegiatan dan target penurunan emisi pada sektor FOLU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menterjemahkan komitmen dan kebijakan tersebut ke dalam rencana kawasan hutan melalui Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan rencana pembangunan melalui Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup. RKTN memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2011-2030.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang transformatif untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi sektor FOLU mencapai target NDC dan menuju *FOLU Net Sink*. Dasar kebijakan sektor FOLU yang dapat mendorong perubahan yang sistemik dalam pemanfaatan lahan ke depan untuk aksi pengelolaan hutan berkelanjutan untuk menuju FOLU *Net Sink* 2030 disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1. Kebijakan Kunci dari Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Menuju FOLU *Net Sink* 2030

Aksi mitigasi	Dasar kebijakan	Keterangan
Pengelolaan hutan bekelanjutan	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Upaya pencegahan dan pengamanan hutan akan dilakukan oleh Polisi Kehutanan; Penerapan Hukum Pidana untuk kegiatan yang melakukan deforestasi dan degradasi hutan alam oleh PPNS.
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang tidak produktif
	Peraturan MenteriLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dapat melakukan lebih dari satu sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya, termasuk silvikultur intensif, kewajiban sertifikasi pengelolaan hutan lestari (SVLK) yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau; c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan: a. Pemanfaatan Kawasan; b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan; e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pelaksanaan program dan kegiatan organisasi lingkup KLHK sebagai bentuk dari *corrective actions* harus dipastikan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan laju deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dan juga peningkatan laju rehabilitasi lahan serta penerapan sistem pengelolaan sumber daya hutan dan gambut lestari sejalan dengan target NDC menuju FOLU *Net Sink* 2030. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada indeks biogeofisik (IBGF) yang memberikan gambaran besar ancaman deforestasi, degradasi hutan dan kebakaran lahan dan hutan, dan potensi peningkatan cadangan karbon. Kondisi IBGF digunakan untuk menentukan prioritas lokasi atau disebut dengan Indeks Prioritas Lokasi (IPL). Penentuan jenis program dan kegiatan perlu memperhatikan kondisi tutupan lahan dan peran/ fungsi kawasan dalam penyediaan jasa lingkungan hidup atau arahan optimasi pemanfaatan kawasan menurut indek jasa lingkungan hidup (IJLH).

Eselon I Kementerian LHK selaku pemangku kawasan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan dengan menggunakan informasi spasial kondisi tutupan lahan kawasan, arahan optimasi berdasarkan IJLH dan indek prioritas lokasi (IPL) akan dapat menetapkan sasaran, program dan kegiatan/aksi prioritas dan lokasi prioritas pelaksanaannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, struktur organisasi pada rencana operasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 telah menetapkan 5 (lima) bidang pada tim kerja FOLU *Net Sink* 2030, yaitu Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari membawahi 3 (tiga) kelompok kerja yaitu Kelompok Kerja 1.1. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan, Kelompok Kerja 1.2. Perhutanan Sosial dan Kelompok Kerja 1.3. Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi yang bertugas untuk mencapai target dari setiap upaya aksi mitigasi.

Untuk menjabarkan langkah perencanaan yang lebih rinci yang akan menjadi panduan rencana aksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kehutanan untuk mencapai *Carbon Neutral* pada tahun 2030 perlu disusun Rencana Kerja Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari.

B. Tujuan dan Sasaran

B.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari terkait dengan Rencana Operasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 meliputi :

- Memantapkan kebijakan dan implementasi kerja pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari untuk mencapai *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 dengan langkah-langkah yang sistematis dan terukur;
- Menetapkan rencana operasional kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari;
- Menjabarkan target NDC ke dalam detail rencana aksi penurunan emisi gas rumah

kaca sektor kehutanan dan lahan dengan pendekatan *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari;

- Menegaskan kegiatan penopang utama pelaksanaan program dan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari serta tahapan kerja dan operasionaliasi serta evaluasinya;
- Menjadi dasar dalam penyusunan *Manual of Operation* dari setiap kebijakan dan langkah penopang utama Program Nasional "*Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030" pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari.

B.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Kerja Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Rencana Operasional (RO) *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 adalah upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan (RO1, RO2 dan RO3), Pembangunan Hutan Tanaman (RO4) serta kegiatan pengayaan hutan alami (RO5-RO6) pada areal kawasan hutan produksi, hutan lindung dan luar Kawasan hutan (APL), dan pengurangan dampak tebangan (RIL) pada kawasan hutan produksi, dengan target sebagai berikut:

- Tercapainya target pada aksi mitigasi pencegahan deforestasi lahan mineral sejak 2013 sampai dengan tahun 2030 tidak melebihi 3,97 juta ha;
- Tercapainya target pada aksi mitigasi pencegahan deforestasi lahan gambut sejak 2013 sampai dengan tahun 2030 tidak melebihi 0,25 juta ha;
- Tercapainya target pada aksi mitigasi pencegahan degradasi hutan konsesi sejak 2013 sampai dengan tahun 2030 tidak melebihi 2,28 juta ha;
- Tercapainya target pada aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman sejak 2013 sampai dengan tahun 2030 tidak melebihi 11,22 juta ha;
- Tercapainya target kegiatan pengayaan alami/sistem silvikultur intensif dan sistem tebang berdampak rendah (RIL) sejak dari 2011-2030 seluas 2,207,261 ha.
- Upaya mitigasi yaitu peningkatan serapan karbon melalui kegiatan pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi lahan dituangkan pada Rencana Kerja Bidang II dan untuk perbaikan pengelolaan lahan gambut (pengelolaan tata air dan restorasi gambut) dan mangrove dituangkan dalam Rencana Kerja Bidang IV.

C. Organisasi Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

C.1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

C.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, maka ditetapkan susunan organisasi untuk Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari sebagai berikut.

A. PENANGGUNG JAWAB	:	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B. PENGARAH	:	1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 5. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan 7. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 8. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 10. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 11. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 12. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 15. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 16. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 17. Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 18. Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi
C. PELAKSANA		
1. Ketua	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ketua Harian I	:	Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc
Ketua Harian II	:	Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc
2. Sekretaris	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Wakil Sekretaris	:	1. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi
3. Tim Ahli		1. Prof. Dr. Rizaldi Boer 2. Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop 3. Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc. 4. Dr. Efransjah 5. Dr. Ir. Indika Mansur, M.For.Sc

BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Ketua Bidang	:	Ir. Istanto, M.Sc.

Kelompok Kerja I : Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan
a. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan sebagai Koordinator;
b. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
c. Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
d. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
e. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor;
f. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
g. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
h. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
i. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;
j. Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
k. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
l. Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan
m. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara

Kelompok Kerja II : Pengelolaan Perhutanan Sosial
a. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat sebagai Koordinator
b. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
c. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
d. Direktur Kemitraan Lingkungan
e. Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kelompok Kerja III : Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi
a. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan sebagai Koordinator
b. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
c. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
d. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
e. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
f. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi
g. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

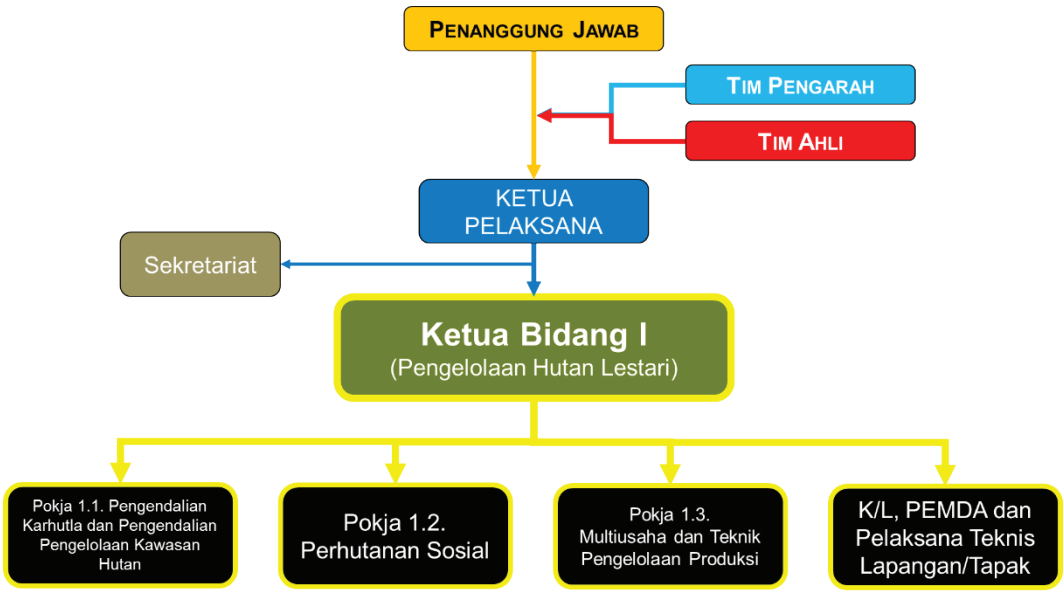

GAMBAR 2. Struktur Organisasi Tim Kerja FOLU *Net Sink* 2030 pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari

C.3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim selengkapnya disajikan pada Tabel 2 berikut.

TABEL 2. Tugas dan Fungsi Organisasi Terkait dengan Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030

No.	Unsur Organisasi	Tugas
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil kerja.
2	Tim Pengarah	a. Memberikan arahan pelaksanaan *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030; dan b. Memberikan arahan kebijakan, penyelesaian masalah, dan pengembangan kebijakan serta inovasi baru.
3	Tim Ahli	a. Memberikan masukan teknis dan/atau penjelasan terhadap dokumen *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030; b. Menyampaikan pengetahuan/informasi berdasarkan pengalaman dan intelektualitasnya; dan c. Memberikan masukan dan saran kebijakan dan implementasi operasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030.

No.	Unsur Organisasi	Tugas
4	Ketua Pelaksana	a. Memimpin dan mengkoordinasikan formulasi kebijakan, penyelesaian masalah dan pengembangan kebijakan serta inovasi baru; b. Mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan dengan dibantu dalam koordinasi keseharian oleh ketua pelaksana harian atau Ketua Bidang dalam pelaksanaan kerja semua agenda *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030;
5	Ketua Pelaksana Harian	a. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan rencana operasional pelaksanaan *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030; b. Mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan Tugas Tim Kerja *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030; c. Membuat laporan kepada Penanggung Jawab; d. Ketua Pelaksana Harian 1 mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Bidang II tentang Peningkatan Cadangan Karbon dan Bidang III tentang Konservasi; dan e. Ketua Pelaksana Harian 2 mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Bidang I tentang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang IV tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Bidang V tentang Instrumen dan Informasi.
6	Ketua Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari	a. Menyiapkan manual/guidelines pengelolaan hutan lestari berkaitan dengan penerapan teknik *reduced impact logging*, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial multi usaha, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b. Mengkoordinasikan implementasi pengelolaan hutan lestari meliputi penerapan teknik *reduced impact logging*, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial multi usaha, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; c. Mengkoordinasikan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi operasional pengelolaan hutan lestari dengan kegiatan utama meliputi penerapan teknik *reduced impact logging*, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pemulihan kawasan dan penegakan hukum, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial multi usaha, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi dan areal masyarakat; dan d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

SUMBER: SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim

C.4. Tugas Kelompok Kerja

Tugas Kelompok Kerja pada Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim selengkapnya disajikan pada Tabel 3 berikut.

TABEL 3. Tugas Kelompok Kerja Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari

No.	Kelompok Kerja	Tugas
1.	Kelompok Kerja 1.1. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines pengendalian kebakaran hutan dan lahan, memantapkan prosedur pencegahan permanen pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan; b. Melaksanakan implementasi pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan; c. Secara khusus memantapkan sistem paralegal bagi Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Adat; d. Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi operasional pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
2.	Kelompok Kerja 1.2. Perhutanan Sosial	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines perhutanan sosial; b. Melaksanakan implementasi perhutanan s sosial; c. Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi perhutanan sosial; dan d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
3.	Kelompok Kerja 1.3. Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines penerapan *teknik reduced impact logging*, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan; b. Melaksanakan implementasi penerapan *teknik reduced impact logging,* penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan; c. Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi operasional pengelolaan hutan lestari dengan kegiatan utama meliputi penerapan *teknik reduced impact logging*, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pemulihan kawasan dan penegakan hukum, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.

SUMBER: SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim

02

Rencana Kerja Tahunan

BAB II. RENCANA KERJA TAHUNAN

A. Strategi dalam Mendukung *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030

A.1. Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

Rencana Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari 1 (satu) Arahan Kebijakan dan 3 (tiga) strategi umum dengan indikator kinerja program luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun. Tujuan dari strategi yang dicapai adalah:

1. Berkurangnya emisi gas rumah kaca yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan kemitraan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi semua aktifitas para pihak dalam dan luar negeri.
2. Berkurangnya resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran semua pihak, penerapan keteknikan pencegahan, aplikasi peringatan dini akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, pemberdayaan MPA, patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu.
3. Berkurangnya luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar, serta efektifnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

TABEL 4. Integrasi Strategi dalam Kelompok Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Rencana Strategis 2022-2030			Integrasi Strategi untuk Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Arah Kebijakan	Strategi		
Meningkatkan upaya pencegahan, akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dan deteksi dini, serta responsive terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan.	1	Peningkatan dan penguatan operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak, melalui penguatan pencegahan karhutla, peningkatan peran serta masyarakat bidang dalkarhutla, penguatan sarpras, peningkatan kecepatan sistem peringatan dini, deteksi dini dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.	Peningkatan dan penguatan operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak, terutama di wilayah rawan karhutla dengan pendekatan multipihak.
	2	Pemantapan kerjasama pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat masyarakat, tingkat Daerah, Nasional, Regional ASEAN maupun Internasional (bilateral atau multilateral).	Pemantapan kerjasama dalkarhutla di tingkat tapak, daerah, nasional, dan internasional, baik dari aspek operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla) maupun pendanaan.
	3	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pelaku usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Peningkatan kapasitas dalkarhutla aparatur pemerintah dan pelaku usaha di wilayah rawan karhutla.

Dengan demikian, strategi pencapaian target untuk *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 dari Rencana Strategis 2022-2030 terdiri dari 3 strategi, yaitu:

1. Strategi ke-1: Peningkatan dan penguatan operasional multipihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan karhutla.
2. Strategi ke-2: Pemantapan kerjasama operasional dan pendanaan dalkarhutla di tingkat tapak, daerah, nasional, dan internasional.
3. Strategi ke-3: Peningkatan kapasitas dalkarhutla aparatur pemerintah dan pelaku usaha di wilayah rawan karhutla.

Dalam penetapan target luasan dan arahan pelaksanaan aksi mitigasi untuk pengendalian karhutla, manual ini mengacu pada manual pengendalian deforestasi dan degradasi hutan dengan memprioritaskan data untuk deforestasi tidak terencana (*unplanned deforestation*). Deforestasi tidak terencana adalah perubahan tutupan hutan alam menjadi non hutan alam yang tidak memiliki dasar legal, dapat bersumber dari perambahan hutan secara ilegal di lahan tanpa perizinan (di dalam dan di luar kawasan hutan) dengan arahan fungsi lindung atau lahan PBPH dan HGU dengan arahan lindung, maupun dari bencana alam, seperti kebakaran.

Berdasarkan pemangku kepentingan, target volume pengendalian karhutla mengacu pada data deforestasi tidak terencana dengan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) sedang sampai tinggi (Tabel 2.10) menunjukkan bahwa areal pengendalian karhutla tertinggi berada di kawasan dalam kendali Dirjen PHPL (2.482.259 ha), diikuti Dirjen KSDAE (915.775 ha), PEMDA (886.145 ha), Dirjen PSDASRH (471.917 ha), dan Dirjen PSKL (396.038 ha). Data ini menunjukkan bahwa areal target pengendalian karhutla lebih banyak di kawasan hutan produksi yang dikelola oleh pihak swasta. Tetapi, kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh KLHK juga menjadi prioritas, demikian juga untuk hutan yang dikelola oleh PEMDA, wilayah DAS, dan wilayah perhutanan sosial.

TABEL 4.10. Target volume pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data deforestasi tidak terencana pada setiap pemangku kawasan untuk mencapai target NDC menuju FOLU *Net Sink* 2030 menurut indek prioritas lokasi (IPL)

IPL	PHPL	KSDAE	PDASRH	PSKL	PEMDA	Total
	Deforestasi Tidak Terencana	Deforestasi Tidak Terencana	Deforestasi Tidak Terencana	Deforestasi Tidak Terencana	Deforestasi Tidak Terencana	Deforestasi Tidak Terencana
9	33.807	-	-	9.988	179.635	223.431
8	188.941	162.226	37.391	85.132	163.565	637.255
7	835.960	147.392	31.334	146.069	220.983	1.381.739
6	1.423.841	606.157	403.191	154.849	321.962	2.911.507
Total	2.482.549	915.775	471.917	396.038	886.145	5.152.425

Note: Target luas kebakaran pada masing-masing pemangku Kawasan hanya berada pada IPL 6-9.

SUMBER: Ekstraksi data dalam Manual Deforestasi dan Degradasi Hutan (2021)

Pengendalian karhutla di wilayah kerja Dirjen PSKL (Tabel 2.11.) meliputi areal hutan lindung (71.728 ha) dan hutan produksi (324.310 ha). Karhutla merupakan ancaman dalam keberhasilan program Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial dapat diintegrasikan dengan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan fasilitasi peningkatan kapasitas MPA dalam pengendalian karhutla di wilayah masing-masing. Pendekatan '*Community based fire management*" (CBFM) sangat tepat dilakukan di areal Perhutanan Sosial. Dalam hal ini, peran masyarakat menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla di wilayah pengelolaan hutan mereka. Dirjen PSKL dapat memfasilitasi MPA yang dibentuk antara lain berupa: pelatihan pengendalian karhutla, pelatihan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pemberian insentif pelaksanaan PLTB oleh masyarakat, dan pengembangan alternatif sumber penghidupan dari hutan.

TABEL 4.11. Target volume pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data deforestasi tidak terencana oleh Dirjen PSKL untuk mencapai target NDC menuju FOLU Net Sink 2030 menurut indek prioritas lokasi (IPL)

IPL	KPHL-PIAPS	KPHP-PIAPS	Total
9	-	9.988	9.988
8	13.062	72.070	85.132
7	11.458	134.611	146.069
6	47.208	107.640	154.849
Total	71.728	324.310	396.038

Note: Target luas kebakaran berdasarkan data deforestasi tidak terencana (Dirjen PSKL) hanya berada pada IPL 6-9.

SUMBER: Ekstraksi data dalam Manual Deforestasi dan Degradasi Hutan (2021)

Salah satu permasalahan dalam pengendalian karhutla adalah kebakaran yang terjadi di areal APL (Areal Penggunaan Lain) yang seringkali menjadi lahan konflik dan sumber kebakaran. Penyebab kebakaran dapat berasal dari kegiatan penyiapan lahan baik di areal HGU maupun Non HGU, kesengajaan pembakaran di areal konflik baik di areal HGU maupun Non HGU. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan APL ini paling sering terjadi dan umumnya berhubungan erat dengan alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pertanian, dan pemukiman. Target pengendalian karhutla di areal deforestasi tidak terencana di APL (Tabel 2.12), sebesar 886.145 ha, terluas di areal Non-HGU (683.120 ha), disamping areal HGU (203.025 ha). Peran PEMDA sangat penting dalam pengendalian karhutla di kawasan APL. Pendekatan multistakeholder perlu dilakukan, disamping penguatan satgas dalkarhutla daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) serta alokasi anggaran daerah untuk dalkarhutla perlu ditingkatkan, serta penyelesaian konflik yang terkait dengan tata ruang perlu menjadi prioritas.

TABEL 4.12. Target volume pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data deforestasi tidak terencana oleh PEMDA untuk mencapai target NDC menuju FOLU *Net Sink* 2030 menurut Indek Prioritas Lokasi (IPL)

IPL	PEMDA-HGU	PEMDA-Non HGU	Total
9	772	178.863	179.635
8	45.680	117.885	163.565
7	75.271	145.712	220.983
6	81.301	240.660	321.962
Total	203.025	683.120	886.145

Note: Target luas kebakaran berdasarkan data deforestasi tidak terencana (PEMDA) hanya berada pada IPL 6-9.

SUMBER: Ekstraksi data dalam Manual Deforestasi dan Degradasi Hutan (2021)

Pengendalian karhutla di kawasan hutan produksi (Tabel 2.13.) dengan target seluas 43.990 ha, terdiri dari kawasan KPHP-HTI seluas 40.982 ha dan KPHP-RE seluas 3.007 ha. Pada umumnya baik KPHP-HTI maupun KPHP-RE memiliki sumberdaya dan sistem pengendalian karhutla yang baik. Pengelolaan kawasan HTI (Hutan Tanaman Industri) dan RE (Restorasi Ekosistem) terbagi ke dalam unit/blok/zonasi pengelolaan yang intensif, termasuk dalam aspek perlindungan hutan, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Sumber kebakaran di kawasan HTI dan RE umumnya berasal dari perbatasan lahan/kawasan pengelolaan, terutama bila terdapat lahan-lahan konflik di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelola HTI/RE perlu memprioritaskan pengendalian karhutla di lokasi-lokasi rawan konflik dengan program-program pemberdayaan masyarakat dan insentif untuk masyarakat.

Salah satu unit pengelola HTI yang didiskusikan dalam Renops FOLU adalah PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang memiliki lahan hutan yang cukup luas dan juga memiliki lahan tidak produktif yang cukup luas serta lahan pertanian (budidaya tanaman semusim dan perkebunan). Hal ini menunjukkan bahwa di unit kelola tersebut sudah banyak diokupasi oleh masyarakat, dan memiliki potensi konflik karena adanya kegiatan masyarakat yang berjalan. Berdasarkan kondisi tersebut upaya pengembangan kemitraan kehutanan antara pemegang izin dengan masyarakat perlu didorong sehingga pemanfaatan areal konsesi menjadi lebih efisien dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat lebih besar yang pada akhirnya dapat mengurangi ancaman terhadap hutan. Adanya kebijakan multi-usaha akan membuka peluang lebih besar bagi perusahaan dan masyarakat dalam mengembangkan bentuk usaha kemitraan di luar kegiatan usaha hutan tanaman. Terbangunnya kemitraan kehutanan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat ancaman bagi keberadaan hutan alam di dalam areal konsesi dan kawasan.

TABEL 4.13. Target volume pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data deforestasi tidak terencana oleh pemangku kepentingan untuk mencapai target NDC menuju FOLU Net Sink 2030 menurut indek prioritas lokasi (IPL)

IPL	KPHP-HTI	KPHP-RE	Total
8	716	-	716
7	4.809	3.007	7.817
6	35.458	-	35.458
Total	40.982	3.007	43.990

Note: Target luas kebakaran berdasarkan data deforestasi tidak terencana (PEMDA) hanya berada pada IPL 6-9.

SUMBER: Ekstraksi data dalam Manual Deforestasi dan Degradasi Hutan (2021)

Hasil analisis spasial *template* dengan peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan bahwa areal yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi berturut-turut berada di bawah pengelolaan Pemda (1.899.232 ha), Ditjen PHL (680.773 ha), BRGM (623.590 ha), Ditjen PKTL (190.665 ha), Ditjen KSDAE (24.674 ha), Ditjen PDASRH (58.883 ha), Ditjen PPKL (18.650 ha) dan Ditjen PSKL (190.665 ha) (Tabel 2.14). Areal ini menjadi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

TABEL 4.14. Target volume pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data kerawanan karhutla oleh pemangku kepentingan untuk mencapai target NDC menuju FOLU *Net Sink* 2030

Pemangku Kebijakan		Kerawanan (ha)				Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ditjen PDASRH	HL Non-PIAPS	184.381	638.193	556.927	58.883	1.438.384
	Deforestrasi Tidak Terencana	86.865	186.588	193.810	6.024	473.287
	ENR	10	2.875	8.600	270	11.756
	Konservasi Tinggi-Ancaman Tinggi	86.710	189.314	200.031	6.258	482.313
	Non Rotasi	10.796	259.416	154.486	46.330	471.029
	Total	184.381	638.193	556.927	58.883	1.438.384
Ditjen PHL	Konversi	29	368.385	560.496	138.417	1.067.327
	Lindung	243.002	2.590.690	2.808.229	196.561	5.838.482
	Produksi	5.628.484	6.961.912	1.669.364	63.531	14.323.292
	Rehab	3.743	190.003	691.156	237.391	1.122.292
	Rehab-Agro	32	69.006	180.904	44.874	294.816
	Total	5.875.291	10.179.995	5.910.149	680.773	22.646.209

Pemangku Kebijakan		Kerawanan (ha)				Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
BRGM	Konversi			-	330	330
	Lindung	-	13.557	318.357	334.152	666.066
	Produksi			46	17	63
	Rehab		3.713	104.226	193.185	301.125
	Rehab-Agro		1.038	33.887	95.906	130.831
	Total	-	18.308	456.516	623.590	1.098.415
Ditjen KSDAE	Konversi		1.210	37.054	3.701	41.966
	Lindung	42.688	602.675	720.748	12.547	1.378.658
	Produksi		-	1		1
	Rehab	42.849	39.157	57.602	1.952	141.561
	Rehab-Agro	865	42.229	88.244	6.474	137.813
	Total	86.403	685.271	903.650	24.674	1.699.998
Ditjen PPKL	Lindung		13.652		18.606	32.258
	Produksi		-		-	-
	Rehab		454		44	498
	Total		14.106		18.650	32.757
PEMDA	APL		1.074	163.043	665.565	829.682
	Konversi		-	-	318	319
	Lindung	48.687	1.011.530	1.189.383	489.150	2.738.749
	Produksi	471.186	2.354.131	2.575.019	325.700	5.726.037
	Rehab	191	10.429	137.172	325.423	473.214
	Rehab-Agro	-	968	32.925	93.075	126.968
	Total	520.065	3.378.131	4.097.541	1.899.232	9.894.968
Ditjen PSKL	Konversi	14	552	159	2	727
	Lindung	14.336	370.113	333.205	58.951	776.605
	Produksi	10.149	562.971	415.186	32.333	1.020.639
	Rehab	1.013	65.304	154.912	74.344	295.573
	Rehab-Agro	617	41.084	68.992	25.036	135.729
	Total	26.129	1.040.025	972.454	190.665	2.229.273

Kebakaran hutan di Indonesia didominasi oleh kebakaran gambut, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kebakaran di lahan mineral. Disamping itu, lahan gambut juga memiliki fungsi penting sebagai sumber penghidupan masyarakat sekitarnya. Namun demikian, tanah gambut sebagai tanah organik memiliki karakteristik unik, yaitu *irreversible drying*, bila sudah kering sulit untuk dibasahi kembali. Sebagai akibatnya, lahan gambut menjadi sangat rentan terhadap bahaya karhutla. Berdasarkan luas gambut pada masing-masing provinsi berbanding lurus dengan kejadian terjadinya kebakaran. Kelas kerawanan kebakaran dilakukan overlay dengan luas gambut untuk mengetahui besar lokasi yang berada pada lokasi rawan tinggi-sangat tinggi dengan sebaran gambut sebagaimana terdapat pada Tabel 4.15.

TABEL 4.15. Wilayah prioritas sasaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data kerawanan karhutla pada berbagai provinsi untuk mencapai target NDC menuju FOLU *Net Sink* 2030

No.	Provinsi	Luas Gambut (ha)	Luas Kelas kerawanan kebakaran (ha)				
			Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total Tinggi-Sangat Tinggi
1.	Riau	3.867.413	126.252	1.025.641	3.032.531	5.459.996	8.492.527
2.	Kalimantan Tengah	2.659.231	1.099.208	6.428.745	6.996.979	871.678	7.868.657
3.	Sumatra Selatan	1.262.385	380.990	1.916.100	6.060.291	752.178	6.812.469
4.	Kalimantan Barat	1.680.133	2.270.439	6.721.220	5.303.211	583.289	5.886.500
5.	Kalimantan Timur	161.619	1.927.038	6.245.279	4.413.300	80.545	4.493.845
6.	Sumatra Utara	261.234	776.548	3.371.937	3.511.989	321.869	3.833.858
7.	Jambi	621.090	469.158	1.057.948	3.241.078	461.434	3.702.512
8.	Kalimantan Selatan	106.271	37.768	241.346	1.534.359	1.903.190	3.437.549
9.	Lampung	49.331	74.030	136.660	929.246	2.364.217	3.293.463
10.	Papua	2.644.436	15.035.334	17.934.631	3.105.423	121.871	3.227.294
11.	Aceh	215.702	1.140.213	2.243.425	2.547.308	477.932	3.025.240
12.	Papua Barat	1.046.481	3.211.317	5.788.128	1.579.118	59.838	1.638.956
13.	Sumatra Barat	100.687	696.852	2.353.140	1.450.856	86.825	1.537.681
14.	Bangka-belitung	42.569		246.887	1.441.402	33.166	1.474.568
15.	Kalimantan Utara	170.744	3.538.979	2.530.188	863.912	33.957	897.869
16.	Kepulauan Riau	8.186	682	73.386	421.365	348.385	769.750
17.	Bengkulu	8.053	548.002	832.058	746.725	8.054	754.779
	Total	14.905.565	31.332.810	59.146.719	47.179.093	13.968.424	61.147.517

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) juga telah menetapkan Desa Sasaran di provinsi rawan karhutla setiap tahun melalui Surat Keputusan Direktur PKHL. Jumlah Desa Sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sebagai contoh, Surat Keputusan No. SK 5/PKHL/PPI.4/2/2021 tentang Desa Sasaran Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, sebanyak 1200 desa dari 26 provinsi di Indonesia (Tabel 2.15). Provinsi dengan jumlah desa sasaran lebih dari 100 desa, yaitu: Kalimantan Barat (169 desa), Sumatra Selatan (157 desa), Riau (148 desa), Kalimantan Tengah (146 desa), Kalimantan Selatan (119 desa), dan Jambi (117 desa). Seluruh desa sasaran menjadi lokus kegiatan pencegahan karhutla oleh para pihak.

TABEL 4.16. Jumlah desa sasaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan di setiap provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Desa	No.	Provinsi	Jumlah Desa
1	Kalimantan Barat	169	14	Nusa Tenggara Barat	10
2	Sumatra Selatan	157	15	Jawa Timur	10
3	Riau	148	16	Kepulauan Riau	9
4	Kalimantan Tengah	146	17	Sulawesi Barat	9
5	Kalimantan Selatan	119	18	Papua	9
6	Jambi	117	19	Papua Barat	9
7	Sumatra Utara	80	20	Sulawesi Tengah	8
8	Kalimantan Timur	60	21	Jawa Barat	7
9	Sulawesi Selatan	54	22	Bali	4
10	Sulawesi Tenggara	26	23	Gorontalo	3
11	Sulawesi Utara	17	24	Nusa Tenggara Timur	3
12	Jawa Tengah	12	25	Maluku Utara	2
13	Maluku	10	26	DI Yogyakarta	2

A.2. Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan diyakini sebagai salah satu langkah strategis dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca, yakni dengan menjaga hutan alam dan memberikan alternatif sumber mata pencaharian non kayu bagi masyarakat sekitar (Rahayu & Triwanto, 2021). Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian Perhutanan Sosial seluas ± 4,9 Juta Ha yang tersebar di semua fungsi kawasan hutan. Perhutanan sosial merupakan sebuah kebijakan *corrective action* dengan adanya ketimpangan penguasaan lahan hutan bagi masyarakat yang juga berdampak adanya ketimpangan ekonomi. Melalui kebijakan ini peluang masyarakat untuk memperoleh akses legal pengelolaan hutan menjadi semakin besar sehingga dapat meningkatkan perannya dari sekedar pekerja (objek) dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan menjadi pemegang persetujuan/ penetapan akses legal (subjek) sebagai pemegang peran utama (Napitu et al., 2017; Ribot & Peluso, 2003). Dengan demikian, kegiatan pengelolaan hutan diharapkan dapat secara langsung memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan menjaga bahkan meningkatkan kelestarian kawasan hutan. Terlaksananya kegiatan Perhutanan Sosial yang optimal selain memberikan dampak pada masyarakat dan kelestarian hutan juga sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap kebijakan penurunan emisi GRK dan FOLU *Net Sink*. Hal ini dikarenakan karena terwujudnya upaya *Sustainable Forest Management* dan juga terkendalinya deforestasi dan degradasi lahan hutan sekaligus penguatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh karena itu percepatan dan penguatan implementasi PS mendukung keberhasilan kebijakan FOLU *Net Sink* 2030 Kementerian LHK.

Strategi kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung pengelolaan hutan lestari untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 diarahkan kepada areal KPHL PIAPS dan KPHP PIAPS dengan menjamin keberlanjutan tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha. Kegiatan aksi mitigasi perhutanan sosial yang dilakukan pada kedua areal tersebut meliputi ENR (*Enhanced Natural Regeneration*/Pengayaan Regenerasi Alami), Pembangunan Hutan Tanaman, Pencegahan Deforestasi di Tanah Mineral dan Pencegahan Deforestasi di Tanah Gambut.

Merujuk kepada data terakhir Rencana Operasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030, di dalam areal definitif PS terdapat potensi kegiatan pengayaan alami seluas 5.349 ha pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi (Tabel 5). Untuk pembangunan hutan tanaman, memiliki target kegiatan pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS seluas 116.041 ha (Tabel 6). Untuk mencapai target *net sink*, pembangunan hutan tanaman tidak bisa hanya dilakukan di area PBPH, tapi juga melalui Perhutanan Sosial HTR. Diperlukan percepatan pembangunan hutan tanaman dengan dukungan program percepatan Perhutanan Sosial dari Ditjen PSKL pada area kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin.

TABEL 5. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pengayaan alami di areal definitif Perhutanan Sosial

NO	PROVINSI	SKEMA						TOTAL UNIT	TOTAL LUAS
		PPHD		PPHKM		PPHTR			
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS		
1	Sumatera Utara	-	-	1	2,22	-	-	1	2,22
2	Sumatera Barat	1	0,01	-	-	-	-	1	0,01
3	Riau	7	315,11	17	477,99	-	-	24	793,11
4	Jambi	3	0,61	3	202,54	-	-	6	203,15
5	Sumatera Selatan	1	1,62	3	9,42	-	-	4	11,05
6	Bengkulu	-	-	2	0,11	-	-	2	0,11
7	Lampung	-	-	1	0,95	-	-	1	0,95
8	Kepulauan Bangka Belitung	3	0,02	-	-	-	-	3	0,02
9	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	1,22	-	-	1	1,22
10	Nusa Tenggara Timur	-	-	1	181,57	-	-	1	181,57
11	Kalimantan Barat	17	337,11	-	-	-	-	17	337,11
12	Kalimantan Tengah	8	1.357,82	14	79,04	15	322,32	37	1.759,17
13	Kalimantan Selatan	3	0,02	2	2,50	-	-	5	2,52
14	Kalimantan Timur	8	431,93	9	237,77	3	155,15	20	824,85
15	Kalimantan Utara	4	14,49	1	2,11	1	0,09	6	16,69
16	Sulawesi Utara	-	-	1	0,00	-	-	1	0,00
17	Sulawesi Tengah	9	260,00	-	-	-	-	9	260,00
18	Maluku	12	679,96	1	9,84	-	-	13	689,80
19	Maluku Utara	6	205,15	-	-	-	-	6	205,15
20	Papua	3	60,10	-	-	-	-	3	60,10
21	Papua Barat	1	0,13	-	-	-	-	1	0,13
TOTAL		**86**	**3.664,08**	**57**	**1.207,30**	**19**	**477,56**	**162**	**5.348,93**

TABEL 6. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pembangunan hutan tanaman di areal definitif PS

No	Provinsi	Skema										Total Unit	Total Luas
		Pphd		Pphkm		Pphtr		Kemitraan kehutanan		Iphps			
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas		
1	Aceh	8	1.474,90	3	996,44	-	-	-	-	-	-	11	2.471,34
2	Sumatera Utara	-	-	7	259,64	4	213,85	-	-	-	-	11	473,49
3	Sumatera Barat	1	46,80	4	205,78			-	-	-	-	5	252,57
4	Jambi	11	2.962,20	31	3.689,27	36	17.090,95	-	-	-	-	78	23.742,43
5	Sumatera Selatan	5	385,63	4	194,28	9	3.814,65	2	47,77	-	-	20	4.442,33

No	Provinsi	Skema										Total Unit	Total Luas
		Pphd		Pphkm		Pphtr		Kemitraan kehutanan		Iphps			
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas		
6	Bengkulu	-	-	1	16,24			-	-	-	-	1	16,24
7	Lampung	-	-	1	34,68	1	7,35	25	735,91	-	-	27	777,95
8	Kepulauan Bangka Belitung	7	655,93	6	286,19	25	2.154,10	-	-	-	-	38	3.096,22
9	Kepualaun Riau	1	237,25	1	137,83	4	332,55	-		-	-	6	707,63
10	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	10	920,47	5	778,79	15	1.699,26
11	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	24	1.460,96	12	2.242,57	36	3.703,54
12	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	128	11.734,25	18	1.025,30	146	12.759,55
13	Banten	-	-	-	-	-	-	6	362,65	-	-	6	362,65
14	Bali	3	443,36	-	-	1	42,05	-	-	-	-	4	485,41
15	Nusa Tenggara Barat	-	-	10	1.011,38			16	1.211,84	-	-	26	2.223,21
16	Nusa Tenggara Timur	-	-	27	2.094,71	10	405,17	-	-	-	-	37	2.499,88
17	Kalimantan Barat	15	742,83	5	988,33	1	62,39	-	-	-	-	21	1.793,55
18	Kalimantan Tengah	7	325,01	19	1.317,20	41	9.800,08	-	-	-	-	67	11.442,29
19	Kalimantan Selatan	8	1.483,48	7	683,48	5	797,95	3	116,91	-	-	23	3.081,81
20	Kalimantan Timur	14	2.242,52	-	-	11	6.318,97	-	-	-	-	25	8.561,48
21	Kalimantan Utara	4	1.496,14	1	510,93	3	69,64	-	-	-	-	8	2.076,71
22	Sulawesi Utara	-	-	7	463,28	-	-	-	-	-	-	7	463,28
23	Sulawesi Tengah	18	1.798,37	8	1.477,13	-	-	2	71,94	-	-	28	3.347,44
24	Sulawesi Selatan	8	1.407,15	13	2.500,80	2	237,76	-	-	-	-	23	4.145,71
25	Sulawesi Tenggara	5	937,46	63	5.262,79	6	1.371,20	-	-	-	-	74	7.571,45
26	Gorontalo	9	837,60	7	505,63	1	45,89	-	-	-	-	17	1.389,12
27	Sulawesi Barat	-	-	-	-	1	659,79	-	-	-	-	1	659,79
28	Maluku	27	9.875,30	5	963,71	-	-	-	-	-	-	32	10.839,02
29	Maluku Utara	5	775,80	-	-	-	-	-	-	-	-	5	775,80
30	Papua	1	43,51	-	-	1	1,18	-	-	-	-	2	44,69
31	Papua Barat	6	135,28	-	-	-	-	-	-	-	-	6	135,28
TOTAL		**163**	**28.306,52**	**230**	**23.599,73**	**162**	**43.425,52**	**216**	**16.662,71**	**35**	**4.046,66**	**806**	**116.041,13**

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) memiliki mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk

peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan. Perlindungan hutan alam di dalam area perizinan PIAPS dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat di kawasan hutan produksi yang belum dikelola dan memperkuat pembinaan usaha perhutanan sosial.

Percepatan pemberian akses PS di wilayah indikatif (PIAPS) telah menjadi bagian dari program PSKL, yakni melalui kegiatan *coaching clinic* dan FGD dengan *output* berupa usulan PS. Selain mempercepat perluasan PS, pembinaan untuk PS yang telah terbentuk juga memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan. Dalam hal ini, PS memiliki klasifikasi kelembagaan yang disebut Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan tingkatan kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam strata kategori *blue*, *silver*, *gold*, dan *platinum* yang akan menentukan pola pembinaan dan fasilitasi. Program Perhutanan Sosial saat ini termasuk kedalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menerima dukungan pendanaan dari APBN yang ditujukan untuk kegiatan pemberian akses dan fasilitas pengembangan usaha, termasuk penyusunan rencana kelola. Informasi *template* spasial perencanaan operasional dalam hal ini dapat dimanfaatkan dalam proses pengembangan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS), terutama dalam menentukan jenis usaha/pemanfaatan (kayu, HHBK, dll.).

Terkait dengan upaya perlindungan hutan alam, kegiatan perhutanan sosial berkontribusi dalam pencegahan deforestasi di tanah mineral dan gambut. Target kegiatan pencegahan deforestasi dari tanah mineral pada areal PS seluas 138.746 ha dengan luasan definitif PS seluas 62.860 ha (Tabel 7) dan luasan indikatif PS seluas 75.886 ha (Tabel 8). Sementara itu, target kegiatan pencegahan deforestasi dari tanah gambut pada areal PS seluas 102.424 ha dengan luasan definitif PS seluas 98.027 ha (Tabel 9) dan luasan indikatif PS seluas 4.397 ha (Tabel 10).

Tabel 7. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah mineral di areal definitif PS

NO	PROVINSI	SKEMA										TOTAL UNIT	TOTAL LUAS
		PPHD		PPHKM		PPHTR		KEMITRAAN KEHUTANAN		IPHPS			
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS		
1	Sumatera Barat	1	0,00	1	16,04	-	-	-	-	-	-	2	16,04
2	Riau	7	5.505,95	26	11.561,51	-	-	-	-	-	-	33	17.067,46
3	Jambi	-	-	-	-	4	45,31	-	-	-	-	4	45,31
4	Sumatera Selatan	-	-	16	891,32	-	-	-	-	-	-	16	891,32
5	Bengkulu	-	-	5	915,68	-	-	-	-	-	-	5	915,68
6	Lampung	-	-	3	277,43	-	-	-	-	-	-	3	277,43
7	Kalimantan Barat	36	13.695,14	1	2,74	1	37,41	-	-	-	-	38	13.735,29
8	Kalimantan Tengah	25	10.681,22	27	7.867,57	18	6.090,85	-	-	-	-	70	24.639,64

NO	PROVINSI	SKEMA										TOTAL UNIT	TOTAL LUAS
		PPHD		PPHKM		PPHTR		KEMITRAAN KEHUTANAN		IPHPS			
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS		
9	Kalimantan Selatan	2	29,89	6	464,91	-	-	-	-	-	-	8	494,79
10	Kalimantan Timur	7	1.453,01	12	631,33	2	2.692,59	-	-	-	-	21	4.776,93
TOTAL		**78**	**31.365,21**	**97**	**22.628,54**	**25**	**8.866,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**62.859,91**

TABEL 8. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah mineral di areal indikatif PS

NO	PROVINSI	DESA	LUAS
1	Sumatera Barat	1	134
2	Riau	46	9.180
3	Jambi	13	870
4	Sumatera Selatan	7	41
5	Bengkulu	8	1.249
6	Kalimantan Barat	65	28.822
7	Kalimantan Tengah	38	12.634
8	Kalimantan Selatan	9	2.588
9	Kalimantan Timur	21	20.369
10	Kalimantan Utara	1	1
	Jumlah	209	75.886

TABEL 9. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah gambut di areal definitif PS

NO	PROVINSI	SKEMA										TOTAL UNIT	TOTAL LUAS
		PPHD		PPHKM		PPHTR		KEMITRAAN KEHUTANAN		IPHPS			
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS		
1	Sumatera Utara	-	-	1	19,07	-	-	-	-	-	-	1	19,07
2	Riau	14	23.396,62	23	3.548,71	-	-	-	-	-	-	37	26.945,33
3	Jambi	3	6.488,94	3	476,41	-	-	-	-	-	-	6	6.965,35
4	Sumatera Selatan	1	1.705,55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.705,55
5	Kalimantan Barat	29	30.121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29	30.121,00
6	Kalimantan Tengah	19	19.071,95	12	13.177,46	1	0,94	-	-	-	-	19	32.250,36
7	Kalimantan Timur	2	20,12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20,12
TOTAL		**68**	**80.804,19**	**39**	**17.221,66**	**1**	**0,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95**	**98.026,79**

TABEL 10. Luas area pelaksanaan aksi mitigasi kegiatan pencegahan deforestasi di tanah gambut di areal indikatif PS

NO	PROVINSI	DESA	LUAS
1	RIAU	12	1.128
2	KALIMANTAN BARAT	16	2.399
3	KALIMANTAN TENGAH	9	870
	JUMLAH	37	4.397

A.3. Strategi Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

Rencana Strategis Ditjen PHPL 2022-2030 setidaknya memuat sebanyak 7 (tujuh) arahan kebijakan dan 20 (dua puluh) strategi yang beberapa diantaranya bersinergi dalam mendukung *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 bagi strategi Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi sebagaimana yang disajikan pada Tabel 11 di bawah ini.

TABEL 11. Integrasi Strategi untuk Kelompok Kerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

Rencana Strategis 2022-2030				Integrasi Strategi untuk Indonesia's FOLU *Net Sink* 2030
Arah Kebijakan		Strategi		
1	Menjamin kepastian investasi dan usaha.	1	Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan.	N/A
2	Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan.	2	Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman.	Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman.
		3	Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi.	Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi.
		4	Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen.	Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen.
		5	Integrasi dengan industri dan pasar.	N/A
3	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan)	6	Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha.	Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha.
		7	Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses.	Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses.
		8	Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (*water management*).	N/A
		9	Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla.	N/A

Rencana Strategis 2022-2030				Integrasi Strategi untuk Indonesia's FOLU *Net Sink* 2030
Arah Kebijakan		Strategi		
4	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.	10	Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi.	Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi.
		11	Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK.	N/A
		12	Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra HHBK.	N/A
5	Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan.	13	Mendorong IUPHHK-HA/ HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri.	Mendorong IUPHHK-HA/ HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri.
		14	Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri.	Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri.
		15	Rasionalisasi kapasitas industri (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan).	N/A
		16	Penyederhanaan izin untuk industri kecil/ HHBK.	N/A
6	Optimalisasi penerimaan PNBP dan nilai tambah (*added value*).	17	Mendukung ketahanan energi dengan industri *pellet*.	N/A
		18	Pengembangan HS code yang sesuai dengan tren pasar global.	N/A
7	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.	19	Fasilitasi SVLK untuk industri kecil/ UMKM.	N/A
		20	Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.	N/A

SUMBER: Rencana Strategis Ditjen PHPL 2022-2030

Strategi pencapaian target untuk *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 dari Rencana Strategis 2022-2030 terdiri dari 8 (delapan) strategi, yaitu:

1. Strategi ke-2: Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman.
2. Strategi ke-3: Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi.
3. Strategi ke-4: Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen.
4. Strategi ke-6: Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha.
5. Strategi ke-7: Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses.
6. Strategi ke-10: Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi.

7. Strategi ke-13: Mendorong IUPHHK-HA/ HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri.
8. Strategi ke-14: Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri.

A.3.1. Strategi Pengelolaan Hutan Lestari

Mengacu pada Renstra PHPL 2022-2030, maka strategi yang tepat untuk upaya pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut:

1. Strategi ke-2 yaitu Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman;
2. Strategi ke-6: Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha; dan
3. Strategi ke-14: Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri.

A.3.2. Strategi Pengelolaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Mengacu pada Renstra PHPL 2022-2030, maka strategi yang tepat untuk upaya pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut:

1. Strategi ke-3: Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi;
2. Strategi ke-4: Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen;
3. Strategi ke-6: Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha;
4. Strategi ke-7: Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses; dan
5. Strategi ke-13: Mendorong IUPHHK-HA/ HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri.

B. Target, Program dan Kegiatan Tahun 2022 - 2030

B.1. Target, Program dan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

Kebijakan pengendalian kebakaran hutan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk kemudian menurunkan emisi (Saharjo & Yungan, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai kontribusi di dalam penurunan emisi akibat karhutla dan terlibat di dalam penyusunan Rencana Operasional *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030. Dokumen FOLU *Net Sink* 2030 mencakup beberapa hal seperti: 1) capaian, target dan strategi; 2) implementasi dan operasional, dan 3) monitoring dan evaluasi untuk 11 (sebelas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan. Dalam konteks pengendalian kebakaran hutan dan lahan, setidaknya terdapat 6 (enam) kegiatan aksi mitigasi yang terkait dengan upaya pengendalian karhutla yaitu:

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral;
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut;

3. Pengurangan laju degradasi lahan mineral:
4. Pengurangan laju degradasi lahan gambut;
5. Restorasi gambut; dan
6. Perbaikan tata air gambut.

Program dan kegiatan aksi mitigasi karhutla mengacu pada RENSTRA KLHK 2022-2030 yang merupakan hasil *cascading* dari RPJMN 2022-2030 yang dikeluarkan oleh BAPPENAS. Dari 6 aksi mitigasi terkait pengendalian karhutla di atas, terlihat adanya keterkaitan program dan kegiatan pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan baik dengan Direktorat/Direktorat Jenderal di lingkup KLHK maupun dengan institusi di luar KLHK, seperti: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Pertanian, LAPAN, dan BMKG.

1. Implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen PPI (lihat Tabel 12). Dalam perencanaan implementasi ke depan, Dit PKHL bersama-sama dengan unit di daerah melaksanakan minimal 4 jenis kegiatan utama dan 6 jenis kegiatan operasional.

TABEL 12. Kegiatan Pengendalian Karhutla

Kegiatan Pengendalian Karhutla	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1. Pencegahan karhutla 2. Penanggulangan karhutla melalui Pemadaman Darat 3. Penanggulangan karhutla melalui Pemadaman Udara 4. Penanganan paska kebakaran	Pengurangan luas karhutla	1. Terjaminnya Efektivitas dan jangkauan dalkarhutla
		2. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
		3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
		Penguatan Pencegahan Karhutla
		Penyadartahuan Pencegahan Karhutla
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla
		Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla
		Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla
		Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla
		4. Operasi Bidang Penanganan Bencana
		5. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat
		Deteksi dan Peringatan Dini
		Pelaksanaan Pemadaman darat
		6. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman dari Udara

2. Implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan program dan kegiatan di lingkup KLHK dan di luar KLHK, meliputi Ditjen PPI, Ditjen PKTL, Ditjen PHL, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Ditjen PDASRH, Ditjen KSDAE, BP2SDM, Ditjen Gakkum, dan BRGM (Tabel 13).

TABEL 13. Hubungan Kegiatan Pengendalian Karhutla dengan Program dan Kegiatan Ditjen di Lingkup KLHK dan Institusi di Luar KLHK

Institusi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Ditjen PPI	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Penurunan luas areal karhutla di provinsi rawan karhutla.
	Mitigasi Perubahan Iklim	2. Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim.
	Pengendalian karhutla	3. Penurunan luas karhutla di provinsi rawan karhutla dari baseline 2010.
		4. Pemantauan pencegahan penebangan liar.
		5. Pemantauan pengelolaan areal PBPH-HT yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		6. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan.
		7. Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		8. Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
Ditjen PKTL	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1. Pematauan pencegahan penebangan liar.
		2. Pemantauan pengelolaan areal PBPH-HT yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		3. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan.
		4. Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		5. Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		6. Pemantauan Pemberdayaan dan pemberian akses pada masyarakat melalui Perhutanan Sosial.

Institusi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Ditjen PHL	Pengembangan sistem insentif bagi pencegahan degradasi hutan primer	1. Pencegahan penebangan liar
		2. Pengelolaan areal PBPH-HT yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		3. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
		4. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		5. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
Ditjen PDASRH	Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	1. Pencegahan penebangan liar di wilayah DAS.
	Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	2. Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan wilayah DAS yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		3. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di wilayah DAS.
		4. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan wilayah DAS Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		5. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan wilayah DAS Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
5. Ditjen KSDAE	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	1. Pencegahan penebangan liar di areal hutan konservasi.
	Pengelolaan Kawasan Konservasi	2. Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan areal hutan konservasi yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		3. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di areal hutan konservasi.
		4. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal hutan konservasi Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		5. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal hutan konservasi Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.

Institusi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Ditjen PSKL	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	1. Pencegahan penebangan liar di areal Perhutanan Sosial.
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	2. Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan areal Perhutanan Sosial yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		3. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di areal Perhutanan Sosial.
		4. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal Perhutanan Sosial Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		5. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal Perhutanan Sosial Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		6. Pemberdayaan dan pemberian akses pada masyarakat melalui Perhutanan Sosial.
Ditjen PPKL	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	1. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan.
	Peningkatan Penyuluhan	2. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
Ditjen Gakkum	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1. Pencegahan penebangan liar.
		2. Kegiatan Patroli, Sosialisasi dan Operasi Lapang untuk Penjagaan Hutan dari ancaman dan Gangguan.
		3. Penegakkan hukum pidana untuk mencegah kebakaran hutan, penambangan/pembalakan liar, dan perambahan hutan.
		4. Penyadartahuan tentang Pengamanan Hutan (Pembalakan Liar / Perambahan / Ladang Berpindah).

Institusi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Badan BP2SDM	Peningkatan Penyuluhan	1. Pencegahan penebangan liar di areal KHDTK.
		2. Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan areal KHDTK yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		3. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di areal KHDTK.
		4. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal KHDTK Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		5. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal KHDTK Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
BRGM	Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut di 7 Provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua).	1. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan
	Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di 9 Provinsi (Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumsel, Kalbar, Kalut, Papua, dan Papua Barat).	2. Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.

Setiap Pemegang PBPH pada hutan lindung atau hutan produksi; Pemegang Persetujuan HTR; Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan; Pemegang Persetujuan Hutan Kemasyarakatan; Pemegang Persetujuan Hutan Desa; dan Pemilik Hutan Hak, wajib melaksanakan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di areal kerja masing-masing.

Wilayah sasaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dituangkan pada Tabel 12 dan 13 di atas diprioritaskan pada adalah wilayah yang memiliki indek prioritas lokasi tinggi, yaitu pada IPL 8 dan 9 yang luasnya mencapai lebih dari 2,8 juta hektar dan hampir 60% atau sekitar 1,6 juta hektar berada di daerah gambut. Wilayah dengan risiko kebakaran tinggi berada di delapan provinsi yaitu Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Selatan yang tersebar di 675 desa.

B.2. Target, Program dan Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Program kegiatan perhutanan sosial dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari meliputi 4 (empat) program yaitu: penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha perhutanan sosial, pendampingan perhutanan sosial, dan penanganan kasus konflik. Secara keseluruhan, target, program dan kegiatan perhutanan sosial disajikan pada Tabel 14 berikut:

TABEL 14. Target, Program dan Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari

No	Target	Program	Kegiatan
1.	Kegiatan pengayaan alami/ENR seluas 5.349 ha (definitif PS)	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	a. Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD,HKm, HTR,KK b. Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm,Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat
		Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	a. Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan b. Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan c. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum
		Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	a. Penetapan hutan adat dan hutan hak b. Identifikasi dan inventarisasi MHA, calon hutan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional
		Kemitraan Lingkungan	a. Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial b. Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
2.	Kegiatan pembangunan hutan tanaman seluas 116.041 ha (definitif PS)	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	a. Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD,HKm, HTR,KK a. Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm,Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat
		Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	a. Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan b. Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan c. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum
		Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	a. Penetapan hutan adat dan hutan hak b. Identifikasi dan inventarisasi MHA, calon hutan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional
		Kemitraan Lingkungan	a. Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial b. Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

No	Target	Program	Kegiatan
3.	Kegiatan pencegahan deforestasi di tanah mineral seluas 138.746 ha (definitif PS seluas 62.860 ha dan indikatif PS seluas 75.886 ha)	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	a. Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD,HKm, HTR,KK b. Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm,Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat
		Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	a. Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan b. Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan c. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum
		Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	a. Penetapan hutan adat dan hutan hak b. Identifikasi dan inventarisasi MHA, calon hutan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional
		Kemitraan Lingkungan	a. Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial b. Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
4.	Kegiatan pencegahan deforestasi di tanah gambut seluas 102.424 ha (definitif PS seluas 98.027 ha dan indikatif PS seluas 4.397 ha)	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	a. Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD,HKm, HTR,KK a. Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm,Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat
		Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	a. Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan b. Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan c. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum
		Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	a. Penetapan hutan adat dan hutan hak b. Identifikasi dan inventarisasi MHA, calon hutan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional
		Kemitraan Lingkungan	a. Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial b. Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Pendekatan capaian target kegiatan Perhutanan Sosial selama periode 2022 – 2030 dalam mendukung kegiatan aksi mitigasi pengayaan alami, pembangunan hutan tanaman, pencegahan deforestasi di tanah mineral dan pencegahan deforestasi di tanah gambut didasarkan pada indikator kinerja pada areal definitif dan indikatif Perhutanan Sosial.

Indikator kinerja untuk pencapaian target pada areal definitif Perhutanan Sosial dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu: 1) Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (target volume dalam unit satuan jumlah KUPS), 2) Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (target volume dalam unit satuan jumlah KUPS), 3) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan

Menjadi Kelas Gold/Platinum (target volume dalam unit satuan jumlah KUPS), 4) Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (target volume dalam unit satuan jumlah tenaga pendamping) dan 5) Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (target volume dalam unit satuan jumlah Perjanjian Kerja Sama/PKS).

Target aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 adalah seluas 5.348,93 Ha pada 162 Unit Persetujuan PS yang tersebar di 21 Provinsi dengan target volume aksi mitigasi selama periode 2022 – 2030 adalah 1) Tersusunnya 162 dokumen Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan, 2) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan kepada 162 KUPS, 3) Meningkatnya kelas 16 KUPS menjadi Gold/Platinum, 4) Tersedianya 162 tenaga pendamping yang akan mendampingi kelompok PS setiap tahunnya dan 5) Tersusunnya 81 PKS Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Target aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 secara rinci terlampir pada Tabel 15 dan Tabel 16.

TABEL 15. Target volume aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (Durasi Waktu: 2022-2030)								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Utara	1	2,22	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Barat	1	0,01	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Riau	24	793,11	-	1	2	5	5	5	3	2	1
4	Jambi	6	203,15	-	1	1	1	1	1	1	-	-
5	Sumatera Selatan	4	11,05	-	-	1	1	1	1	-	-	-
6	Bengkulu	2	0,11	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7	Lampung	1	0,95	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepulauan Bangka Belitung	3	0,02	-	1	1	1	-	-	-	-	-
9	Nusa Tenggara Barat	1	1,22	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	Nusa Tenggara Timur	1	181,57	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	Kalimantan Barat	17	337,11	-	1	2	3	3	3	2	2	1
12	Kalimantan Tengah	37	1.759,17	-	2	2	6	9	9	5	2	2
13	Kalimantan Selatan	5	2,52	-	1	1	1	1	1	-	-	-
14	Kalimantan Timur	20	824,85	-	1	3	3	3	3	3	2	2
15	Kalimantan Utara	6	16,69	-	1	1	1	1	1	1	-	-
16	Sulawesi Utara	1	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Sulawesi Tengah	9	260,00	-	1	1	2	2	1	1	1	-
18	Maluku	13	689,80	-	1	2	2	2	2	2	1	1
19	Maluku Utara	6	205,15	-	1	1	1	1	1	1	-	-
20	Papua	3	60,10	-	1	1	1	-	-	-	-	-
21	Papua Barat	1	0,13	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		162	5.348,93	-	19	22	28	29	28	19	10	7

	INDIKATOR KINERJA: Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (Durasi Waktu: 2022-2030)									INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (Durasi Waktu: 2022-2030)								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)									TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	2	5	5	5	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	2	3	3	3	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	-	2	2	6	9	9	5	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	3	3	3	3	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	1	2	2	2	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	19	22	28	29	28	19	10	7	-	4	8	3	1	-	-	-	-

TABEL 16. Target volume aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: TENAGA PENDAMPING)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Sumatera Utara	1	2,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Sumatera Barat	1	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Riau	24	793,11	24	24	24	24	24	24	24	24	24
4	Jambi	6	203,15	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Sumatera Selatan	4	11,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Bengkulu	2	0,11	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Lampung	1	0,95	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Kepulauan Bangka Belitung	3	0,02	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Nusa Tenggara Barat	1	1,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Nusa Tenggara Timur	1	181,57	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Kalimantan Barat	17	337,11	17	17	17	17	17	17	17	17	17
12	Kalimantan Tengah	37	1.759,17	37	37	37	37	37	37	37	37	37
13	Kalimantan Selatan	5	2,52	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Kalimantan Timur	20	824,85	20	20	20	20	20	20	20	20	20
15	Kalimantan Utara	6	16,69	6	6	6	6	6	6	6	6	6
16	Sulawesi Utara	1	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Sulawesi Tengah	9	260,00	9	9	9	9	9	9	9	9	9
18	Maluku	13	689,80	13	13	13	13	13	13	13	13	13
19	Maluku Utara	6	205,15	6	6	6	6	6	6	6	6	6
20	Papua	3	60,10	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	Papua Barat	1	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL		162	5.348,93	162	162	162	162	162	162	162	162	162

Target aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 adalah seluas 116.041,13 Ha pada 806 Unit Persetujuan PS yang tersebar di 31 Provinsi dengan target volume aksi mitigasi selama periode 2022 – 2030 adalah 1) Tersusunnya 806 dokumen Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan, 2) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan kepada 806 KUPS, 3) Meningkatnya kelas 85 KUPS menjadi Gold/ Platinum, 4) Tersedianya 806 tenaga pendamping yang akan mendampingi kelompok PS setiap tahunnya dan 5) Tersusunnya 403 PKS Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: PKS)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	81	81	81	81	81	81	81	81	81

dan Kemitraan Lingkungan. Target aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 secara rinci terlampir pada Tabel 17 dan Tabel 18.

TABEL 17. Target volume aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (Durasi Waktu: 2022-2030)								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Aceh	11	2.471,34	-	1	2	2	2	2	1	1	-
2	Sumatera Utara	11	473,49	-	1	2	2	2	2	1	1	-
3	Sumatera Barat	5	252,57	-	1	1	1	1	1	-	-	-
4	Jambi	78	23.742,43	-	6	9	12	15	11	10	9	6
5	Sumatera Selatan	20	4.442,33	-	2	2	3	4	3	2	2	2
6	Bengkulu	1	16,24	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Lampung	27	777,95	-	1	3	5	7	5	3	2	1
8	Kepulauan Bangka Belitung	38	3.096,22	-	2	2	5	10	10	5	2	2
9	Kepualaun Riau	6	707,63	-	1	1	1	1	1	1	-	-
10	Jawa Barat	15	1.699,26	-	1	2	2	3	2	2	2	1
11	Jawa Tengah	36	3.703,54	-	2	2	5	9	9	5	2	2
12	Jawa Timur	146	12.759,55	-	10	18	20	20	20	20	20	18
13	Banten	6	362,65	-	1	1	1	1	1	1	-	-
14	Bali	4	485,41	-	-	1	1	1	1	-	-	-
15	Nusa Tenggara Barat	26	2.223,21	-	1	3	5	6	5	3	2	1
16	Nusa Tenggara Timur	37	2.499,88	-	2	2	6	9	9	5	2	2
17	Kalimantan Barat	21	1.793,55	-	1	3	4	4	4	2	2	1
18	Kalimantan Tengah	67	11.442,29	-	3	6	10	12	12	12	10	2
19	Kalimantan Selatan	23	3.081,81	-	1	3	4	4	4	3	2	2
20	Kalimantan Timur	25	8.561,48	-	1	3	5	5	5	3	2	1
21	Kalimantan Utara	8	2.076,71	-	1	1	2	2	1	1	-	-
22	Sulawesi Utara	7	463,28	-	1	1	1	2	1	1	-	-
23	Sulawesi Tengah	28	3.347,44	-	2	3	5	7	5	3	2	1
24	Sulawesi Selatan	23	4.145,71	-	1	3	4	4	4	3	2	2

	INDIKATOR KINERJA: Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (Durasi Waktu: 2022-2030)									INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (Durasi Waktu: 2022-2030)								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)									TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	6	9	12	15	11	10	9	6	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	2	2	3	4	3	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	3	5	7	5	3	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	-	2	2	5	10	10	5	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-
	-	1	2	2	3	2	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	-	2	2	5	9	9	5	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	-	10	18	20	20	20	20	20	18	-	2	2	2	2	2	2	2	1
	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	3	5	6	5	3	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	-	2	2	6	9	9	5	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	-	1	3	4	4	4	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	-	3	6	10	12	12	12	10	2	-	-	1	1	1	1	1	1	1
	-	1	3	4	4	4	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	-	1	3	5	5	5	3	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	-	1	1	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	3	5	7	5	3	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	-	1	3	4	4	4	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (Durasi Waktu: 2022-2030)								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
25	Sulawesi Tenggara	74	7.571,45	-	6	9	11	12	11	10	9	6
26	Gorontalo	17	1.389,12	-	1	2	3	3	3	2	2	1
27	Sulawesi Barat	1	659,79	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	Maluku	32	10.839,02	-	2	2	5	8	6	5	2	2
29	Maluku Utara	5	775,80	-	1	1	1	1	1	-	-	-
30	Papua	2	44,69	-	-	1	1	-	-	-	-	-
31	Papua Barat	6	135,28	-	1	1	1	1	1	1	-	-
TOTAL		806	116.041,13	-	56	90	128	156	140	105	78	53

TABEL 18. Target volume aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: TENAGA PENDAMPING)								
				2022	2023	2024	2022	2023	2027	2028	2029	2030
1	Aceh	11	2.471,34	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	Sumatera Utara	11	473,49	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	Sumatera Barat	5	252,57	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Jambi	78	23.742,43	78	78	78	78	78	78	78	78	78
5	Sumatera Selatan	20	4.442,33	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Bengkulu	1	16,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Lampung	27	777,95	27	27	27	27	27	27	27	27	27
8	Kepulauan Bangka Belitung	38	3.096,22	38	38	38	38	38	38	38	38	38
9	Kepualaun Riau	6	707,63	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10	Jawa Barat	15	1.699,26	15	15	15	15	15	15	15	15	15
11	Jawa Tengah	36	3.703,54	36	36	36	36	36	36	36	36	36
12	Jawa Timur	146	12.759,55	146	146	146	146	146	146	146	146	146
13	Banten	6	362,65	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14	Bali	4	485,41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Nusa Tenggara Barat	26	2.223,21	26	26	26	26	26	26	26	26	26

	INDIKATOR KINERJA: Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (Durasi Waktu: 2022-2030)									INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (Durasi Waktu: 2022-2030)								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)									TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	6	9	11	12	11	10	9	6	-	-	1	1	1	1	1	1	1
	-	1	2	3	3	3	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	2	5	8	6	5	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	56	90	128	156	140	105	78	53	-	12	21	18	13	7	5	5	4

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: PKS)								
	2022	2023	2024	2022	2023	2027	2028	2029	2030
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	13	13	13	13	13	13	13	13	13

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: TENAGA PENDAMPING)								
				2022	2023	2024	2022	2023	2027	2028	2029	2030
16	Nusa Tenggara Timur	37	2.499,88	37	37	37	37	37	37	37	37	37
17	Kalimantan Barat	21	1.793,55	21	21	21	21	21	21	21	21	21
18	Kalimantan Tengah	67	11.442,29	67	67	67	67	67	67	67	67	67
19	Kalimantan Selatan	23	3.081,81	23	23	23	23	23	23	23	23	23
20	Kalimantan Timur	25	8.561,48	25	25	25	25	25	25	25	25	25
21	Kalimantan Utara	8	2.076,71	8	8	8	8	8	8	8	8	8
22	Sulawesi Utara	7	463,28	7	7	7	7	7	7	7	7	7
23	Sulawesi Tengah	28	3.347,44	28	28	28	28	28	28	28	28	28
24	Sulawesi Selatan	23	4.145,71	23	23	23	23	23	23	23	23	23
25	Sulawesi Tenggara	74	7.571,45	74	74	74	74	74	74	74	74	74
26	Gorontalo	17	1.389,12	17	17	17	17	17	17	17	17	17
27	Sulawesi Barat	1	659,79	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Maluku	32	10.839,02	32	32	32	32	32	32	32	32	32
29	Maluku Utara	5	775,80	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	Papua	2	44,69	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	Papua Barat	6	135,28	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL		806	116.041,13	806	806	806	806	806	806	806	806	806

Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 adalah seluas 62.859,91 Ha pada 200 Unit Persetujuan PS yang tersebar di 10 Provinsi dengan target volume aksi mitigasi selama periode 2022 – 2030 adalah 1) Tersusunnya 200 dokumen Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan, 2) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan kepada 200 KUPS, 3) Meningkatnya kelas 20 KUPS menjadi Gold/ Platinum, 4) Tersedianya 200 tenaga pendamping yang akan mendampingi kelompok PS setiap tahunnya dan 5) Tersusunnya 100 PKS Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 secara rinci terlampir pada Tabel 19 dan Tabel 20.

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: PKS)								
	2022	2023	2024	2022	2023	2027	2028	2029	2030
	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	403	403	403	403	403	403	403	403	403

TABEL 19. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (Durasi Waktu: 2022-2030)								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Barat	2	16,04	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Riau	33	17.067,46	-	2	2	4	9	8	4	2	2
3	Jambi	4	45,31	-	-	2	2	-	-	-	-	-
4	Sumatera Selatan	16	891,32	-	-	2	2	4	4	2	2	-
5	Bengkulu	5	915,68	-	2	3	-	-	-	-	-	-
6	Lampung	3	277,43	-	-	1	2	-	-	-	-	-
7	Kalimantan Barat	38	13.735,29	-	2	2	5	10	10	5	2	2
8	Kalimantan Tengah	70	24.639,64	-	8	8	10	10	10	8	8	8
9	Kalimantan Selatan	8	494,79	-	-	2	2	2	2	-	-	-
10	Kalimantan Timur	21	4.776,93	-	3	3	3	3	3	3	3	
	TOTAL	200	62.859,91	-	19	25	30	38	37	22	17	12

TABEL 20. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: TENAGA PENDAMPING)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Sumatera Barat	2	16,04	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Riau	33	17.067,46	33	33	33	33	33	33	33	33	33
3	Jambi	4	45,31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Sumatera Selatan	16	891,32	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	Bengkulu	5	915,68	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Lampung	3	277,43	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	INDIKATOR KINERJA: Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (Durasi Waktu: 2022-2030)									INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (Durasi Waktu: 2022-2030)								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)									TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	2	4	9	8	4	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2	2	4	4	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	2	5	10	10	5	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	-	8	8	10	10	10	8	8	8	-	1	1	1	1	1	1	1	-
	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	-	3	3	3	3	3	3	3		-	-	-	1	1	-	-	-	
	-	19	25	30	38	37	22	17	12	-	5	4	5	3	1	1	1	-

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: PKS)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: TENAGA PENDAMPING)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kalimantan Barat	38	13.735,29	38	38	38	38	38	38	38	38	38
8	Kalimantan Tengah	70	24.639,64	70	70	70	70	70	70	70	70	70
9	Kalimantan Selatan	8	494,79	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Kalimantan Timur	21	4.776,93	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	TOTAL	200	62.859,91	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 adalah seluas 98.026,79 Ha pada 95 Unit Persetujuan PS yang tersebar di 7 Provinsi dengan target volume aksi mitigasi selama periode 2022 – 2030 adalah 1) Tersusunnya 95 dokumen Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan, 2) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan kepada 95 KUPS, 3) Meningkatnya kelas 10 KUPS menjadi Gold/Platinum, 4) Tersedianya 95 tenaga pendamping yang akan mendampingi kelompok PS setiap tahunnya dan 5) Tersusunnya 48 PKS Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 secara rinci terlampir pada Tabel 21 dan Tabel 22.

TABEL 21. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (Durasi Waktu: 2022-2030)								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Utara	1	19,07	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Riau	37	26.945,33	-	2	2	5	10	9	5	2	2
3	Jambi	6	6.965,35	-	-	2	2	2	-	-	-	-
4	Sumatera Selatan	1	1.705,55	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalimantan Barat	29	30.121,00	-	2	3	5	7	5	3	2	2

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: PKS)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	INDIKATOR KINERJA: Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (Durasi Waktu: 2022-2030)										INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (Durasi Waktu: 2022-2030)							
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)										TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)							
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	2	5	10	9	5	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	3	5	7	5	3	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (Durasi Waktu: 2022-2030)								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	Kalimantan Tengah	19	32.250,36	-	2	2	3	3	3	2	2	2
7	Kalimantan Timur	2	20,12	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		95	98.026,79	-	10	9	15	22	17	10	6	6

TABEL 22 Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial								
				TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: TENAGA PENDAMPING)								
				2022	2023	2024	2022	2023	2027	2028	2029	2030
1	Sumatera Utara	1	19,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Riau	37	26.945,33	37	37	37	37	37	37	37	37	37
3	Jambi	6	6.965,35	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Sumatera Selatan	1	1.705,55	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Kalimantan Barat	29	30.121,00	29	29	29	29	29	29	29	29	29
6	Kalimantan Tengah	19	32.250,36	19	19	19	19	19	19	19	19	19
7	Kalimantan Timur	2	20,12	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL		95	98.026,79	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Indikator kinerja untuk pencapaian target pada areal indikatif Perhutanan Sosial terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: 1) Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK (target volume dalam unit satuan Hektar), 2) Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat (target volume dalam unit satuan Hektar), 3) Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (target volume dalam unit satuan jumlah KUPS), 4) Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (target volume dalam unit satuan jumlah KUPS, 5) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (target volume dalam unit satuan

	INDIKATOR KINERJA: Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (Durasi Waktu: 2022-2030)										INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (Durasi Waktu: 2022-2030)							
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)										TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: KUPS)							
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	2	2	3	3	3	2	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	10	9	15	22	17	10	6	6	-	-	2	3	3	2	-	-	-

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
	TARGET VOLUME (UNIT SATUAN: PKS)								
	2022	2023	2024	2022	2023	2027	2028	2029	2030
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	48	48	48	48	48	48	48	48	48

jumlah KUPS, 6) Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (target volume dalam unit satuan jumlah tenaga pendamping, 7) Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (target volume dalam unit satuan jumlah Perjanjian Kerja Sama/ PKS).

Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 adalah seluas 75.886 Ha pada 209 Unit Persetujuan PS yang tersebar di 10 Provinsi dengan target volume aksi mitigasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2023-2030 adalah 1) Prakondisi Persetujuan PS seluas 75.886 Ha, 2) Kawasan Hutan yang

Memperoleh Persetujuan PS seluas 75.886 Ha, 3) Tersusunnya 209 dokumen Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan, 4) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan kepada 209 KUPS, 5) Meningkatnya kelas 22 KUPS menjadi Gold/Platinum, 6) Tersedianya 209 tenaga pendamping yang akan mendampingi kelompok PS setiap tahunnya dan 7) Tersusunnya 105 PKS Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 secara rinci terlampir pada Tabel 23, Tabel 24 dan Tabel 25.

TABEL 23. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS, rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA : Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK (UNIT SATUAN: Hektar)									
				TARGET VOLUME									
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Sumatera Barat	1	134	134	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Riau	46	9.180	9.180	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Jambi	13	870	870	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Sumatera Selatan	7	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Bengkulu	8	1.249	1.249	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Lampung	65	28.822	28.822	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kalimantan Barat	38	12.634	12.634	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kalimantan Tengah	9	2.588	-	2.588	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kalimantan Selatan	21	20.369	-	20.369	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kalimantan Timur	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	209	75.886	52929	22957	-	-	-	-	-	-	-	

	INDIKATOR KINERJA : Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat (UNIT SATUAN: Hektar)									INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
	TARGET VOLUME									TARGET VOLUME								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	9.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	10	10	10	2	2
	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	1
	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-
	1.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	28.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	12	12	12	5	5
	12.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	9	8	2	2
	-	2.588	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1
	-	20.369	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	4	2	2	2
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	52929	22957	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	34	40	40	37	15	14

TABEL 24. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum, jumlah tenaga pendamping PS

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET VOLUME								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Barat	1	134	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Riau	46	9.180	-	2	2	8	10	10	10	2	2
3	Jambi	13	870	-	1	2	2	2	2	2	1	1
4	Sumatera Selatan	7	41	-	1	1	1	1	1	1	1	-
5	Bengkulu	8	1.249	-	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Lampung	65	28.822	-	2	5	12	12	12	12	5	5
7	Kalimantan Barat	38	12.634	-	2	2	5	8	9	8	2	2
8	Kalimantan Tengah	9	2.588	-	1	1	1	2	1	1	1	1
9	Kalimantan Selatan	21	20.369	-	1	2	4	4	4	2	2	2
10	Kalimantan Timur	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	209	75.886	-	13	16	34	40	40	37	15	14

TABEL 25. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
				TARGET VOLUME								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Barat	1	134	-	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Riau	46	9.180	-	23	23	23	23	23	23	23	23
3	Jambi	13	870	-	7	7	7	7	7	7	7	7
4	Sumatera Selatan	7	41	-	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Bengkulu	8	1.249	-	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Lampung	65	28.822	-	33	33	33	33	33	33	33	33
7	Kalimantan Barat	38	12.634	-	19	19	19	19	19	19	19	19

	INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: Tenaga Pendamping)								
	TARGET VOLUME									TARGET VOLUME								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	46	46	46	46	46	46	46	46
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13	13	13	13
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8
	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	65	65	65	65	65	65	65	65
	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	38	38
	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9
	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21	21	21	21	21	21
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	8	4	3	3	2	1	1	-	-	209	209	209	209	209	209	209	209

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
				TARGET VOLUME								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
8	Kalimantan Tengah	9	2.588	-	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Kalimantan Selatan	21	20.369	-	11	11	11	11	11	11	11	11
10	Kalimantan Timur	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	TOTAL	209	75.886	-	105	105	105	105	105	105	105	105

Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 adalah seluas 4.397 Ha pada 37 Unit Persetujuan PS yang tersebar di 3 Provinsi dengan target volume aksi mitigasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2023-2030 adalah 1) Prakondisi Persetujuan PS seluas 4.397 Ha, 2) Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS seluas 4.397 Ha, 3) Tersusunnya 37 dokumen Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan, 4) Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan kepada 209 KUPS, 5) Meningkatnya kelas 9 KUPS menjadi Gold/Platinum, 6) Tersedianya 37 tenaga pendamping yang akan mendampingi kelompok PS setiap tahunnya dan 7) Tersusunnya 19 PKS Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Target aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 secara rinci terlampir pada Tabel 26, Tabel 27 dan Tabel 28.

TABEL 26. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS, rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA : Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK (UNIT SATUAN: Hektar)								
				TARGET VOLUME								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RIAU	12	1128	-	1128	-	-	-	-	-	-	-
2	KALIMANTAN BARAT	16	2399	-	2399	-	-	-	-	-	-	-
3	KALIMANTAN TENGAH	9	870	-	870	-	-	-	-	-	-	-
	Total	37	4397	-	4397	-	-	-	-	-	-	-

	INDIKATOR KINERJA : Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat KK (UNIT SATUAN: Hektar)									INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: DOKUMEN RKPS)								
	TARGET VOLUME									TARGET VOLUME								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	1128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	-
	-	2399	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	2	2	1
	-	870	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1
	-	4397	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	7	6	5	4	2

TABEL 27. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum, jumlah tenaga pendamping PS

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET VOLUME								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RIAU	12	1128	-	1	2	2	2	2	2	1	-
2	KALIMANTAN BARAT	16	2399	-	1	2	2	3	3	2	2	1
3	KALIMANTAN TENGAH	9	870	-	1	1	1	2	1	1	1	1
	Total	37	4397	-	3	5	5	7	6	5	4	2

TABEL 28. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT (SK)	TOTAL LUAS (HA)	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
				TARGET VOLUME								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RIAU	12	1128	-	6	6	6	6	6	6	6	6
2	KALIMANTAN BARAT	16	2399	-	8	8	8	8	8	8	8	8
3	KALIMANTAN TENGAH	9	870	-	5	5	5	5	5	5	5	5
	Total	37	4397	-	19	19	19	19	19	19	19	19

B.3. Target, Program dan Kegiatan Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

B.3.1. Penerapan Teknik Pengelolaan Hutan Lestari

Target penurunan emisi GRK pada NDC melalui kegiatan pengelolaan hutan lestari sejalan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dimana penurunan emisi dapat terjadi melalui penerapan teknologi penebangan dengan tingkat kerusakan tegakan dan keterbukaan wilayah minimal (Gunarso et al., 2009). Hal ini sejalan dengan salah satu indikator pengelolaan hutan lestari yaitu ketersediaan

	INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: Tenaga Pendamping)								
	TARGET VOLUME									TARGET VOLUME								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12
	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16
	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9
	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	37	37	37	37	37	37	37	37

dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Karena itu, indikator tersebut harus menjadi indikator penting yang diperhatikan dalam proses pemberian sertifikasi.

Merujuk pada peraturan tersebut, penurunan emisi melalui PHL dapat terjadi melalui upaya pengurangan dampak kerusakan tegakan akibat penebangan baik dengan penerapan teknologi *Reduce Impact Logging* (RIL), maupun melalui upaya pengayaan *Enhanced Natural Regeneration* (ENR) apabila kondisi tegakan hutan setelah tebangan mengalami degradasi berat atau berada pada tingkat yang tidak memungkinkan regenarasi alami dapat menjamin keberlanjutan produksi.

Peningkatan serapan hutan sekunder, baik melalui kegiatan pengayaan maupun RIL, merupakan salah satu aksi kunci untuk sektor kehutanan dan lahan dalam mencapai target *Net Sink*. Pada saat ketersediaan lahan untuk pembangunan hutan tanaman telah mencapai kondisi saturated, dimana hampir semua lahan sudah dimanfaatkan, maka peningkatan serapan hanya dapat dilakukan melalui perluasan area pengelolaan hutan sekunder. Target pelaksanaan kegiatan mitigasi PHL menuju *Net Sink* (LTS-LCCP) pada tahun 2030 masing-masing sebesar 3,10 juta ha dan 2,2 juta ha (Tabel 29).

Berdasarkan laporan dari APHI dan data sertifikasi area PBPH HA, total kumulatif implementasi silvikultur intensif (SILIN) hingga tahun 2019 adalah 167 ribu ha, sedangkan estimasi total kumulatif penerapan RIL-C hingga tahun 2019 sebesar 269 ribu ha. Dengan demikian, penerapan kegiatan PHL yang dibutuhkan hingga tahun 2030 sebesar 2,67 juta ha untuk target NDC dan 1,77 juta ha untuk target *Net Sink*.

TABEL 29. Target Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari untuk NDC-CM1 dan LTS-LCCP

Aksi mitigasi	Luas Tahun 2019 (x 1000 ha)	Target NDC (x 1000 ha)			Target Net Sink (x 1000 ha)		
		Kumulatif 2024	Kumulatif 2030	Sisa kuota[3]	Kumulatif 2024	Kumulatif 2030	Sisa kuota
PHL-SILIN	167[1]	1.589	3.105	2.669	1.413	2.207	1.770
PHL-RIL C	269[2]						

CATATAN: [1]Data diperoleh dari data kegiatan APHI, [2]Data diperoleh dari luasan PBPH HA dengan status sertifikasi baik dan dibagi dengan periode rotasi HA, [3]Sisa kuota merupakan nilai selisih antara luasan target dengan luasan yang sudah terealisasi.

Pengelolaan kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilaksanakan oleh Ditjen PHL. Di dalam kawasan Hutan Produksi, kegiatan pengayaan di Hutan Produksi dilakukan melalui kegiatan Silvikultur Intensif (SILIN), teknik penanaman pengkayaan hutan alam. Ditjen PHL telah merumuskan dokumen peta jalan SILIN untuk meningkatkan produktivitas hutan alam dan produksi nasional kayu hutan alam nasional, serta meningkatkan penerimaan negara (Ditjen PHPL, 2019).

Pada area PBPH dengan arahan produksi, implementasi PHL dilakukan melalui kegiatan RIL. Namun, berbeda dengan kegiatan SILIN, PBPH berkewajiban melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah (RIL). Pelaksanan kewajiban RIL terakomodir dalam klausul melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku. Melalui skema multi usaha kehutanan, PBPH-HT dapat melakukan kegiatan bisnis pemanfaatan kayu dari hutan alam pada area dengan jenis optimasi kawasan produksi. Untuk memenuhi target *Net Sink*, implementasi RIL pada area tersebut harus dioptimalkan.

Dalam usaha peningkatan luasan implementasi RIL, dibutuhkan skema insentif untuk meningkatkan partisipasi pihak swasta, misalnya melalui permudahan administrasi dan pemotongan pajak dan pungutan. Implementasi RIL di area PBPH-HA maupun PBPH-HT tidak terlepas dari ruang lingkup perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca panennya.

Selain itu, peningkatan kontribusi pihak swasta dalam pencapaian *Net Sink* juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberian akses perizinan di area hutan produksi yang belum memiliki izin, terutama pada area berisiko tinggi, dengan tipe pemanfaatan yang tetap menyesuaikan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungan dan kriteria kawasan lindung. Dengan demikian, progam penambahan luasan kawasan berizin pada hutan produksi yang tidak produktif oleh Ditjen PHL (Tabel 30) dapat diarahkan pada provinsi hasil analisis spasial perencanaan operasional.

TABEL 30. Program dan Kegiatan Ditjen PHL yang Berkaitan dengan Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	Peningkatan kualitas dan produktivitas industri primer kehutanan berbasis kayu Pengembangan industri primer kehutanan berbasis non-kayu
2	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Produksi HHBK
		Penanaman/pengkayaan pada hutan produksi (ENR)
		Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Reduce Impact Logging (RIL C)
		Penambahan Luasan Kawasan Berizin pada Hutan Produksi Yang Tidak Produktif
		Pembinaan masyarakat desa hutan pemanfaatan hasil hutan non-kayu
		Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & IUPHH)
		Peningkatan Jumlah & Kapasitas Sumber Daya Pengeloaan Hutan Lestari
		Penyusunan Rencana dan Laporan Monev Pengelolaan Hutan Lestari
		Kajian dan Penelitian mengenai pengelolaan hutan lestari
3	Penerapan Teknik SILIN oleh PBPH pemanfaatan kayu yang tumbuh alami	Penyusunan roadmap terkait penerapan teknik SILIN seluas 78.000 Hektar untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2030
		Pembinaan dan pendampingan PBPH sebanyak 257 PBPH untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2030
4	Penerapan Teknil RIL/ RIL C	Penyusunan roadmap terkait penerapan teknik RIL/ RIL C seluas 521.874 Hektar untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2030
		Pembinaan dan pendampingan PBPH sebanyak 257 PBPH untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2030

SUMBER: SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim

Aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari pada areal konsesi di KPHP terdiri dari implementasi RIL-C dan SILIN dengan potensi luas mencapai 11,6 juta hektar (Tabel 31). Potensi luas areal untuk implementasi kegiatan ini lebih besar dari target (lihat Tabel 29). Luas potensi untuk implementasi RIL-C di areal PBPH-HA mencapai 4.380.952 ha yang tersebar di 17 provinsi, 81 kabupaten dan 183 pemegang izin, dan di area PBPH-HT mencapai 192.369 ha yang tersebar di 21 provinsi, 53 kabupaten dan 62 pemegang izin. Untuk kegiatan SILIN, potensi luas di area PBPH-HA mencapai 5.881.305 ha yang tersebar di 19 provinsi, 106 kabupaten dan 263 pemegang izin, di area PBPH-HT tersebar di 25 provinsi, 144 kabupaten dan 272 pemegang izin, dan di area PBPH-RE seluas 6.257 ha yang tersebar di 8 provinsi, 11 kabupaten dan 9 pemegang izin. Sebaran lokasi dan luas area pada aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari selengkapnya disajikan pada Tabel 32.

TABEL 31. Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

No	Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari	Sebaran Lokasi		Jumlah PBPH	Volume Kegiatan (ha)
		Provinsi	Kabupaten		
1	RIL-C pada Area KPHP-HA	17	81	183	4.380.952
2	RIL-C pada Area KPHP-HT	21	53	62	192.369
3	SILIN pada Area KPHP-HA	19	106	263	5.881.305
4	SILIN pada Area KPHP-HT	25	144	272	1.201.355
5	SILIN pada Area KPHP-RE	8	11	9	6.257
	Luas Total Alokasi				11.662.238

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Luasnya potensi area yang tersedia untuk pelaksanaan RIL dan SILIN, dapat disusun skenario pelaksanaannya dengan mempertimbangkan IPL. Skenario implementasi adalah sebagai berikut:

- Pada area dengan IPL 5, 6, 7, 8 dan 9, pelaksanaan aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari dilaksanakan pada tahun 2023-2024.
  - ✓ Khusus area konsesi pada IPL 5, 6, 7, 8 dan 9 yang luasnya diatas 1000 ha, maka proses implementasi dibagi ke dalam 2 tahapan menjadi 60% di tahun 2023 dan 40% di tahun 2024;
  - ✓ Adapun yang luas arealnya diatas 10.000 ha, maka proses implementasinya dibagi ke dalam 4 tahapan menjadi 30% di tahun 2023; 25% di tahun 2024, 25% di tahun 2025, dan 20% di tahun 2026;
- Pada area dengan IPL 4, pelaksanaan aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari dilaksanakan pada tahun 2025.
  - ✓ Khusus area konsesi pada IPL 4 yang luasnya diatas 1000 ha, maka proses implementasi dibagi ke dalam 3 tahapan menjadi 40% di tahun 2025, 35% di tahun 2026, dan 25% di tahun 2027.
  - ✓ Adapun yang luas arealnya diatas 10.000 ha, maka proses implementasinya dibagi ke dalam 4 tahapan menjadi 30% di tahun 2024; 25% di tahun 2025, 25% di tahun 2026, dan 20% di tahun 2027;
- Pada area dengan IPL 3 pelaksanaan aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari dilaksanakan pada tahun 2026;
  - ✓ Khusus area konsesi pada IPL 3 dengan area diatas 1000 ha, proses implementasi dibagi ke dalam 3 tahapan menjadi 40% di tahun 2026, 35% di tahun 2027, dan 25% di tahun 2028.
  - ✓ Adapun yang luas arealnya diatas 10.000 ha, proses implementasinya dibagi menjadi 5 tahapan mulai dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dengan persentase sebesar 20% per tahun dari luas area yang ditargetkan.

- Pada area dengan IPL 2 pelaksanaan aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari dilaksanakan pada tahun 2027;
  - ✓ Khusus area konsesi pada IPL 2 dengan area diatas 1000 ha, maka proses implementasinya dibagi ke dalam 3 tahapan menjadi 40% di tahun 2027, 35% di tahun 2028, dan 25% di tahun 2029;
  - ✓ IPL 2 dengan area diatas 10.000 ha, proses implementasi dibagi ke dalam 5 tahapan mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan persentase sebesar 20% per tahun dari luas area yang ditargetkan;

Pada area dengan IPL 1 pelaksanaan aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari dilaksanakan pada tahun 2028

TABEL 32. Proyeksi Implementasi Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

No	Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari	Tahun Implementasi Rencana Aksi Mitigasi									Total Luas (ha)
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	RIL-C di Area PBPH-HA	-	51.711	199.742	808.552	853.510	919.005	859.760	688.672	-	4.380.952
2	RIL-C di Area PBPH-HT	-	8.323	12.369	31.085	34.256	44.081	37.025	25.229	-	192.369
3	SILIN di Area PBPH-HA	-	384.482	537.622	1.002.355	1.065.675	1.106.856	1.047.265	737.051	-	5.881.305
4	SILIN di Area PBPH-HT	-	165.755	146.887	223.761	225.791	194.379	160.671	84.112	-	1.201.355
5	SILIN di Area PBPH-RE	-	1.871	2.555	1.831	-	-	-	-	-	6.257
	Luas Total Alokasi	-	612.142	899.175	2.067.584	2.179.231	2.264.321	2.104.720	1.535.063	-	11.662.238
	Luas Kumulatif	1.511.317			10.150.921						

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 & Analisis Data, 2022

Merujuk pada Tabel 32, luas pelaksanaan RIL-C dan SILIN sampai 2024 dapat mencapai 1.511.317 ha. Luas yang sudah melaksanakan RIL-C dan SILIN sampai tahun 2019 sudah mencapai 436.000 hektar (lihat Tabel 29). Dengan demikian, untuk mencapai target NDC di tahun 2024 seluas 1.589.000 ha diperlukan tambahan luas sebesar 1.153.000 ha, sedangkan untuk target *Net Sink* sudah tercapai, jadi tidak ada *gap* pada aksi mitigasi ini, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 33.

TABEL 33. Target dan Gap Alokasi Area untuk Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

Items	Aktual 2019	Kebutuhan luas mencapai target NDC 2024	Kebutuhan luas mencapai Target Net Sink 2024
PHL-SILIN (x .000 ha)	167	1.153	977
PHL-RIL C (x .000 ha)	269		
Alokasi Area untuk Aksi Mitigasi sampai 2024 (000 ha)		1.511	1.511
Gap (000 ha)		358	534
		Tercapai	Tercapai

SUMBER: Analisis Data, 2022

Lebih lanjut, dengan mengikuti skenario implementasi di atas, luas pelaksanaan RIL-C dan SILIN pada tahun 2025 sudah mencapai 3.578.901 ha jauh di atas target luas NDC dan Net Sink sampai 2030 yaitu masing-masing seluas 2.669.000 ha dan 1.770.000 ha. Hal ini menunjukkan bahwa potensi RIL-C dan SILIN untuk mendukung pencapaian target net sink pada tahun 2030 sangat besar dan dapat melebihi target net sink. Untuk pencapaian target NDC dan net sink, implementasi RIL C dan SILIN hanya sekitar 23% dari luas potensi. Merujuk kepada kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), besarnya potensi ini membuka peluang yang besar bagi pemegang konsesi dalam mengimplementasikan RIL-C dan SILIN dengan dukungan investasi melalui mekanisme nilai ekonomi karbon (NEK) yaitu perdagangan karbon internasional tanpa mempengaruhi target NDC[1].

B.3.2. Pengelolaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Penyelamatan hutan primer dari degradasi akibat kegiatan penebangan atau pemanenan kayu di area konsesi merupakah salah satu kegiatan penurunan emisi GRK. Di dalam Strategi Jangka Panjang Indonesia untuk menuju *Net Sink* (LTS LCCP), pencegahan degradasi hutan primer menjadi hutan sekunder di area konsesi merupakan salah satu kontribusi penting pihak swasta di area perizinan PBPH untuk pencapaian target *Net Sink*. Batas atas kumulatif degradasi hutan primer dalam skenario *Net Sink* (LTS-LCCP) untuk periode 2013-2024 adalah 1,70 juta ha dan untuk periode 2013-2030 sekitar 2,28 juta hektar (Tabel 34).

Laju degradasi hutan alam di area konsesi selama periode 2013-2019 diketahui sebesar 0,44 juta ha, sehingga sisa kuota degradasi hutan hingga tahun 2030 untuk target *Net Sink* tinggal 1,8 juta ha (0,18 juta ha per tahun). Untuk mencapai target *Net Sink*, laju degradasi hutan tidak boleh lagi mengikuti laju historis. Dengan kata lain, degradasi di area konsesi harus ditekan serendah mungkin melalui upaya perlindungan hutan. Selain itu, area hutan primer yang sudah terdegradasi sebagai hutan sekunder harus sesegera mungkin dipulihkan melalui regenerasi buatan atau melalui SILIN untuk meningkatkan serapan hutan sekunder.

[1] Dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden 98/2021 bahwa penyelenggaraan NEK yang dilakukan dalam negeri dan/atau luar negeri tidak mempengaruhi target NDC.

TABEL 34. Target Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Degradasi untuk NDC-CM1 dan LTS-LCCP

Aksi mitigasi	Aktual (x 1000 ha)	Target NDC (x 1000 ha)			Target Net Sink (x 1000 ha)		
	2013-2019	2013-2024	2013-2030	Sisa kuota	2013-2024	2013 -2030	Sisa kuota
Kuota Degradasi Hutan Alam di Konsesi	441[1]	N.A[2]	N.A[2]	N.A[2]	1.705	2.283	1.841

CATATAN: [1]Diperoleh dari data tutupan lahan KLHK, [2]Dalam dokumen NDC, nilai degradasi menunjukan nilai total keseluruhan nasional, tidak spesifik dalam konsesi

Program Ditjen PHL yang berkaitan dengan usaha perlindungan hutan primer diantaranya melalui pelarangan penebangan hutan primer yang masuk ke dalam arahan lindung (Tabel 35).

TABEL 35. Program dan Kegiatan Ditjen PHL yang Berkaitan dengan Perlindungan Hutan dari Degradasi

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Produksi HHBK
2	Pengembangan sertifikasi PHL	Menerapkan kebijakan pelarangan penebangan hutan primer masuk arahan lindung berdasarkan IJLH
3	Pengembangan sistem insentif bagi pencegahan degradasi hutan primer	Menerapkan kebijakan pelarangan penebangan hutan primer masuk arahan produksi berdasarkan IJLH

SUMBER: SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim

Aksi mitigasi perlindungan hutan primer di area konsesi terdiri dari penurunan degradasi terencana dan tidak terencana di area PBPH-HT seluas 402.225 ha yang tersebar di 24 provinsi dan 73 kabupaten, penurunan degradasi di area PBPH-HA seluas 5.444.315 ha yang tersebar di 19 provinsi dan 90 kabupaten serta penurunan degradasi tidak terencana di area KPHP-Restorasi Ekosistem seluas 84.277 ha yang tersebar di 3 provinsi dan 4 kabupaten. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 36 berikut.

TABEL 36. Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi

No	Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi	Sebaran Lokasi		Jumlah PBPH	Volume Kegiatan (ha)
		Provinsi	Kabupaten		
1	Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-HT	24	73	83	402.225
2	Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-HA	19	90	206	5.444.315
3	Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-RE	3	4	4	84.277
	Luas Total Alokasi				5.930.817

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi MitigasIndonesiaia's FOLU Net Sink 2030

Target *Net Sink* di tahun 2024 seluas 1.705.000 ha dan di tahun 2030 seluas 1.841.000 ha dapat dapat terpenuhi mengingat luasnya alokasi area yang disediakan. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2024, target *Net Sink* seluas 1.705.000 ha dapat terpenuhi berdasarkan luasan kumulatif dari tahun 2022-2024 seluas 1.910.192 ha (Tabel 37), demikian juga hal nya pada tahun 2030. Kelebihan areal yang dialokasikan untuk kegiatan aksi dari target *net sink* pada tahun 2024 mencapai 646.000 ha dan tahun 2030 mencapai 4.667.000 ha (Tabel 38). Ini menunjukkan bahwa potensi untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan karbon domestik maupun internasional juga besar.

TABEL 37. Proyeksi Implementasi Rencana Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi

No	Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi	Tahun Implementasi Rencana Aksi Mitigasi									Total Luas (ha)
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-HT	5.526	149.464	247.235							402.225
2	Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-HA	51.127	687.976	684.587	1.164.677	1.483.052	1.372.896	-	-	-	5.444.315
3	Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-RE	-	84.277	-	-	-	-	-	-	-	84.277
	Luas Total Alokasi	56.653	921.717	931.822	1.164.677	1.483.052	1.372.896	-	-	-	5.930.817
	Luas Kumulatif	1.910.192									

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 & Analisis Data, 2022

TABEL 38. Target dan Gap Alokasi Area untuk Aksi Mitigasi Degradasi Hutan Alam di Konsesi

Items	Aktual 2019	Kebutuhan Luas mencapai Target *Net Sink*	
		2024	2030
Kuota Degradasi Hutan Alam di Konsesi (x .000 ha)	441	1.264	1.841
Alokasi Area untuk Aksi Mitigasi (x .000 ha)		1.910	5.930
Gap (x .000 ha)		646	4.667
Ketercapaian Target		Tercapai	Tercapai

CATATAN: Luas kumulatif sampai dengan tahun 2022-2024 adalah 1.910.192 ha;

SUMBER: Analisis Data, 2022

C. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022 s/d 2030

C.1. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

C.1.4. Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dimaksud, ditetapkan sasaran kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu "Terjaminnya Efektivitas dan Jangkauan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan" Selanjutnya untuk mendukung capaian sasaran kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, telah ditetapkan output dan komponen kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Tabel 39).

Tabel 39. Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan / Output dan Komponen Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun	Persentase	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kelompok Masyarakat / Desa	Penguatan Pencegahan Karhutla/ Patroli Pencegahan Karhutla	Kelompok Masyarakat / Desa
				Penyadartahuan Pencegahan Karhutla/ Kampanye Pencegahan Karhutla	Lokasi
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla / Pembentukan dan Pembinaan MPA	Kelompok Masyarakat / Desa
		Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	Operasi / Hari Operasi	Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla	Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla	Orang
		Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Udar	Operasi / Sortie/ Jam Terbang	Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla	Kegiatan
				Deteksi dan Peringatan Dini	Kegiatan
				Pelaksanaan Pemadaman Darat	Kegiatan
				Pelaksanaan Pemadaman dari Udara / Pemantauan dari Udara	Operasi / Sortie/ Jam Terbang

SUMBER: Renstra Dit PKHL 2020-2024

Pencapaian Indikator Kinerja Program tersebut di atas mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi umum (Tabel 40) yaitu:

1. Peningkatan dan penguatan operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak, melalui penguatan pencegahan karhutla, peningkatan peran serta masyarakat bidang dalkarhutla, penguatan sarpras, peningkatan kecepatan sistem peringatan dini, deteksi dini dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
2. Pemantapan kerjasama pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat masyarakat, tingkat Daerah, Nasional, Regional ASEAN maupun Internasional (bilateral atau multilateral).
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pelaku usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

TABEL 40. Indikator Kinerja Program Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Umum

Indikator Kinerja Program	Arah Kebijakan	Strategi Umum Pencapaian
Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun	Meningkatkan upaya pencegahan, akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dan deteksi dini, serta responsif terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan	1. Peningkatan dan penguatan operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak, melalui penguatan pencegahan karhutla, peningkatan peran serta masyarakat bidang dalkarhutla, penguatan sarpras, peningkatan kecepatan sistem peringatan dini, deteksi dini dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 2. Pemantapan kerjasama pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat masyarakat, tingkat Daerah, Nasional, Regional ASEAN maupun Internasional (bilateral atau multilateral). 3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pelaku usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

SUMBER: Renstra Dit PKHL 2020-2030

Skenario pencapaian IKK pengendalian karhutla didasarkan pada acuan persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan sebesar 10% dari *baseline* tahun 2019 (batas toleransi maksimum luas karhutla) seluas 1.649.258 Ha menjadi 1.484.332 Ha pada tahun 2024 (Tabel 41) dengan skenario pencapaian output pada Tabel 42.

TABEL 41. Matrik Skenario Pencapaian IKK Dalkarhutla tahun 2022 – 2030

No	Satker	Baseline 2019	Target Capaian Kinerja (Penurunan Luas Karhutla) Ha										
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Balai PPIKHL Wil Sumatra	535.787	525.071	514.356	503.640	492.924	482.208	482.208	482.208	482.208	482.208	482.208	482.208
2	Balai PPIKHL Wil Kalimantan	684.599	670.907	657.215	643.523	629.831	616.139	616.139	616.139	616.139	616.139	616.139	616.139
3	Balai PPIKHL Wil Jawa Bali Nusa Tenggara	235.548	230.837	226.126	221.415	216.704	211.993	211.993	211.993	211.993	211.993	211.993	211.993
4	Balai PPIKHL Wil Sulawesi	53.689	52.615	51.541	50.468	49.394	48.320	48.320	48.320	48.320	48.320	48.320	48.320
5	Balai PPIKHL Wil Maluku Papua	139.635	136.842	134.050	131.257	128.464	125.672	125.672	125.672	125.672	125.672	125.672	125.672
	JUMLAH	1.649.258	1.616.273	1.583.288	1.550.303	1.517.317	1.484.332	1.484.332	1.484.332	1.484.332	1.484.332	1.484.332	1.484.332

KETERANGAN : 1. Balai PPIKHL menjadi koordinator pencapaian IKK di wilayah kerjanya

SUMBER: Renstra Dit PKHL 2022-2030

TABEL 42. Matrik Skenario Pencapaian Output Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 202-2030.

No	Output / Balai	Satuan	Target										
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	Pencegahan Karhutla												
	1. Direktorat PKHL	Desa	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	2. Balai PPIKHL Wil Sumatra 3. Balai PPIKHL Wil Kalimantan	Desa Desa	466 454	466 454	486 474	496 484	506 494	506 494	506 494	506 494	506 494	506 494	506 494
	4. Balai PPIKHL Wil Jawa Bali Nusa Tenggara	Desa	48	48	68	78	88	88	88	88	88	88	88
	5. Balai PPIKHL Wil Sulawesi	Desa	116	116	136	146	156	156	156	156	156	156	156
	6. Balai PPIKHL Wil Maluku Papua	Desa	30	30	50	60	70	70	70	70	70	70	70
	JUMLAH I	Desa	1.200	1.200	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

No	Output / Balai	Satuan	Target										
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
II.	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat												
	1. Direktorat PKHL	Hari Ops	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
	2. Balai PPIKHL Wil Sumatra	Hari Ops	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
	3. Balai PPIKHL Wil Kalimantan	Hari Ops	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
	4. Balai PPIKHL Wil Jawa Bali Nusa Tenggara	Hari Ops	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	5. Balai PPIKHL Wil Sulawesi	Hari Ops	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
	6. Balai PPIKHL Wil Maluku Papua	Hari Ops	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	JUMLAH II	Hari Ops	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
III.	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Udara												
	1. Direktorat PKHL	Sortie	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	JUMLAH III	Sortie	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

Beberapa pengertian yang digunakan dalam pencapaian IKK adalah:

a. Kelompok Masyarakat dalam pencapaian target kegiatan pencegahan karhutla yang dimaksud dengan 1 kelompok masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla yang menjangkau sasaran 1 desa rawan karhutla dimana kelompok masyarakat tersebut tinggal.

b. Operasi dalam pencapaian target kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat yang dimaksud dengan 1 operasi adalah 1 hari operasi setiap tim/regu dalam melaksanakan kegiatan pemadaman darat. Sedangkan dalam pencapaian target kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman udara yang dimaksud dengan 1 operasi adalah 1 jam terbang dan atau 1 sortie operasi pemadaman udara. Yang dimaksud sortie adalah waktu yang digunakan untuk satu kali operasi pemadaman udara, dimulai dengan *take off* dan diakhiri dengan *landing* kembali ke pangkalan udara.

Dalam periode waktu 5 tahun, alokasi anggaran untuk setiap kegiatan/output/komponen dalkarhutla dapat dilihat pada Tabel 43.

TABEL 43. Indikasi Kebutuhan Pembiayaan Tahun 2020-2024 (Sumber APBN)

Kegiatan/ Output / Komponen	Pembiayaan Tahunan (x Rp. 1.000)						
	Pelaksanaan 2020	Alokasi 2021	Prakiraan 2022	Prakiraan 2023	Prakiraan 2024	Prakiraan 2025	
Terjaminnya Efektivitas dan jangkauan dalkarhutla	182.892.813	156.428.138	254.000.000	290.000.000	326.000.000	326.000.000	
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	150.502.813	127.139.938	199.000.000	228.000.000	255.000.000	255.000.000	
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	150.502.813	127.139.938	199.000.000	228.000.000	255.000.000	255.000.000	
Penguatan Pencegahan Karhutla	39.997.202	29.500.000	62.000.000	72.000.000	80.000.000	80.000.000	
Penyadartahuan Pencegahan Karhutla	3.872.020	2.375.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla	6.052.250	4.400.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	
Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla	16.227.813	10.339.938	42.000.000	48.000.000	53.000.000	53.000.000	
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla	78.575.000	76.025.000	77.000.000	87.000.000	98.000.000	98.000.000	
Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla.	5.778.528	4.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	
Operasi Bidang Penanganan Bencana	32.390.000	29.288.200	55.000.000	62.000.000	71.000.000	71.000.000	
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	2.275.050	2.800.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	
Deteksi dan Peringatan Dini	2.275.050	2.800.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	
Pelaksanaan Pemadaman Darat	8.114.950	9.900.000	25.000.000	28.000.000	32.000.000	32.000.000	
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Udara	22.000.000	16.588.200	25.000.000	28.000.000	32.000.000	32.000.000	
Pelaksanaan Pemadaman dari Udara / Pemantauan dari Udara	22.000.000	16.588.200	25.000.000	28.000.000	32.000.000	32.000.000	

	Prakiraan 2026	Prakiraan 2027	Prakiraan 2028	Prakiraan 2029	Prakiraan 2030	Total
	326.000.000	326.000.000	326.000.000	326.000.000	326.000.000	3.165.320.951
	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	2.489.642.751
	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	2.489.642.751
	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	691.497.202
	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	75.247.020
	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	88.452.250
	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	487.567.751
	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	1.004.600.000
	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	70.278.528
	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	675.678.200
	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	65.075.050
	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	65.075.050
	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	295.014.950
	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	315.588.200
	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	315.588.200

C.2. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Rencana kegiatan dan indikator kinerja pengelolaan perhutanan sosial dalam mendukung pengelolaan hutan lestari disajikan pada Tabel 44 sebagai berikut:

TABEL 44. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari

NO	KEGIATAN	Indikator kinerja
1	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD,HKm, HTR,KK
		Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm,Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat
2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan
		Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan
		Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum
3	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Penetapan hutan adat dan hutan hak
		Identifikasi dan inventarisasi MHA, calon hutan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional
4	Kemitraan Lingkungan	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial
		Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Untuk lokasi indikatif PS, dilakukan kegiatan percepatan distribusi akses legal perhutanan sosial, pengembangan usaha PS, percepatan pendampingan PS, dan penanganan konflik tenurial. Sementara itu, untuk lokasi PS definitif, dilakukan kegiatan pengembangan usaha PS, percepatan pendampingan PS, dan penanganan konflik tenurial.

Pengukuran dan pemantauan spatial dilakukan menggunakan 3 (tiga) informasi utama FOLU *Net Sink* 2030, yaitu: (1) Peta Indeks Biogeofisik (IBGF) yang terdiri dari IBGF Emisi, IBGF Serapan, dan IBGF Kebakaran Hutan. Peta IBGF ini yang di *overlay* dengan data peta PIAPS untuk memperoleh lokasi prioritas perhutanan sosial yang dapat memberikan kontribusi terhadap penambahan tutupan lahan untuk meningkatkan serapan karbon. (2) Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT). Sebaran indeks JLT yang di *overlay* dengan data peta PIAPS dapat menghasilkan informasi tentang pemanfaatan kawasan perhutanan sosial dengan nilai konseravasi tinggi (HCV). Areal dalam kawasan perhutanan sosial dengan kondisi hutan sudah rusak, tidak produktif dan/atau sudah diokupasi oleh masyarakat dapat tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan. Areal rehabilitasi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya pertanian ataupun perkebunan dapat direhabilitasi dalam bentuk kegiatan rehabilitasi agroforestry. (3) Peta tipologi kelembagaan yang di *overlay* dengan sebaran KPH dan KPS di areal perhutanan sosial. *Overlay* ini menjadi satu strategi pemilihan kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan yang optimal dapat dilakukan berdasarkan pada dua kondisi objektif, yaitu: kapasitas pemerintah dan kekuatan modal sosial.

Pengukuran juga dilakukan melalui partisipatif *ground check*, dengan melakukan verifikasi dan validasi perkembangan pelaksanaan aksi penurunan emisi dari sektor perhutanan sosial. Pengukuran ini dapat melibatkan KPS dan mitra PSKL, meliputi: KPH, Pendamping dan Lembaga Independen. Melalui pengukuran partisipatif *ground check* dapat diperoleh rancangan model pengelolaan perhutanan sosial lestari dengan *mainstreaming* penurunan emisi karbon.

Pemantauan dapat dilakukan dengan melaksanakan monitoring ke lapangan yang bertujuan untuk mengetahui, memotret, dan menginformasikan kondisi faktual, kendala, hambatan serta perkembangan pelaksanaan aksi penurunan emisi dari sektor perhutanan sosial. Monitoring/pemantauan dilakukan untuk:

1) Mengidentifikasi sumber hambatan atau permasalahan sesegera mungkin;
2) Memacu pelaksanaan kegiatan yang terlambat dari rencana yang telah disusun;
3) Melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program pada setiap tahapan;
4) Memberikan rekomendasi tentang kelanjutan kegiatan;
5) Mengidentifikasi kegiatan pelaksanaan kegiatan yang memiliki potensi menjadi kegiatan unggulan;
6) Jika dimungkinkan dan dibutuhkan, hasil monitoring dilengkapi dengan dokumentasi (foto, video, dan/atau rekaman hasil drone) per tahapan kegiatan yang memuat data waktu dan lokasi geografis.

Pelaksanaan pemantauan perkembangan pelaksanaan aksi penurunan emisi dari sektor perhutanan sosial dilaksanakan dengan beberapa periode, yaitu: (1) Periode tahunan dengan mengacu kepada rencana kerja perhutanan sosial; (2) Periode 2 tahunan dan menyelaraskan dengan pelaksanaan pemantauan NDC. Parameter pemantauan meliputi: Peningkatan Kuantitas Tutupan Lahan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Pengurangan jumlah konflik lahan.

Evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan untuk mengevaluasi dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Pelaporan pelaksanaan aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor perhutanan sosial disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon II dan Balai PSKL sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dilaksanakan dengan beberapa periode, yaitu: (1) Periode tahunan dengan mengacu kepada rencana kerja perhutanan sosial; (2) Periode 2 tahunan dan menyelaraskan dengan pelaksanaan pemantauan NDC. Alur pelaporan menggunakan mekanisme data spasial. Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan disajikan pada Tabel 45 berikut:

Tabel 45. Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) pengelolaan perhutanan sosial

Output	Unit pengukuran	Indikator	Baseline (kumulatif sampai tahun 2021)	Target	Frekuensi PEP	Penanggung jawab
Meningkatnya luas kawasan hutan dan unit SK yang memperoleh persetujuan izin Skema HD, HKm, HTR, KK dan HA	Hektar Unit	Luas kawasan hutan dan unit SK dalam Skema HD, HKm, HTR, KK dan HA	3.808.077,64 7.479	2022 = 253.872 ha; 498 unit 2023 = 253.872 ha; 498 unit 2024 = 253.872 ha; 498 unit 2025 = 253.872 ha; 498 unit 2026 = 253.872 ha; 498 unit 2027 = 253.872 ha; 498 unit 2028 = 253.872 ha; 498 unit 2029 = 253.872 ha; 498 unit 2030 = 253.872 ha; 498 unit	5 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik
Meningkatnya luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan izin Skema HA (indikatif)	Hektar	Luas kawasan hutan dalam Skema HA (indikatif)	1.093.864	2022 = 72.924 ha 2023 = 72.924 ha 2024 = 72.924 ha 2025 = 72.924 ha 2026 = 72.924 ha 2027 = 72.924 ha 2028 = 72.924 ha 2029 = 72.924 ha 2030 = 72.924 ha	5 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik
Meningkatnya jumlah unit KUPS Platinum	Unit	Jumlah unit KUPS Platinum	49	2022 = 3 unit 2023 = 3 unit 2024 = 3 unit 2025 = 3 unit 2026 = 3 unit 2027 = 3 unit 2028 = 3 unit 2029 = 3 unit 2030 = 3 unit	1 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik

Output	Unit pengukuran	Indikator	Baseline (kumulatif sampai tahun 2021)	Target	Frekuensi PEP	Penanggung jawab
Meningkatnya jumlah unit KUPS Gold	Unit	Jumlah unit KUPS Gold	535	2022 = 36 unit 2023 = 36 unit 2024 = 36 unit 2025 = 36 unit 2026 = 36 unit 2027 = 36 unit 2028 = 36 unit 2029 = 36 unit 2030 = 36 unit	1 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik
Meningkatnya jumlah unit KUPS Silver	Unit	Jumlah unit KUPS Silver	3.255	2022 = 217 unit 2023 = 217 unit 2024 = 217 unit 2025 = 217 unit 2026 = 217 unit 2027 = 217 unit 2028 = 217 unit 2029 = 217 unit 2030 = 217 unit	1 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik
Meningkatnya jumlah unit KUPS Blue	Unit	Jumlah unit KUPS Blue	4.315	2022 = 288 unit 2023 = 288 unit 2024 = 288 unit 2025 = 288 unit 2026 = 288 unit 2027 = 288 unit 2028 = 288 unit 2029 = 288 unit 2030 = 288 unit	1 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik
Meningkatnya jumlah unit BAEP	Unit	Jumlah BAEP	6.610	2022 = 441 unit 2023 = 441 unit 2024 = 441 unit 2025 = 441 unit 2026 = 441 unit 2027 = 441 unit 2028 = 441 unit 2029 = 441 unit 2030 = 441 unit	1 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik
Meningkatnya jumlah pendamping PS	Orang	Jumlah pendamping PS	1.510	2022 = 1.263 orang 2023 = 1.509 orang 2024 = 1.509 orang 2025 = 1.509 orang 2026 = 1.509 orang 2027 = 1.509 orang 2028 = 1.509 orang 2029 = 1.509 orang 2030 = 1.509 orang	1 tahun sekali	Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama teknik

C.3. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

C.3.1. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rencana kegiatan dan indikator kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi dibagi ke dalam 5 (lima) intervensi, yaitu Intervensi Kebijakan dan Regulasi; Intervensi Teknologi, Intervensi Sumber Daya Manusia, Intervensi Kemitraan dan Intervensi Anggaran.

C.3.1.1. Intervensi Kebijakan dan Regulasi

Rencana kegiatan pada intervensi kebijakan dan regulasi, terdiri dari 3 kegiatan utama dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH.
    1.1. Penyusunan manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH
    1.2. Penyusunan roadmap multiusaha
    1.3. Penyusunan NSPK KPH Efektif
    1.4. Penyusunan roadmap HTE
    1.5. Penyusunan NSPK NEK bidang PHL

2. Implementasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH
    2.1. Sosialisasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH
    2.2. Sosialisasi roadmap multiusaha
    2.3. Sosialisasi roadmap HTE
    2.4. Sosialisasi NSPK KPH Efektif
    2.5. Penyusunan kriteria indikator pilot project PBPH FOLU *Net Sink*
    2.6. Penyusunan kriteria indikator pilot project KPH FOLU *Net Sink*
    2.7. Penyusunan Model Pengukuran Batas Atas Emisi GRK dan Kuota Emisi PBPH
3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan
    3.1. Penyusunan manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH
    3.2. Sosialisasi manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH

Rencana kegiatan dan indikator kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi kebijakan dan regulasi selengkapnya disajikan pada Tabel 46.

TABEL 46. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Kebijakan dan Regulasi

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
A.	**Kebijakan dan Regulasi**				
1	**Penyusunan manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH**				
	1.1. Penyusunan manual/ guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (bibit/benih unggul, multiusaha, SK FOLU menjadi diperhatikan dalam SK PBPH)	1. Tersusunnya manual/guidelines teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (dokumen)	
				Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi SILIN di area PBPH (dokumen)	
				Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (dokumen)	
				Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (dokumen)	
	1.2. Penyusunan roadmap multiusaha	Tersusunnya roadmap multiusaha	2. Tersusunnya roadmap multiusaha	Tersusunnya roadmap multiusaha (dokumen)	
	1.3. Penyusunan NSPK KPH Efektif	Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU	3. Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU	Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU (dokumen)	
	1.4. Penyusunan roadmap HTE	Tersusunnya roadmap HTE	4. Tersusunnya roadmap HTE	Tersusunnya roadmap HTE (dokumen)	
	1.5. Penyusunan NSPK NEK bidang PHL	Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL	5. Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL	Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL (dokumen)	
2	**Implementasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH**				
	2.1. Sosialisasi manual/ guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersosialisasikannya manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	6. Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik RIL	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik RIL (unit manajemen)	
			7. Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan SILIN	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan SILIN (unit manajemen)	
			10. Meningkatnya riap/ produktivitas tegakan	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang melakukan pembangunan hutan tanaman (unit manajemen)	

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	1								
	196	-	24	48	72	96	121	146	171	196
	435	-	54	108	162	216	270	325	380	435
	240	-	30	60	90	120	150	180	210	240

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
				Bertambahnya luas hutan tanaman (ribu ha)	
			12. Penggunaan benih/bibit unggul oleh PBPH sesuai kajian pakar dalam manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menggunakan bibit bersertifikat (unit manajemen)	
		Terciptanya kesepahaman para pihak dalam metode, teknik RIL, pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan PBPH	Terciptanya kesepahaman para pihak dalam metode, teknik RIL, pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan PBPH	Meningkatnya jumlah PBPH yang mengintegrasikan RKUPH dengan kegiatan FOLU *Net Sink* 2030 (unit manajemen)	
				Meningkatnya jumlah PBPH yang melaporkan jadwal/rencana kerja implementasi aksi mitigasi di area konsesinya (unit manajemen)	
	2.2. Sosialisasi roadmap multiusaha	Tersosialisasikannya roadmap multiusaha	8. Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan multiusaha	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan multiusaha (unit manajemen)	
			9. Terbitnya investasi baru PBPH multiusaha	Terbitnya investasi baru PBPH multiusaha (jumlah izin baru)	
	2.3. Sosialisasi roadmap HTE	Tersosialisasikannya roadmap HTE	Tersosialisasikannya roadmap HTE	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH-HT yang menaman hutan tanaman dengan jenis tanaman energi (unit manajemen)	
	2.4. Sosialisasi NSPK KPH Efektif	Tersosialisasikannya NSPK KPH Efektif	13. Meningkatnya jumlah KPH efektif	Tersusunnya dokumen NSPK KPH Efektif (dokumen)	
				Terlaksananya kegiatan penilaian KPH Efektif (kegiatan)	
				Meningkatnya jumlah KPH efektif (unit KPH)	
	2.5. Penyusunan kriteria indikator pilot project PBPH FOLU *Net Sink*	Tersusunnya kriteria indikator pilot project PBPH FOLU *Net Sink*,	14. Tersusunnya kriteria indikator pilot project PBPH FOLU *Net Sink*	-	
		Terbentuknya pilot project PBPH FOLU *Net Sink*	15. Terbentuknya pilot project PBPH FOLU *Net Sink*	-	
	2.6. Penyusunan kriteria indikator pilot project KPH FOLU *Net Sink*	Tersusunnya kriteria indikator pilot project KPH FOLU *Net Sink*,	16. Tersusunnya kriteria indikator pilot project KPH FOLU *Net Sink*	-	
		Terbentuknya pilot project KPH FOLU *Net Sink*	17. Terbentuknya pilot project KPH FOLU *Net Sink*	-	
	2.7. Penyusunan Model Pengukuran Batas Atas Emisi GRK dan Kuota Emisi PBPH	Tersusunnya Model pengukuran Batas Atas Emisi GRK dan Kuota Emisi PBPH	Tersusunnya Model pengukuran Batas Atas Emisi GRK dan Kuota Emisi PBPH	-	

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	479	-	59	119	179	239	299	359	419	479
	241	-	31	61	91	121	151	181	211	241
	439	-	54	109	164	219	274	329	384	439
	351	-	43	87	131	175	219	263	307	351
	220	-	27	54	81	108	136	164	192	220
	200	-	25	50	75	100	125	150	175	200
	241		31	61	91	121	151	181	211	241
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	150	-	18	36	54	72	91	110	130	150
	60	-	7	14	21	28	36	44	52	60
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
3	**Pelaporan pelaksanaan kegiatan**				
	3.1. Penyusunan manual/ guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (bibit/benih ungggul)	18. Tersusunnya manual/ guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (dokumen)	
				Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi SILIN (dokumen)	
				Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (dokumen)	
				Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (dokumen)	
	3.2. Sosialisasi manual/ guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersosialisasikannya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersosialisasikannya manual/ guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Persentase PBPH yang berkomitmen untuk mengimplementasikan aksi mitigasi dalam FOLU *Net Sink* 2030 di area konsesinya (% unit manajemen)	
		Terciptanya kesepahaman para pihak dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Terciptanya kesepahaman para pihak dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Meningkatnya jumlah PBPH yang melaporkan kegiatan aksi mitigasi dalam FOLU *Net Sink* 2030 di area konsesinya (unit manajemen)	

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	10	20	30	40	50	60	70	80
	439	-	54	109	164	219	274	329	384	439

C.3.1.2. Intervensi Teknologi

Rencana kegiatan pada intervensi teknologi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT (*Information and Communication Technology*)
    1.1. Pembangunan/ pengembangan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT
    1.2. Penyusunan manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT
    1.3. Sosialisasi manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT
2. Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT
    2.1. Penyusunan hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH

Rencana kegiatan dan indikator kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi teknologi selengkapnya disajikan pada Tabel 47.

TABEL 47. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Teknologi

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output
B.	**TEKNOLOGI**		
4	**Penyiapan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT**		
	4.1. Pembangunan/ pengembangan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Terbangunnya/ terkembangkannya sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	19. Tersusunnya manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT

Indikator Kinerja	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi RIL-C (dokumen)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi SILIN (dokumen)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (dokumen)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi (dokumen)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output
		Tercatatnya dan terintegrasinya data hasil implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH dalam SI PHL	20. Tercatatnya dan terintegrasinya data hasil implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH dalam SI PHL
		Tercatatnya dan terintegrasinya data hasil implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH dalam Satu Data KLHK	21. Tercatatnya dan terintegrasinya data hasil implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH dalam Satu Data KLHK
	4.2. Penyusunan manual/ guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Tersusunnya manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT (penggunaan HRSI dalam monitoring carbon, penutupan tajuk)	11. Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH
	4.3. Sosialisasi manual/ guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Tersosialisasikannya manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Tersosialisasikannya manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT
5	**Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT**		

Indikator Kinerja	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH yang melakukan aksi mitigasi RIL-C pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	251 [PBPH-HA]	-	31	62	93	124	155	187	219	251
	21 [PBPH-HT]	-	2	4	6	9	12	15	18	21
Meningkatnya tutupan tajuk di areal PBPH yang menerapkan SILIN pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	922 [PBPH-HA]	-	116	232	347	462	577	692	807	922
	313 [PBPH-HT]	-	40	79	118	157	196	235	274	313
	4 [PBPH-RE]	-	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH-HT yang melakukan aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	479	-	59	119	179	239	299	359	419	479
Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH yang melakukan aksi mitigasi Degradasi Konsesi pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	402 [PBPH-HT]	-	52	102	152	202	252	302	352	402
	1.424 [PBPH-HA]	-	178	356	534	712	890	1.068	1.246	1.424
	84 [PBPH-RE]	-	12	24	34	44	54	64	74	84
Tersosialisasikannya manual/guidelines dari masing-masing upaya aksi mitigasi pada PBPH (dokumen) 1. Manual RIL-C 2. Manual SILIN 3. Manual Pembangunan Hutan Tanaman 4. Manual Degradasi Konsesi	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Tersosialisasikannya rencana jadwal monitoring dan evaluasi dari masing-masing upaya aksi mitigasi pada PBPH (dokumen skala provinsi) 1. Penerapan RIL-C 2. Penerapan SILIN 3. Pembangunan Hutan Tanaman 4. Degradasi Konsei	21 provinsi untuk RIL-C	-	3	6	9	12	15	17	19	21
	25 provinsi untuk SILIN	-	4	7	10	13	16	19	22	25
	25 provinsi untuk PHT	-	4	7	10	13	16	19	22	25
	24 provinsi untuk Degradasi Konsesi	-	3	6	9	12	15	18	21	24
Tersedianya format baku pencatatan monitoring dan evaluasi berkala untuk pemegang izin yang areanya menjadi lokasi target *Net Sink* 2030 (dokumen)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	
	5.1. Penyusunan hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	
		Tersusunnya hasil kajian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (perbandingan data sebelum dan sesudah penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH)	22. Tersusunnya hasil kajian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (perbandingan data sebelum dan sesudah penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH)	

Indikator Kinerja	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH menurut regional (dokumen)	5	-	2	3	4	5	-	-	-	-
Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH menurut regional (dokumen)	5 dokumen PBPH-HA	-	2	3	4	5	-	-	-	-
	5 dokumen PBPH-HT	-	2	3	4	5	-	-	-	-
	2 dokumen PBPH-RE	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT menurut regional (dokumen)	5	-	2	3	4	5	-	-	-	-
Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH menurut regional (dokumen)	5 dokumen PBPH-HA	-	2	3	4	5	-	-	-	-
	5 dokumen PBPH-HT	-	2	3	4	5	-	-	-	-
	2 dokumen PBPH-RE	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (%)	30% di PBPH-HA	-	95	90	80	70	60	50	40	30
	20% di PBPH-HT	-	90	80	70	60	50	40	30	20
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH (%)	30% di PBPH-HA	-	95	90	80	70	60	50	40	30
	20% di PBPH-HT	-	90	80	70	60	50	40	30	20
	10% di PBPH-RE		60	50	40	30	20	10	-	-
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (%)	20	-	60	50	40	30	20	-	-	-
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (%)	15% di PBPH-HA	-	50	45	40	35	30	25	20	15
	10% di PBPH-HT	-	60	50	40	30	20	10	-	-
	5% di PBPH-RE	-	30	25	20	15	10	5	-	-

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output
		Terbangunnya model tren capaian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berdasarkan historical data hasil capaian	23. Terbangunnya model tren capaian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berdasarkan historical data hasil capaian

SUMBER: Analisis Tim Penyusun, 2022

C.3.1.3. Intervensi Sumber Daya Manusia

Rencana kegiatan pada intervensi sumber daya manusia, terdiri dari 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pendampingan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM (melibatkan pakar, akademisi) dengan sub kegiatan sebagai berikut

1. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi
2. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030
3. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT
4. Pendampingan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pelaksana Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi
5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030
6. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT

Rencana kegiatan dan indikator kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi SDM selengkapnya disajikan pada Tabel 48.

Indikator Kinerja	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (%)	30% di PBPH-HA	-	95	90	80	70	60	50	40	30
	20% di PBPH-HT	-	90	80	70	60	50	40	30	20
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi SILIN di area PBPH (%)	30% di PBPH-HA	-	95	90	80	70	60	50	40	30
	20% di PBPH-HT	-	90	80	70	60	50	40	30	20
	10% di PBPH-RE	-	80	70	60	50	40	30	20	10
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (%)	20	-	90	80	70	60	50	40	30	20
Teridentifikasinya *gap* (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (%)	15% di PBPH-HA	-	50	45	40	35	30	25	20	15
	10% di PBPH-HT	-	60	50	40	30	20	10	-	-
	5% di PBPH-RE	-	30	25	20	15	10	5	-	-

TABEL 48. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi SDM

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
C.	**SDM**				
6	**Pendampingan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM (melibatkan pakar, akademisi)**				
	6.1. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan pada PBPH yang mengimplementasikan multiusaha kehutanan (orang)	
				Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan pada LMDH atau KTH yang mengimplementasikan multiusaha kehutanan (orang)	
				Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan pada LMDH atau KTH yang mengimplementasikan multiusaha kehutanan (orang)	
	6.2. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Tersedianya SDM KPH yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam penyusunan integrasi RPHJP dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (orang)	
	6.3. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C di area PBPH-HA dan PBPH-HT (orang)	

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2928	2029	2030
	273	-	35	69	103	137	171	205	239	273
	64	-	8	16	24	32	40	48	56	64
	64	-	8	16	24	32	40	48	56	64
	160	-	20	40	60	80	100	120	140	160
	92 orang di PBPH-HA	-	12	24	36	48	60	72	82	92
	31 orang di PBPH-HT	-	4	8	12	16	20	24	28	31

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
				Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE (orang)	
				Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT (orang)	
				Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE (orang)	
	6.4. Pendampingan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pelaksana Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	Terlaksananya multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi sesuai manual/guidelines untuk mendukung target FOLU *Net Sink* 2030	Pelaksanaan Bimbingan teknis	Terlaksananya kegiatan pendampingan terhadap PBPH, LMDH, KTH dan atau pelaku usaha pelaksana multiusaha dan teknik pengelolaan produksi (kali/tahun)	
				Meningkatnya jumlah PBPH, LMDH, KTH dan atau pelaku usaha yang melaksanakan multiusaha yang sesuai manual/guidelines untuk mendukung target FOLU *Net Sink* 2030 (unit manajemen)	
	6.5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan dokumen RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	24. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM pelaksana Renops FOLU	Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan integrasi RPHJP dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (kali/tahun)	

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2928	2029	2030
	132 orang di PBPH-HA	-	16	32	48	64	81	98	115	132
	136 orang di PBPH-HT	-	17	34	51	68	85	102	119	136
	5 orang di PBPH-RE	-	1	2	3	4	5	-	-	-
	151	-	20	40	60	79	97	115	133	151
	103 orang di PBPH-HA	-	15	28	41	54	67	80	93	106
	42 orang di PBPH-HT	-	6	12	17	22	27	32	37	42
	2 orang di PBPH-RE	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	6	-	2	4	6	-	-	-	-	-
	150	-	20	40	59	78	96	114	132	150
	6	-	2	4	6	-	-	-	-	-

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
		Tersusunnya dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030	25. Tersusunnya dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030	Tersusunnya dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030 (jumlah dokumen)	
				Jumlah dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang disahkan (jumlah dokumen)	
	6.6. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Termonitornya, tercatatnya, serta terevaluasinya implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT sesuai dengan manual/ guidelines (termasuk multiusaha)	Pelaksanaan Bimbingan teknis	Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C (kali/tahun)	
				Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN (kali/tahun)	
				Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (kali/tahun)	
				Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitorin g, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi (kali/tahun)	

SUMBER: Analisis Tim Penyusun, 2022

C.3.1.4. Intervensi Kemitraan

Rencana kegiatan pada intervensi kemitraan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan dan Implementasi Program dan Strategi Komunikasi Publik
   1.1. Penyusunan Program dan Strategi Komunikasi Publik
2. Penyiapan dan Pengembangan Forum Komunikasi
3. Penyiapan dan Pengembangan kemitraan para pihak
   3.1. Identifikasi mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030
   3.2. Pembahasan kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030
4. Koordinasi dan kolaborasi antar sektor terkait

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2928	2029	2030
	80	-	10	20	30	40	50	60	70	80
	60	-	10	20	30	40	50	60	-	-
	6	-	2	4	6	-	-	-	-	-
	6	-	2	4	6	-	-	-	-	-
	6	-	2	4	6	-	-	-	-	-
	6	-	2	4	6	-	-	-	-	-

4.1. Identifikasi sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030

4.2. Koordinasi dan kolaborasi sektor terkait dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030

Rencana kegiatan dan indikator kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi kemitraan selengkapnya disajikan pada Tabel 49.

C.3.1.5. Intervensi Anggaran

Rencana kegiatan pada intervensi anggaran, terdiri dari 2 kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan
2. Penyiapan bahan konsep kelembagaan pendanaan kegiatan

Rencana kegiatan dan indikator kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi anggaran selengkapnya disajikan pada Tabel 50.

TABEL 49. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Kemitraan

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
D.	**Kemitraan**				
7	Penyiapan dan Implementasi Program dan Strategi Komunikasi Publik				
	7.1. Penyusunan Program dan Strategi Komunikasi Publik	Tersusunnya Program dan Strategi Komunikasi Publik	Dokumen Program dan Strategi Komunikasi Publik	Tersusunnya dokumen perencanaan terkait strategi, program dan kegiatan Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030 (jumlah dokumen)	
				Tersusunnya proposal rencana kemitraan untuk pihak ke-3 (jumlah dokumen)	
8	Penyiapan dan Pengembangan Forum Komunikasi	Terbentuknya Forum Komunikasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	26. Terbentuknya Forum Komunikasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terbentuknya Forum Komunikasi Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030 (ada/tidak ada)	
			28. Terpublikasikannya dokumen, implementasi, capaian target Renops FOLU *Net Sink* 2030 kepada publik	Tersedianya website informasi Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang dapat diakses publik (tersedia/tidak tersedia)	
				Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang diunggah dalam webite (jumlah dokumen)	
				Jumlah jurnal ilmiah terkait capaian implementasi kegiatan Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang diunggah dalam webite (jumlah dokumen)	

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	1								
	10		2	4	5	6	7	8	9	10
	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	105	-	14	27	40	53	66	79	92	105

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
9	Penyiapan dan Pengembangan kemitraan para pihak				
	9.1. Identifikasi mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030	Teridentifikasinya mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030	Daftar mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030	Teridentifikasinya mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030 (unit lembaga)	
	9.2. Pembahasan kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terbentuknya kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	27. Terbentuknya kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terjalinnya kesepakatan kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 melalui perjanjian kerjasama usaha/ kemitraan (jumlah perjanjian kerjasama/ kemitraan)	
				Teridentifikasinya pembagian peran kemitraan pada setiap kegiatan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen pembagian peran kemitraan)	
10	Koordinasi dan kolaborasi antar sektor terkait				
	10.1. Identifikasi sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030	Teridentifikasinya sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030	Daftar sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030	Teridentifikasinya sektor terkait menurut tingkat pengaruh dan kepentingannya pada masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (jumlah sektor yang berperan aktif di tingkat Kementerian dan provinsi)	
				Teridentifikasinya peran stakeholder terkait terhadap masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen pembagian peran stakeholder)	
	10.2. Koordinasi dan kolaborasi sektor terkait dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terbangunnya koordinasi dan kolaborasi sektor terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Dokumen rencana koordinasi dan kolaborasi sektor terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Tersusunnya rencana koordinasi sektor terkait untuk implementasi masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen rencana)	
				Tersusunnya rencana kolaborasi sektor terkait untuk implementasi masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen rencana)	

SUMBER : Analisis Tim Penyusun, 2022

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	225	-	30	60	90	119	147	174	200	225
	10	-	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	34 provinsi	-	34	34	34	34	34	34	34	34
	4 sektor (kehutanan, lingkungan hidup, energi dan pertanian)	-	4							
	1	1								
	1	1								
	1	1								

TABEL 50. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Anggaran

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Kinerja	
E.	**Anggaran**				
11	Penyusunan dan Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan	Tersusunnya rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030	Dokumen rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030	Tersusunnya rencana kerja Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen)	
				Tersusunnya rencana anggaran untuk implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen)	
				Tersedianya jumlah anggaran untuk implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030 melalui APBN, APBD Provinsi, Pihak ke-3 dan alternatif pendanaan lainnya (dokumen)	
12	Penyiapan bahan konsep kelembagaan pendanaan kegiatan	Terkonsepnya kelembagaan pendanaan implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030	Dokumen kelembagaan pendanaan implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030	Tersusunnya mekanisme kelembagaan pendanaan kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen)	

SUMBER: Analisis Tim Penyusun, 202

C.3.2. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi dibagi ke dalam 5 intervensi, yaitu Intervensi Kebijakan dan Regulasi; Intervensi Teknologi, Intervensi Sumber Daya Manusia, Intervensi Kemitraan dan Intervensi Anggaran.

C.3.2.1. Intervensi Kebijakan dan Regulasi

Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi kebijakan dan regulasi selengkapnya disajikan pada Tabel 51.

C.3.2.2. Intervensi Teknologi

Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi teknologi selengkapnya disajikan pada Tabel 52.

C.3.2.3. Intervensi Sumber Daya Manusia

Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi sumber daya manusia selengkapnya disajikan pada Tabel 53.

	Target	Tahun								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	1								
	1	1								
	1	1								
	1	1								

C.3.2.4. Intervensi Kemitraan

Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi kemitraan selengkapnya disajikan pada Tabel 54.

C.3.2.5. Intervensi Anggaran

Rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja multi usaha dan teknik pengelolaan produksi pada intervensi anggaran selengkapnya disajikan pada Tabel 55.

TABEL 51. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Kebijakan dan Regulasi

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan			Pemantauan		
		Output	Indikator Kinerja	Aspek yang Dipantau	Waktu	
A.	**Kebijakan dan Regulasi**					
1	Penyusunan manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH					
	Rincian Kegiatan: 1.1. Penyusunan manual/ guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan: Tersusunnya manual/ guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (bibit/ benih ungggul, multiusaha, SK FOLU menjadi diperhatikan dalam SK PBPH)	1. Tersusunnya manual/guidelines teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (dokumen)	• Latar belakang RIL-C • Tujuan penerapan teknik RIL-C • Ruang Lingkup RIL-C • Norma dan standar penerapan RIL-C • Dasar hukum dan regulasi • Prosedur dan tahapan kegiatan RIL-C • Kriteria keberhasilan RIL-C	2022	
			Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi SILIN di area PBPH (dokumen)	• Latar belakang SILIN • Tujuan penerapan teknik SILIN • Ruang Lingkup SILIN • Norma dan standar penerapan SILIN • Dasar hukum dan regulasi • Prosedur dan tahapan kegiatan SILIN • Kriteria keberhasilan SILIN	2022	

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Kelengkapan substansi dokumen manual penerapan teknik RIL-C • Kesesuaian substansi dokumen manual penerapan teknik RIL-C dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual penerapan teknik RIL-C di area PBPH • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi RIL-C di area PBPH	2023
	• Kelengkapan substansi dokumen manual penerapan teknik SILIN • Kesesuaian substansi dokumen manual penerapan teknik SILIN dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual penerapan teknik SILIN di area PBPH • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi SILIN di area PBPH	2023

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
			Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT (dokumen)	• Latar belakang Pembangunan Hutan Tanaman • Tujuan Pembangunan Hutan Tanaman • Ruang Lingkup Pembangunan Hutan Tanaman • Norma dan standar penerapan Pembangunan Hutan Tanaman • Dasar hukum dan regulasi • Prosedur dan tahapan kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman • Kriteria keberhasilan Pembangunan Hutan Tanaman	2022	
			Tersusunnya manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (dokumen)	• Latar belakang Degradasi Konsesi • Tujuan aksi mitigasi Degradasi Konsesi • Ruang Lingkup Degradasi Konsesi • Norma dan standar Degradasi Konsesi • Dasar hukum dan regulasi • Prosedur dan tahapan kegiatan Degradasi Konsesi • Kriteria keberhasilan Degradasi Konsesi	2022	
	Rincian Kegiatan: 1.2. Penyusunan roadmap multiusaha Tujuan: Tersusunnya roadmap multiusaha	2. Tersusunnya roadmap multiusaha	Tersusunnya roadmap multiusaha (dokumen)	• Latar belakang roadmap multiusaha • Tujuan penyusunan roadmap multiusaha • Ruang lingkup roadmap multiusaha • Dasar hukum dan regulasi • Tahapan pelaksanaan roadmap multiusaha • Arahan kebijakan dan strategi roadmap multiusaha	2022	
	Rincian Kegiatan: 1.3. Penyusunan NSPK KPH Efektif Tujuan: Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU	3. Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU	Tersusunnya NSPK KPH Efektif yang sejalan dengan Renops FOLU (dokumen)	• Latar belakang penyusunan NSPK KPH Efektif • Tujuan penyusunan NSPK KPH Efektif • Ruang lingkup NSPK KPH Efektif • Dasar hukum dan regulasi • Standar penilaian KPH Efektif • Kriteria KPH Efektif	2022	

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Kelengkapan substansi dokumen manual Pembangunan Hutan Tanaman • Kesesuaian substansi dokumen manual Pembangunan Hutan Tanaman dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH	2023
	• Kelengkapan substansi manual Degradasi Konsesi • Kesesuaian substansi manual Degradasi Konsesi dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual Degradasi Konsesi di area PBPH • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan manual/guidelines implementasi rencana aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH	2023
	• Kelengkapan substansi dokumen roadmap multiusaha • Kesesuaian substansi dokumen roadmap multiusaha dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen roadmap multiusaha • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan roadmap multiusaha	2023
	• Kelengkapan substansi dokumen NSPK KPH Efektif • Kesesuaian substansi dokumen NSPK KPH Efektif dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen NSPK KPH Efektif • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan dokumen NSPK KPH Efektif	2023

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan			Pemantauan		
		Output	Indikator Kinerja	Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 1.4. Penyusunan roadmap HTE Tujuan: Tersusunnya roadmap HTE	4. Tersusunnya roadmap HTE	Tersusunnya roadmap HTE (dokumen)	• Latar belakang roadmap multiusaha • Tujuan penyusunan roadmap multiusaha • Ruang lingkup roadmap multiusaha • Dasar hukum dan regulasi • Tahapan pelaksanaan roadmap multiusaha • Arahan kebijakan dan strategi roadmap multiusaha	2023	
	Rincian Kegiatan: 1.5. Penyusunan NSPK NEK bidang PHL Tujuan: Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL	5. Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL	Tersusunnya NSPK NEK bidang PHL (dokumen)	• Latar belakang NSPK NEK bidang PHL • Tujuan penyusunan NSPK NEK bidang PHL • Ruang lingkup NEK bidang PHL • Dasar hukum dan regulasi • Tahapan pelaksanaan NEK bidang PHL • Standar NEK bidang PHL • Kriteria NEK bidang PHL	2022	
2	Implementasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH					
	Rincian Kegiatan: 2.1. Sosialisasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan: Tersosialisasikannya manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	6. Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik RIL	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik RIL (unit manajemen)	• Metode sosialisasi • Materi sosialisasi • Stakeholder yang diundang dalam kegiatan sosialisasi • Jumlah PBPH yang berpartisipasi dalam sosialisasi penerapan teknik RIL dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	2023	
		7. Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan SILIN	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan SILIN (unit manajemen)			

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Kelengkapan substansi dokumen roadmap HTE • Kesesuaian substansi dokumen roadmap HTE dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen roadmap HTE • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan dokumen roadmap HTE	2023
	• Kelengkapan substansi dokumen NSPK NEK bidang PHL • Kesesuaian substansi dokumen NSPK NEK bidang PHL dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen NSPK NEK bidang PHL • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan NSPK NEK bidang PHL	2023
	• Peningkatan jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik RIL. • Peningkatan jumlah pemegang PBPH yang menerapkan teknik SILIN. • Peningkatan produktivitas/riap tegakan • Peningkatan jumlah pemegang PBPH yang menerapkan Pembangunan hutan tanaman.	2024	• Tata waktu rencana dan implementasi kegiatan sosialisasi • Jumlah PBPH yang berpartisipasi dalam sosialisasi penerapan teknik RIL dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH • Jumlah PBPH yang mengintegrasikan RKUPH dengan kegiatan FOLU *Net Sink* 2030 • jumlah PBPH yang melaporkan jadwal/rencana kerja implementasi aksi mitigasi di area konsesinya • Penggunaan anggaran kegiatan sosialisasi manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	2024

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan			Pemantauan		
		Output	Indikator Kinerja	Aspek yang Dipantau	Waktu	
		10. Meningkatnya riap/produktivitas tegakan	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang melakukan pembangunan hutan tanaman (unit manajemen)			
			Bertambahnya luas hutan tanaman (ribu ha)			
		12. Penggunaan benih/ bibit unggul oleh PBPH sesuai kajian pakar dalam manual/guidelines penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menggunakan bibit bersertifikat (unit manajemen)	• Jenis bibit unggul yang ditanam • Asal bibit unggul yang ditanam • Umur produksi bibit • Sertifikat bibit unggul	2023	
	Tujuan: Terciptanya kesepahaman para pihak dalam metode, teknik RIL, pengelolaan hutan lestari dan pengelolaan PBPH	Kesepahaman PBPH terhadap penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Meningkatnya jumlah PBPH yang mengintegrasikan RKUPH dengan kegiatan FOLU *Net Sink* 2030 (unit manajemen)	• Metode sosialisasi • Materi sosialisasi • Stakeholder yang diundang dalam kegiatan sosialisasi • Jumlah PBPH yang berpartisipasi dalam sosialisasi penerapan teknik RIL dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH • Jumlah PBPH yang mengintegrasikan RKUPH dengan kegiatan FOLU *Net Sink* 2030 • Jumlah PBPH yang berkomitmen memberikan melaporkan jadwal/ rencana kerja implementasi aksi mitigasi di area konsesinya	2023	
			Meningkatnya jumlah PBPH yang melaporkan jadwal/ rencana kerja implementasi aksi mitigasi di area konsesinya (unit manajemen)			

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Peningkatan persentase PBPH yang sudah menggunakan bibit unggul bersertifikat.	2024		2024
	• Jumlah PBPH yang memberikan melaporkan jadwal/rencana kerja implementasi aksi mitigasi di area konsesinya • Persentase PBPH yang memberikan melaporkan jadwal/rencana kerja implementasi aksi mitigasi di area konsesinya	2024		2023 2024

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan			Pemantauan		
		Output	Indikator Kinerja	Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 2.2. Sosialisasi roadmap multiusaha Tujuan: Tersosialisasikannya roadmap multiusaha	8. Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan multiusaha	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH yang menerapkan multiusaha (unit manajemen)	• Metode sosialisasi • Materi sosialisasi • Stakeholder yang diundang dalam kegiatan sosialisasi • Jumlah PBPH yang berpartisipasi dalam sosialisasi road map multiusaha	2023	
		9. Terbitnya investasi baru PBPH multiusaha	Terbitnya investasi baru PBPH multiusaha (jumlah izin baru)	• Metode sosialisasi • Materi sosialisasi • Stakeholder yang diundang dalam kegiatan sosialisasi • Jumlah PBPH baru yang berinvestasi dalam multiusaha	2023	
	Rincian Kegiatan: 2.3. Sosialisasi roadmap HTE Tujuan: Tersosialisasikannya roadmap HTE	Kegiatan Sosialisasi	Meningkatnya jumlah pemegang PBPH-HT yang menaman hutan tanaman dengan jenis tanaman energi (unit manajemen)	• Metode sosialisasi • Materi sosialisasi • Stakeholder yang diundang dalam kegiatan sosialisasi • Jumlah PBPH-HT yang berpartisipasi dalam sosialisasi road map HTE	2023	
	Rincian Kegiatan: 2.4. Sosialisasi NSPK KPH Efektif Tujuan: Tersosialisasikannya NSPK KPH Efektif	13. Meningkatnya jumlah KPH efektif	Tersusunnya dokumen NSPK KPH Efektif (dokumen)	• Ruang lingkup dan substansi NSPK KPH Efektif	2023	
			Terlaksananya kegiatan penilaian KPH Efektif (kegiatan)	• Indikator penilaian KPH Efektif • Pelaksanaan kegiatan penilaian • Metode penilaian	2023	
			Meningkatnya jumlah KPH efektif (unit KPH)	• Jumlah unit KPH yang dinilai • Jumlah unit KPH yang ditargetkan efektif • Jumlah unit KPH yang berstatus Efektif • Pelaksanaan kegiatan penilaian • Metode penilaian	2023	
3	Pelaporan pelaksanaan kegiatan					

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Data awal PBPH yang sudah menerapkan multiusaha • Persentase peningkatan PBPH yang melaksanakan kegiatan multiusaha • Persentase PBPH yang menerapkan multiusaha	2024	• Persentase peningkatan PBPH yang menerapkan multiusaha • Persentase peningkatan PBPH baru yang berinvestasi dalam multiusaha • Penggunaan anggaran kegiatan sosialisasi roadmap multiusaha	2024
	• Data awal PBPH yang sudah menerapkan multiusaha • Jumlah PBPH baru yang menerapkan multiusaha • Persentase PBPH baru yang menerapkan multiusaha	2024		2024
	• Data awal PBPH-HT yang sudah melakukan penanaman tanaman energi • Data jumlah PBPH-HT yang menanam tanaman energi • Persentase peningkatan PBPH-HT yang menanam tanaman energi • Persentase luas tanaman baru di area PBPH-HT dengan jenis tanaman energi	2024	• Persentase peningkatan PBPH-HT yang menanam tanaman energi • Penggunaan anggaran sosialisasi	2024
	• Kesesuaian NSPK KPH efektif dengan regulasi yang berlaku	2023	• Laporan penilaian KPH Efektif • Metode penilaian • Penggunaan anggaran kegiatan Sosialisasi NSPK KPH Efektif	2023
	• Jumlah KPH yang berhasil dinilai • Persentase KPH yang berstatus efektif • Metode penilaian	2023 2024		
	• Jumlah KPH yang berhasil dinilai • Jumlah KPH yang berstatus efektif • Persentase KPH yang berstatus efektif • Metode penilaian • Permasalahan dalam penilaian	2024		

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 3.1. Penyusunan manual/ guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan: Tersusunnya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (bibit/benih ungggul)	18. Tersusunnya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (dokumen)	• Substansi dan ruang lingkup pelaporan implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH	2022	
			Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH (dokumen)	• Substansi dan ruang lingkup pelaporan implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH	2022	
			Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (dokumen)	• Substansi dan ruang lingkup pelaporan implementasi aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT	2022	
			Tersusunnya manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi (dokumen)	• Substansi dan ruang lingkup pelaporan implementasi aksi mitigasi Upaya Penurunan Degradasi Konsesi di area PBPH	2022	

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Kesesuaian dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH • Penggunaan anggaran	2023
	• Kesesuaian dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH • Penggunaan anggaran	2023
	• Kesesuaian dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT • Penggunaan anggaran	2023
	• Kesesuaian dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi Upaya Penurunan Degradasi Konsesi di area PBPH dengan regulasi yang berlaku	2023	• Ketersediaan dokumen manual/guidelines pelaporan implementasi aksi mitigasi Upaya Penurunan Degradasi Konsesi di area PBPH • Penggunaan anggaran	2023

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan			Pemantauan		
		Output	Indikator Kinerja	Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 3.2. Sosialisasi manual/ guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan 1: Tersosialisasikannya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan 2: Terciptanya kesepahaman para pihak dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersosialisasikannya manual/guidelines pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Persentase PBPH yang berkomitmen untuk mengimple-mentasikan aksi mitigasi dalam FOLU *Net Sink* 2030 di area konsesinya (% unit manajemen)	• Jumlah PBPH yang mengimplementasikan aksi mitigasi	2022	
		Terciptanya kesepahaman para pihak dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Meningkatnya jumlah PBPH yang melaporkan kegiatan aksi mitigasi dalam FOLU *Net Sink* 2030 di area konsesinya (unit manajemen)	• Integrasi kegiatan aksi mitigasi dalam RKUPH PBPH • Laporan PBPH terkait Aksi Mitigasi	2022	

SUMBER : Analisis Tim Penyusun, 2022

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Ketercapaian target • Kesesuaian luas target dengan rencana	2023	• Jumlah PBPH yang mengimplementasikan aksi mitigasi	2023
	• Ketersediaan laporan aksi mitigasi dari PBPH • Format laporan PBPH • Kesesuaian lokasi rencana dengan lokasi implementasi aksi mitigasi	2023 2024	• Jumlah PBPH yang menyerahkan laporan aksi mitigasi	2024

TABEL 52. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Teknologi

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
B.	TEKNOLOGI					
4	Penyiapan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lesta					
	Rincian Kegiatan: 4.1. Pembangunan/ pengembangan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT Tujuan: 1. Terbangunnya/ terkembangkannya sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	19. Tersusunnya manual/ guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi RIL-C (dokumen)	• Norma sistem monitoring, pencatatan dan evaluasi RIL-C, SILIN, Pembangunan Hutan Tanaman dan Upaya Penurunan Degradasi di area konsesi • Strandar sistem monitoring, pencatatan dan evaluasi RIL-C, SILIN, Pembangunan Hutan Tanaman dan Upaya Penurunan Degradasi di area konsesi • Prosedur sistem monitoring, pencatatan dan evaluasi RIL-C, SILIN, Pembangunan Hutan Tanaman dan Upaya Penurunan Degradasi di area konsesi • Kriteria sistem monitoring, pencatatan dan evaluasi RIL-C, SILIN, Pembangunan Hutan Tanaman dan Upaya Penurunan Degradasi di area konsesi	2023	
			Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi SILIN (dokumen)			
			Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (dokumen)			
			Tersusunnya manual/guidelines sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi (dokumen)			

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
ri, pengelolaan PBPH berbasis ICT				
	• Substansi dokumen • Kesesuaian dengan regulasi • Metode penyusunan • Proses penyusunan	2023 2024	• Ketersediaan dokumen manual sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT • Penggunaan anggaran kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	2023 2024

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 4.2. Penyusunan manual/ guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT Tujuan: Tersusunnya manual/ guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT (penggunaan HRSI dalam monitoring carbon, penutupan tajuk)	11. Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH	Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH yang melakukan aksi mitigasi RIL-C pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	• Luas tutupan tajuk pada PBPH yang diarahkan sebagai pelaksana RIL-C • Luas tutupan tajuk setelah implementasi RIL-C	2023 2024	
			Meningkatnya tutupan tajuk di areal PBPH yang menerapkan SILIN pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	• Luas tutupan tajuk pada PBPH yang diarahkan sebagai pelaksana SILIN • Luas tutupan tajuk setelah implementasi SILIN	2023 2024	
			Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH-HT yang melakukan aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	• Luas tutupan tajuk pada PBPH yang diarahkan sebagai pelaksana Pembangunan Hutan Tanaman • Luas tutupan tajuk setelah implementasi Pembangunan Hutan Tanaman	2023 2024	
			Meningkatnya tutupan tajuk areal PBPH yang melakukan aksi mitigasi Degradasi Konsesi pada lokasi FOLU *Net Sink* (ribu ha)	• Luas tutupan tajuk pada PBPH yang diarahkan sebagai pelaksana Degradasi Konsesi • Luas tutupan tajuk setelah implementasi Degradasi Konsesi	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Kondisi tutupan tajuk pada area yang diarahkan sebagai pelaksana RIL-C sebelum dan setelah pelaksanaan aksi	2023 2024	• Ketersediaan dokumen manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT • Penggunaan anggaran kegiatan penyusunan manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	2023 2024
	• Kondisi tutupan tajuk pada area yang diarahkan sebagai pelaksana SILIN sebelum dan setelah pelaksanaan aksi	2023 2024		
	• Kondisi tutupan tajuk pada area yang diarahkan sebagai pelaksana Pembangunan Hutan Tanaman sebelum dan setelah pelaksanaan aksi	2023 2024		
	• Kondisi tutupan tajuk pada area yang diarahkan sebagai pelaksana Degradasi Konsesi sebelum dan setelah pelaksanaan aksi	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030		

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 4.3. Sosialisasi manual/ guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT Tujuan: Tersosialisasikannya manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Tersosialisasikannya manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Tersosialisasikannya manual/guidelines dari masing-masing upaya aksi mitigasi pada PBPH (dokumen) 1. Manual RIL-C 2. Manual SILIN 3. Manual Pembangunan Hutan Tanaman 4. Manual Degradasi Konsesi	• Metode sosialisasi • Materi sosialisasi • Jumlah PBPH yang berpartisipasi dalam sosialisasi manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	2023	
			Tersosialisasikannya rencana jadwal monitoring dan evaluasi dari masing-masing upaya aksi mitigasi pada PBPH (dokumen skala provinsi) 1. Penerapan RIL-C 2. Penerapan SILIN 3. Pembangunan Hutan Tanaman 4. Degradasi Konsei	• Jadwal sosialisasi monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi aksi mitigasi pada PBPH menurut regional		
			Tersedianya format baku pencatatan monitoring dan evaluasi berkala untuk pemegang izin yang areanya menjadi lokasi target *Net Sink* 2030 (dokumen)	• Format monitoring • Frekuensi monitoring • Format evaluasi • Frekuensi evaluasi		

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Peningkatan jumlah dan persentase PBPH yang menerapkan monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT.	2024	• Terlaksananya kegiatan sosialisasi manual/ guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT • Penggunaan anggaran kegiatan sosialisasi manual/guidelines monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	2023

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
5	Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBF					
	Rincian Kegiatan: 5.1. Penyusunan hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan: 1. Tersusunnya hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersusunnya hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH menurut regional (dokumen)	• Dokumen catatan hasil monitoring PBPH pelaksana RIL-C menurut regional • Dokumen catatan hasil monitoring PBPH pelaksana SILIN menurut regional • Dokumen catatan hasil monitoring PBPH pelaksana Pembangunan Hutan Tanaman menurut regional • Dokumen catatan hasil monitoring PBPH pelaksana Degradasi Konsesi menurut regional	2023	
			Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH menurut regional (dokumen)			
			Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT menurut regional (dokumen)			
			Tersedianya dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH menurut regional (dokumen)			

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
PH berbasis ICT				
	• Ketersediaan dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi RIL-C di area PBPH yang melaksanakan RIL-C • Ketersediaan dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi SILIN di area PBPH yang melaksanakan SILIN • Ketersediaan dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH yang melaksanakan Pembangunan Hutan Tanaman • Ketersediaan dokumen catatan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Degradasi Konsesi di area PBPH yang melaksanakan Degradasi Konsesi	2024	• Terlaksananya kegiatan Penyusunan hasil monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH • Penggunaan anggaran kegiatan Penyusunan hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH	2023 2024

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 5.1. Penyusunan hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan: 2. Tersusunnya hasil kajian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (perbandingan data sebelum dan sesudah penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH)	22. Tersusunnya hasil kajian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH (perbandingan data sebelum dan sesudah penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH)	Teridentifikasinya gap (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (%)	• Luas area aksi mitigasi RIL-C sebelum implementasi • Luas area aksi mitigasi RIL-C setelah implementasi	2023	
			Teridentifikasinya gap (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi SILIN di area PBPH (%)	• Luas area aksi mitigasi SILIN sebelum implementasi • Luas area aksi mitigasi SILIN setelah implementasi		
			Teridentifikasinya gap (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (%)	• Luas area aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman sebelum implementasi • Luas area aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman setelah implementasi		
			Teridentifikasinya gap (kesenjangan) hasil capaian sebelum dan sesudah implementasi aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (%)	• Luas area aksi mitigasi Degradasi Konsesi sebelum implementasi • Luas area aksi mitigasi Degradasi Konsesi setelah implementasi		

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Ketercapaian target luas area untuk implementasi RIL-C dengan capaian PBPH yang melaporkan implementasi RIL-C di area konsesinya	2024		
	• Ketercapaian target luas area untuk implementasi SILIN dengan capaian PBPH yang melaporkan implementasi SILIN di area konsesinya			
	• Ketercapaian target luas area untuk implementasi Pembangunan Hutan Tanaman dengan capaian PBPH yang melaporkan implementasi Pembangunan Hutan Tanaman di area konsesinya			
	• Ketercapaian target luas area untuk implementasi Degradasi Konsesi dengan capaian PBPH yang melaporkan implementasi Degradasi Konsesi di area konsesinya			

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 5.1. Penyusunan hasil Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH Tujuan: 3. Terbangunnya model tren capaian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berdasarkan historical data hasil capaian	23. Terbangunnya model tren capaian penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berdasarkan historical data hasil capaian	Teridentifikasinya gap (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi RIL-C di area PBPH (%)	• Perbandingan luas rencana dengan capaian • Hasil monitoring RIL-C di PBPH-HA • Hasil monitoring RIL-C di PBPH-HT	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Teridentifikasinya gap (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi SILIN di area PBPH (%)	• Perbandingan luas rencana dengan capaian • Hasil monitoring SILIN di PBPH-HA • Hasil monitoring SILIN di PBPH-HT • Hasil monitoring SILIN di PBPH-RE		
			Teridentifikasinya gap (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT (%)	• Perbandingan luas rencana dengan capaian • Hasil monitoring Pembangunan Hutan Tanaman di PBPH-HT		
			Teridentifikasinya gap (kesenjangan) antara luas perencanaan dengan luas hasil capaian pada aksi mitigasi Degradasi Konsesi di area PBPH (%)	• Perbandingan luas rencana dengan capaian • Hasil monitoring Degradasi Konsesi di PBPH-HA • Hasil monitoring Degradasi Konsesi di PBPH-HT • Hasil monitoring Degradasi Konsesi di PBPH-RE		

SUMBER: Analisis Tim Penyusun, 2022

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Permasalahan yang dihadapi dalam monitoring • Ketercapaian taget implementasi	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030		

TABEL 53. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Sumber Daya Manusia

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
C	**Sumber Daya Manusia**					
6	Pendampingan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM (melibatkan pakar, akademisi)					
	Rincian Kegiatan: 6.1. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi Tujuan: Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan pada PBPH yang mengimplementasikan multiusaha kehutanan (orang)	• Kompetensi SDM • Kualitas SDM • Kuantitas SDM • Kriteria SDM pendamping • Tugas dan fungsi pendamping • Sebaran SDM di tingkat regional	2022	
			Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan pada LMDH atau KTH yang mengimplementasikan multiusaha kehutanan (orang)			
	Rincian Kegiatan: 6.2. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 Tujuan: Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU Net Sink 2030	Tersedianya SDM KPH yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam penyusunan integrasi RPHJP dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (orang)	• Jumlah SDM KPH • Kompetensi SDM KPH • Kapasitas SDM KPH • Integrasi RPHJP dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030	2022	
	Rincian Kegiatan: 6.3. Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT Tujuan: Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Terbangunnya kesepahaman SDM dalam pendampingan Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C di area PBPH-HA dan PBPH-HT (orang)	• Jumlah SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C di area PBPH-HA dan PBPH-HT • Kompetensi SDM pendamping • Kapasitas SDM pendamping	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Penguasaan materi • Distribusi SDM	2023	• Ketersediaan dokumen manual penerapan teknik RIL-C di area PBPH • Penggunaan anggaran kegiatan Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	2023
	• Penguasaan materi • Distribusi SDM KPH di tingkat UPT	2023	• Ketersediaan SDM KPH yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam penyusunan integrasi RPHJP dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Penggunaan anggaran kegiatan Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	2023
	• Ketersediaan SDM pendamping • Pencapaian target pemenuhan SDM • Kendala pemenuhan SDM yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C di area PBPH-HA dan PBPH-HT	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	• Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam pendampingan monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT • Penggunaan anggaran kegiatan Internalisasi kompetensi dan kapasitas SDM pendamping Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
			Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE (orang)	• Jumlah SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE • Kompetensi SDM pendamping • Kapasitas SDM pendamping		
			Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT (orang)	• Jumlah SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT • Kompetensi SDM pendamping • Kapasitas SDM pendamping		
			Tersedianya SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE (orang)	• Jumlah SDM pendamping yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE • Kompetensi SDM pendamping • Kapasitas SDM pendamping		
	Rincian Kegiatan: 6.4. Pendampingan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pelaksana Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi Tujuan: Terlaksananya multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi sesuai manual/guidelines untuk mendukung target FOLU *Net Sink* 2030	Terlaksananya multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi sesuai manual/ guidelines untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030	Terlaksananya kegiatan pendampingan terhadap PBPH, LMDH, KTH dan atau pelaku usaha pelaksana multiusaha dan teknik pengelolaan produksi (kali/ tahun)	• Jumlah pelaku usaha yang didampingi • Proses pendampingan • Metode pendampingan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Meningkatnya jumlah PBPH, LMDH, KTH dan atau pelaku usaha yang melaksanakan multiusaha yang sesuai manual/guidelines untuk mendukung target FOLU *Net Sink* 2030 (unit manajemen)	• Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan multiusaha sebelum agenda FOLU *Net Sink* 2030 • Jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan FOLU *Net Sink* 2030		
	Rincian Kegiatan: 6.5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 Tujuan 1: Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan dokumen RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	24. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM pelaksana Renops FOLU	Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan integrasi RPHJP dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (kali/tahun)	• Jumlah peserta pelatihan • Kompetensi peserta pelatihan • Materi pelatihan • Output pelatihan • Target pelatihan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Ketersediaan SDM pendamping • Pencapaian target pemenuhan SDM • Kendala pemenuhan SDM yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE			
	• Ketersediaan SDM pendamping • Pencapaian target pemenuhan SDM • Kendala pemenuhan SDM yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di area PBPH-HT			
	• Ketersediaan SDM pendamping • Pencapaian target pemenuhan SDM • Kendala pemenuhan SDM yang dilibatkan untuk monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi di area PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE			
	• Kesesuaian multiusaha yang dijalankan oleh pelaku usaha dengan manual multiusaha dan teknik pengelolaan produksi yang telah disusun • Ketercapaian hasil dengan target yang ditetapkan • Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	• Ketersediaan SDM yang berkompeten dan memiliki kapasitas dalam pendampingan multiusaha dan teknik pengelolaan produksi • Penggunaan anggaran kegiatan Pendampingan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pelaksana Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
	• Persentase peningkatan pelaku usaha yang menerapkan multiusaha sesuai dengan manual/ guidelines multiusaha dan teknik pengelolaan produksi • Ketercapaian hasil dengan target yang ditetapkan • Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target			
	• Ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas dalam menyusun RPHJP KPH yang terintegrasi dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Distribusi dan sebaran SDM yang memiliki kapasitas dalam menyusun RPHJP KPH yang terintegrasi dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 menurut regional	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	• Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan dokumen RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Jumlah dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030 yang masih dalam proses penyusunan dan yang sudah disahkan • Penggunaan anggaran kegiatan Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 6.5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KPH dalam penyusunan RPHJP sesuai dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 Tujuan 2: Tersusunnya dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030	25. Tersusunnya dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030	Tersusunnya dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030 (jumlah dokumen)	• Rincian aksi mitigasi dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang berada di wilayah KPH • Luas area masing-masing aksi mitigasi • Revisi penataan hutan • Pelaksana aksi mitigasi • Integrasi ke dalam RPJHP • Revisi target dan tujuan pengelolaan dalam RPHJP KPH yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030		
			Jumlah dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang disahkan (jumlah dokumen)	• Kriteria dokumen RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030 • Proses penilaian RPHJP yang selaras dengan dokumen Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan target FOLU *Net Sink* 2030		
	Rincian Kegiatan: 6.6. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT Tujuan: Termonitornya, tercatatnya, serta terevaluasinya implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT sesuai dengan manual/guidelines (termasuk multiusaha)	Termonitornya, tercatatnya, serta terevaluasinya implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT sesuai dengan manual/guidelines (termasuk multiusaha)	Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C (kali/tahun)	• Jumlah peserta pelatihan • Kompetensi peserta pelatihan • Materi pelatihan • Output pelatihan • Target pelatihan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN (kali/tahun)	• Jumlah peserta pelatihan • Kompetensi peserta pelatihan • Materi pelatihan • Output pelatihan • Target pelatihan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (kali/tahun)	• Jumlah peserta pelatihan • Kompetensi peserta pelatihan • Materi pelatihan • Output pelatihan • Target pelatihan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Terlaksananya pelatihan kompetensi dan kapasitas SDM pendamping dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi (kali/tahun)	• Jumlah peserta pelatihan • Kompetensi peserta pelatihan • Materi pelatihan • Output pelatihan • Target pelatihan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	

SUMBER: Analisis Tim Penyusun, 2022

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Ketersediaan dokumen RPHJP KPH yang sudah terintegrasi dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Lama waktu penyusunan RPHJP yang terintegrasi dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030			
	• Ketersediaan dokumen RPHJP KPH yang sudah terintegrasi dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030 dan sudah disahkan • Lama waktu penilaian dan pengesahan RPHJP yang terintegrasi dengan Renops FOLU *Net Sink* 2030			
	• Ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C • Distribusi dan sebaran SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi RIL-C	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	• Penambahan jumlah SDM yang berkompeten dan memiliki kapasitas dalam Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT • Penggunaan anggaran kegiatan Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam Monitoring, pencatatan, serta evaluasi implementasi penerapan teknik RIL, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan PBPH berbasis ICT	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
	• Ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN • Distribusi dan sebaran SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi SILIN	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030		
	• Ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman • Distribusi dan sebaran SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030		
	• Ketersediaan SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi • Distribusi dan sebaran SDM yang memiliki kapasitas pendampingan dalam monitoring, pencatatan dan evaluasi Aksi Mitigasi Pengurangan Degradasi Konsesi	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030		

TABEL 54. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada **Intervensi Kemitraan**

No	Rincian Kegiatan[1] dan Tujuan[1]	Output[2]	Indikator Kinerja[3]	Pemantauan		
D	Kemitraan					
7	Penyiapan dan Implementasi Program dan Strategi Komunikasi Publik					
	Rincian Kegiatan: 7.1. Penyusunan Program dan Strategi Komunikasi Publik Tujuan: Tersusunnya Program dan Strategi Komunikasi Publik	Dokumen rencana Program dan Strategi Komunikasi Publik	Tersusunnya dokumen perencanaan terkait strategi, program dan kegiatan Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030 (jumlah dokumen)	• Metode penyusunan program • Jenis program dan kegiatan yang direncanakan • Sumber pendanaan program • Kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian target *Net Sink* 2030 • Sasaran mitra program	2022 2023 20242025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Tersusunnya proposal rencana kemitraan untuk pihak ke-3 (jumlah dokumen)			
8	Penyiapan dan Pengembangan Forum Komunikasi					
	Rincian Kegiatan: 8.1. Penyiapan dan Pengembangan Forum Komunikasi Tujuan: Terbentuknya Forum Komunikasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	26. Terbentuknya Forum Komunikasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terbentuknya Forum Komunikasi Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030 (ada/tidak ada)	• Aktivitas forum dalam mengadakan diskusi dan atau FGD bulanan • Materi diskusi dalam forum • Tema yang diusung dalam forum	2022	
		28. Terpublik-asikannya dokumen, implementasi, capaian target Renops FOLU *Net Sink* 2030 kepada publik	Tersedianya website informasi Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang dapat diakses publik (tersedia/tidak tersedia)	• Domain website • Alamat website • Link terkait • Dapat diakses secara publik		
			Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang diunggah dalam webite (jumlah dokumen)	• Dokumen yang dipublikasikan • Keilmiahan literasi dalam dokumen yang dipublikasikan • Data dan fakta yang dipublikasikan • Sumber data dan fakta yang dipublikasikan		
			Jumlah jurnal ilmiah terkait capaian implementasi kegiatan Pokja 1.3 Bidang 1 PHL terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 yang diunggah dalam webite (jumlah dokumen)	• Nama jurnal yang diunggah dalam webite • Judul artikel yang diunggah dalam webite • Kepemilikan nomor jurnal seperti DOI dan ISSN		
9	Penyiapan dan Pengembangan kemitraan para pihak					

	Evaluasi		Pelaporan	
	• Tingkat kontribusi dokumen perencanaan dalam implementasi aksi mitigasi di lokasi kegiatan FOLU *Net Sink* 2030 • Tingkat efektivitas rencana program dan kegiatan	2022 2023 20242025 2026 2027 2028 2029 2030	• Ketersediaan program dan strategi komunikasi publik • Penggunaan anggaran kegiatan Penyusunan Program dan Strategi Komunikasi Publik	2022 2023 20242025 2026 2027 2028 2029 2030
	• Jumlah peserta forum • Jumlah pertanyaan dalam forum • Durasi diskusi forum • Komentar peserta forum diskusi	2022	• Ketersediaan Forum Komunikasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Penggunaan anggaran kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Forum Komunikasi	2022
	• Jumlah kunjungan			
	• Jumlah dokumen perencanaan yang di download pengunjung			
	• Jumlah jurnal yang di download pengunjung			

No	Rincian Kegiatan[1] dan Tujuan[1]	Output[2]	Indikator Kinerja[3]	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
	Rincian Kegiatan: 9.1. Identifikasi mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030 Tujuan: Teridentifikasinya mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030	Daftar mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU Net Sink 2030	Teridentifikasinya mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030 (unit lembaga)	• Tingkat pengaruh mitra terkait • Tingkat kepentingan mitra terkait • Legalitas dan badan hukum mitra terkait • Track record/pengalaman mitra terkait dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Potensi dukungan mitra terhadap kegiatan FOLU *Net Sink* 2030	2022	
	Rincian Kegiatan: 9.2. Pembahasan kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 Tujuan: Terbentuknya kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	27. Terbentuknya kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Terjalinnya kesepakatan kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 melalui perjanjian kerjasama usaha/kemitraan (jumlah perjanjian kerjasama/kemitraan)	• Bentuk dukungan dalam kesepakatan kemitraan • Jenis kegiatan yang dipilih dalam kemitraan • Target kegiatan yang dipilih dalam kemitraan • Persentase kontribusi kemitraan	2022 2023 20242025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Teridentifikasinya pembagian peran kemitraan pada setiap kegiatan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen pembagian peran kemitraan)	• Peran mitra dalam kegiatan FOLU *Net Sink* 2030 • Peran mitra dalam pencapaian target *Net Sink* 2030		
10	Koordinasi dan kolaborasi antar sektor terkait					
	Rincian Kegiatan: 10.1. Identifikasi sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030 Tujuan: Teridentifikasinya sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030	Daftar sektor terkait Renops FOLU Net Sink 2030	Teridentifikasinya sektor terkait menurut tingkat pengaruh dan kepentingannya pada masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (jumlah sektor yang berperan aktif di tingkat Kementerian dan provinsi)	• Tingkat pengaruh sektor terkait • Tingkat kepentingan sektor terkait	2022	
			Teridentifikasinya peran stakeholder terkait terhadap masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen pembagian peran stakeholder)	• Peran stakeholder dalam kegiatan FOLU *Net Sink* 2030 • Peran stakeholder dalam pencapaian target *Net Sink* 2030		
	Rincian Kegiatan: 10.2. Koordinasi dan kolaborasi sektor terkait dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 Tujuan: Terbangunnya koordinasi dan kolaborasi sektor terkait implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	Dokumen rencana koordinasi dan kolaborasi sektor terkait implementasi Renops FOLU Net Sink 2030	Tersusunnya rencana koordinasi sektor terkait untuk implementasi masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen rencana)	• Frekuensi koordinasi • Metode koordinasi	2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	
			Tersusunnya rencana kolaborasi sektor terkait untuk implementasi masing-masing kegiatan dalam Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen rencana)	• Jenis kegiatan • Sifat kegiatan yang melibatkan kolaborasi antar sektor • Sektor yang terlibat		

SUMBER: Analisis Tim Penyusun, 2022

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Potensi kontribusi mitra terkait terhadap tujuan FOLU *Net Sink* • Potensi kontribusi mitra terkait terhadap pencapaian target FOLU *Net Sink*	2022	• Ketersediaan mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Penggunaan anggaran kegiatan Identifikasi mitra potensial untuk mendukung Renops FOLU *Net Sink* 2030	2022
	• Output kemitraan • Kontribusi kemitraan terhadap pencapaian target kegiatan • Kendala dan tantangan dalam kemitraan	2022 2023 20242025 2026 2027 2028 2029 2030	• Laporan kegiatan Pembahasan kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Penggunaan anggaran dalam kegiatan Pembahasan kemitraan dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
	• Kontribusi peran stakeholder • Tingkat partisipasi mitra • Tingkat dukungan mitra dalam mendukungan agenda pencapaian target *Net Sink* 2030			
	• Potensi kontribusi sektor terkait terhadap tujuan FOLU *Net Sink* • Potensi kontribusi sektor terkait terhadap pencapaian target FOLU *Net Sink*	2022	• Ketersediaan sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Penggunaan anggaran kegiatan Identifikasi sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030	2022
	• Stakeholder mapping • Kontribusi peran stakeholder • Partisipasi stakeholder • Dukungan stakeholder terlibat			
	• Output koordinasi • Kontribusi terhadap pencapaian target • Kendala dalam koordinasi	2022 2023 20242025 2026 2027 2028 2029 2030	• Implementasi koordinasi dan kolaborasi sektor terkait Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Penggunaan anggaran kegiatan Koordinasi dan kolaborasi sektor terkait dalam implementasi Renops FOLU *Net Sink* 2030	2022 2023 20242025 2026 2027 2028 2029 2030
	• Output kolaborasi • Kontribusi terhadap pencapaian target • Tantangan yang dihadapi dalam proses kolaborasi			

TABEL 55. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi pada Intervensi Anggaran

No	Rincian Kegiatan dan Tujuan	Output	Indikator Kinerja	Pemantauan		
				Aspek yang Dipantau	Waktu	
E	**Anggaran**					
11	Penyusunan dan Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan					
	Rincian Kegiatan: 11.1. Penyusunan dan Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan Tujuan: Tersusunnya rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030	Dokumen rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan Renops FOLU Net Sink 2030	Tersusunnya rencana kerja Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen) Tersusunnya rencana anggaran untuk implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen) Tersedianya jumlah anggaran untuk implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030 melalui APBN, APBD Provinsi, Pihak ke-3 dan alternatif pendanaan lainnya (dokumen)	• Penetapan target rencana kerja • Jangka waktu perencanaan • Ketersediaan SDM • Ketersediaan anggaran • Peluang kemitraan • Stakeholder yang terlibat • Lokasi kegiatan • Volume kegiatan • Rencana aksi tahunan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	
12	Penyiapan bahan konsep kelembagaan pendanaan kegiatan					
	Rincian Kegiatan: 12.1. Penyiapan bahan konsep kelembagaan pendanaan kegiatan Tujuan: Terkonsepnya kelembagaan pendanaan implementasi kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030	Dokumen kelembagaan pendanaan implementasi kegiatan Renops FOLU Net Sink 2030	Tersusunnya mekanisme kelembagaan pendanaan kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030 (dokumen)	• Sumber pendanaan • Tujuan pendanaan • Kegiatan yang didanai • Tingkat kesesuaian pendanaan dengan kegiatan prioritas berdasarkan deskripsi dan tujuan FOLU *Net Sink* 2030 • Penerima manfaat dari kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030 • Organisasi yang berkolaborasi dalam perencanaan, pencairan dan pelaksanaan kegiatan Renops FOLU *Net Sink* 2030	2022	

SUMBER : Analisis Tim Penyusun, 2022

	Evaluasi		Pelaporan	
	Aspek yang Dievaluasi	Waktu	Aspek yang Dilaporkan	Waktu
	• Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan implementasi • Ketercapaian target dari setiap kegiatan dalam rencana kerja • Kontribusi rencana kerja terhadap tujuan FOLU *Net Sink* 2030	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030	• Ketersediaan rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan • Penggunaan anggaran kegiatan Penyusunan dan Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
	• Tingkat mobilisasi pendanaan • Pengelolaan pendanaan • Keselarasan lokasi pendanaan dengan prioritas pembangunan yang berkontribusi terhadap mitigasi emisi GRK	2022	• Ketersediaan bahan konsep kelembagaan pendanaan kegiatan • Penggunaan anggaran kegiatan Penyiapan bahan konsep kelembagaan pendanaan kegiatan	2022

D. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

D.1. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan

Perubahan paradigma pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2016 setelah kejadian karhutla tahun 2015 yang membakar 2,6 juta ha hutan dan lahan. Seiring dengan perubahan paradigm tersebut, Dit. PKHL telah merancang Siklus Manajemen Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia untuk diimplementasikan setiap tahun dari 2022-2030, dengan fase-fase sebagai berikut:

1. Fase Pra Krisis: Januari-April; pada fase ini kebakaran sudah mulai terjadi di beberapa daerah, khususnya Provinsi Riau dan Kalimantan Barat, fase ini cenderung aman;
2. Fase Peringatan: April-Juni; pada fase ini telah terjadi kebakaran lebih dari 1 kejadian;
3. Fase Krisis: Juni-Oktober; karhutla terjadi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi; karhutla memiliki potensi polusi kabut asap;
4. Fase Pemulihan: Oktober-November; fase krisis sudah selesai; aktivitas normal kecuali di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
5. Fase Evaluasi: Desember; Evaluasi dampak, karhutla terjadi di bagian timur Indonesia (Papua).

Tata waktu fase-fase pengendalian karhutla dengan indikator dan instansi yang terlibat secara detail dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan hasil *template* yang ditumpangsusunkan dengan tingkat kerawanan karhutla, target volume kegiatan dapat dimulai dari tingkat kerawanan tinggi dan sangat tinggi (Tabel 56). Semua Eselon I KLHK terkait melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kawasan hutan dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta kegiatan penunjang lainnya terhadap pengendalian kebakaran hutan.

TABEL 56. Prioritas Waktu Pengendalian Karhutla Berdasarkan Tingkat Kerawanan

No.	Wilayah Kelola	Luas Menurut Tingkat Kerawanan (ha)	
		Sangat Tinggi	Tinggi
1.	Ditjen PSKL	190.665	972.454
2.	Ditjen PHL	680.773	5.910.149
3.	Ditjen KSDAE	24.674	903.650
4.	Ditjen PDASRH	58.883	556.927
5.	Ditjen PPKL	18.650	
6.	BRGM	623.590	456.516
7.	PEMDA	1.899.232	4.097.541
	Total	3.496.467	12.897.237

Dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pada areal deforestasi tidak terencana, tata waktu implementasi pengendalian karhutla mengacu pada data Manual Deforestasi dan Degradasi Hutan. Pada kawasan hutan dengan kondisi risiko ekstrim tinggi seluas 223.431 ha dan risiko sangat tinggi seluas 637.255 ha, perlu upaya bersama dalam mengendalikan karhutla sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi masing-masing instansi.

TABEL 57. Prioritas Waktu Pengendalian Karhutla Pada Deforestasi Tidak Terencana

No.	Wilayah kelola	IPL	Luas Pengendalian Karhutla (ha)
1.	Ditjen PHL	9	33.807
		8	188.941
2.	Ditjen KSDAE	8	162.226
3.	Ditjen PDASRH	8	37.391
4.	Ditjen PSKL	9	
		8	85.132
5.	PEMDA	9	179.635
		8	163.565
	Total	*9*	*223.431*
		8	*637.255*

Sumber: data ekstraksi dari Manual Deforestasi dan Degradasi Hutan (2021)

Tata waktu pengendalian karhutla oleh pemangku kawasan di wilayah risiko sangat tinggi seluas 716 ha yang berada di kawasan KPHP-HTI, risiko tinggi seluas 7.817 ha yang berada di kawasan KPHP-HTI (4.809 ha) dan KPHP-RE (3.007 ha), dan risiko sedang seluas 35.458 ha berada di KPHP-HTI.

TABEL 58. Prioritas Waktu Pengendalian Karhutla pada Deforestasi Tidak Terencana

IPL	KPHP-HTI	KPHP-RE	Total
8	716		716
7	4.809	3.007	7.817
6	35.458		35.458

SUMBER: data ekstraksi dari Manual Deforestasi dan Degradasi Hutan (2021)

Seluruh pemangku kepentingan melakukan koordinasi dan saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan pengendalian kebakaran sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. Pelaksanaan pengendalian karhutla dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana program dan anggaran yang tersedia di masing-masing institusi yang dapat dimulai pada tahun 2022.

Berdasarkan tata waktu dan target tahunan dari masing-masing wilayah balai wilayah dijabarkan sesuai target sampai tahun 2030. Baseline 2010 digunakan sebagai pertimbangan dalam pemenuhan target sampai tahun 2030. Balai PPIKHL wilayah Kalimantan memiliki luas target terbesar ditahun 2023 dengan luas sebesar 56.626 ha sedangkan Sulawesi merupakan balai wilayah yang memiliki luas target terkecil ditahun 2023. Luas target pada tahun selanjutnya dibuat menurun diasumsikan lokasi prioritas telah terjaga sehingga lokasi penjagaan dapat dikurangi. Keseluruhan luas lokasi pengendalian kebakaran hutan hingga tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel 59.

TABEL 59 Target Pencapaian IKK Dalkarhutla tahun 2020 – 2030

No	Satker	*Baseline* 2010	Target Capaian Kinerja (Penurunan Luas Karhutla) Ha										
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Balai PPIKHL Wil Sumatra	75.051	67.546	60.791	54.712	49.241	44.317	39.885	35.897	32.307	29.076	26.169	23.552
2	Balai PPIKHL Wil Kalimantan	95.896	86.307	77.676	69.908	62.917	56.626	50.963	45.867	41.280	37.152	33.437	30.093
3	Balai PPIKHL Wil Jawa Bali Nusa Tenggara	32.995	29.695	26.726	24.053	21.648	19.483	17.535	15.781	14.203	12.783	11.505	10.354
4	Balai PPIKHL Wil Sulawesi	7.521	6.769	6.092	5.482	4.934	4.441	3.997	3.597	3.237	2.914	2.622	2.360
5	Balai PPIKHL Wil Maluku Papua	19.560	17.604	15.843	14.259	12.833	11.550	10.395	9.355	8.420	7.578	6.820	6.138
	JUMLAH	231.022	207.920	187.128	168.415	151.574	136.416	122.775	110.497	99.447	89.503	80.552	72.497

D.2. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial disajikan pada tabel berikut:

TABEL 60. Tata Waktu Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Intervensi	Tujuan	Kegiatan	Tahun pelaksanaan		
			2022	2023	2024
Percepatan akses kelola kawasan	Meningkatnya penyiapan kawasan perhutanan sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
Tata kelola usaha dan hutan adat	Meningkatnya pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			
SDM pendampingan	Meningkatnya pendampingan perhutanan sosial	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat			
Penguatan kemitraan	Meningkatnya kemitraan	Kemitraan Lingkungan			

Intervensi	Tujuan	Kegiatan	Tahun pelaksanaan		
			2022	2023	2024
Percepatan akses kelola kawasan	Meningkatnya penyiapan kawasan perhutanan sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
Tata kelola usaha dan hutan adat	Meningkatnya pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			
SDM pendampingan	Meningkatnya pendampingan perhutanan sosial	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat			
Penguatan kemitraan	Meningkatnya kemitraan	Kemitraan Lingkungan			

Intervensi	Tujuan	Kegiatan	Tahun pelaksanaan		
			2022	2023	2024
Percepatan akses kelola kawasan	Meningkatnya penyiapan kawasan perhutanan sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
Tata kelola usaha dan hutan adat	Meningkatnya pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			
SDM pendampingan	Meningkatnya pendampingan perhutanan sosial	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat			
Penguatan kemitraan	Meningkatnya kemitraan	Kemitraan Lingkungan			

D.3. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Multi Usaha dan Teknik Pengelolaan Produksi

D.3.2. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

D.3.2.1. RIL-C di Area PBPH-HA

Sesuai dengan skenario implementasi pengelolaan hutan lestari yang ditunjukkan Tabel 32 di atas, potensi pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HA sampai 2030 secara kumulatif

mencapai 4.380.952 ha. Untuk mencapai target net sink, pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HA sampai tahun 2024 adalah seluas 251.453 ha (lihat Tabel 32). Luasan ini sudah mendekati luas target net sink 2030. Oleh karena itu pelaksanaannya untuk pencapaian target ini dapat dilakukan dari 2023 sampai tahun 2030. Sesuai dengan skenario, pelaksanaan RIL-C tahun 2023-2024 diprioritaskan pada areal dengan IPL tinggi (IPL5-7), sedangkan pada IPL rendah dapat dilakukan pada sebagian lokasi atau setelah tahun 2024. Pelaksanaan RIL-C diterapkan pada lokasi PBPH yang luasannya di atas 10.000 dan 100.000 ha. Dengan pertimbangan ini, rincian luas areal untuk pelaksanaan RIL-C di PBPH-HA tahun 2023-2030 pada IPL3-7 disajikan pada Tabel 61, sedangkan sebaran area untuk pelaksanaannya menurut konsesi disajikan pada Tabel 62-66.

TABEL 61. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan RIL-C di Area PBPH-HA Tahun 2022-2030 Menurut IPL

Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2023-2026				Tahun 2027-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Area dengan IPL 7	13.873	3.532	2.838	1.451	757	1.986	1.324	1.324	662
Area dengan IPL 6	1.289	452	386	257	193	-	-	-	-
Area dengan IPL 5	67.067	17.299	13.754	7.068	3.724	9.458	6.306	6.306	3.153
Area dengan IPL 4*	43.175	15.111	12.952	8.635	6.476	15.111	12.952	8.635	6.476
Area dengan IPL 3*	126.049	44.117	37.815	25.210	18.907	44.117	37.815	25.210	18.907
Total RIL-C pada PBPH-HA	251.453	80.511	67.745	42.621	30.057	70.673	58.397	41.474	29.198

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022. *Pelaksanaan RIL-C pada areal IPL 3-4 dilakukan hanya 50% dari luas

TABEL 62. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara & Kutai Timur	PT. Melapi Timber	4.977	1.308	1.059	561	312	651	434	434	217
Kalimantan Utara	Malinau	PT. Permata Borneo Abadi	8.896	2.224	1.779	890	445	1.334	890	890	445
SUB TOTAL IPL 7				3.532	2.838	1.451	757	1.986	1.324	1.324	662

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 63. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Selatan	Tabalong	PT. Aya Yayang Indonesia	406	142	122	81	61	-	-	-	-
Kalimantan Tengah			883								
	Katingan		881								
		PT. Graha Sentosa Permai	134	47	40	27	20	-	-	-	-
		PT. Kayu Waja	747	261	224	149	112	-	-	-	-
	Kotawaringin Timur	PT. Berkat Cahaya Timber	2	2	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL IPL 6				452	386	257	193	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 64. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha) 2024 2024	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	PT. Toras Banua Sukses	922	323	277	184	138	-	-	-	-
-Kalimantan Tengah			63.400	-	-	-	-	-	-	-	-
	Murungraya	PT. Agathis Alam Indonesia	6	6	-	-	-	-	-	-	-
	Gunungmas & Katingan	PT. Carus Indonesia	6.933	1.735	1.386	693	347	1.040	693	693	347
	Seruyan & Kotawaringin Barat	PT. Erythrina Nugraha Megah	285	141	66	44	33	-	-	-	-
	Murungraya & Kapuas	PT. Gunung Meranti	5.772	1.469	1.181	603	315	827	551	551	276
	Gunungmas	PT. Hutan Domas Raya	2.603	651	521	260	130	390	260	260	130
	Kotawaringin Barat	PT. Hutani Lestari Raya Timber	1.428	357	286	143	71	214	143	143	71
	Gunungmas, Kapuas & Murungraya	PT. Kahayan Terang Abadi	3.403	996	826	486	316	292	195	195	97

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha) 2024 2024	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Murungraya	PT. Kayu Ara Jaya Raya	2.630	658	526	263	132	395	263	263	132
	Murungraya	PT. Menorah Loggingindo	40	40	-	-	-	-	-	-	-
	Murungraya	PT. Mitra Perdana Palangka	7.194	1.799	1.439	719	360	1.079	719	719	360
	Murungraya	PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera	30.256	7.564	6.051	3.026	1.513	4.538	3.026	3.026	1.513
	Murungraya	PT. Samudera Rejeki Perkasa	1.841	460	368	184	92	276	184	184	92
	Murungraya	PT. Sarang Sapta Putra	736	258	221	147	110	-	-	-	-
	Katingan & Lamandau	PT. Sari Bumi Kusuma (Unit I dan II)	213	89	57	38	29	-	-	-	-
	Murungraya	PT. Taman Raja Persada	25	9	8	5	4	-	-	-	-
	Barito Utara	PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	35	35	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur			2.722		-	-	-	-	-	-	-
	Kutai Barat	PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	9	9	-	-	-	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT. Oceans Timber Product	2.713	678	543	271	136	407	271	271	136
Sumatera Utara	Langkat	PT. Mulyakarya Jayaco	23	23	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL IPL 5				17.299	13.754	7.068	3.724	9.458	6.306	6.306	3.153

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 65. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Papua	Sarmi	PT. Sumber Mitra Jaya (SK.396)	46.332	4.865	4.170	2.780	2.085	4.865	4.170	2.780	2.085
Papua Barat	Maybrat & Telukbintuni	PT. Wana Galang Utama	97.584	10.246	8.783	5.855	4.391	10.246	8.783	5.855	4.391
SUB TOTAL IPL 4				15.111	12.952	8.635	6.476	15.111	12.952	8.635	6.476

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 66. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur			341.080								
	Berau	PT. Aditya Kirana Mandiri	18.563	1.299	1.114	743	557	1.299	1.114	743	557
	Berau	PT. Aquila Silva	46.084	3.226	2.765	1.843	1.383	3.226	2.765	1.843	1.383
	Berau	PT. Inhutani I (Unit Labanan)	13.484	944	809	539	405	944	809	539	405
	Berau	PT. Sumalindo Lestari Jaya IV	12.831	898	770	513	385	898	770	513	385
	Kutai Barat	PT. Daya Maju Lestari (DH. PT.Marimum Timber IDS)	16.970	1.188	1.018	679	509	1.188	1.018	679	509
	Kutai Barat	PT. Kemakmuran Berkah Timber	19.409	1.359	1.165	776	582	1.359	1.165	776	582
	Kutai Barat	PT. Sumalindo Lestari Jaya II	10.777	754	647	431	323	754	647	431	323
	Kutai Barat	PT. Wangsa Karya Lestari	35.205	2.464	2.112	1.408	1.056	2.464	2.112	1.408	1.056
	Kutai Kartanegara	PT. Barito Nusantara Indah	26.714	1.870	1.603	1.069	801	1.870	1.603	1.069	801
	Kutai Kartanegara & Kutai Barat	PT. Dewata Wanatama Lestari (DH.PT. Dharma Putera)	41.594	2.912	2.496	1.664	1.248	2.912	2.496	1.664	1.248
	Kutai Kartanegara	PT. Mutiara Kalja Permai (SK.506)	33.042	2.313	1.983	1.322	991	2.313	1.983	1.322	991

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Utara			243.794								
	Bulungan	PT. ITCI Kayan Hutani	19.104	1.337	1.146	764	573	1.337	1.146	764	573
	Malinau	PT. Rimba Karya Rayatama (SK 384-Malinau)	114.741	8.032	6.884	4.590	3.442	8.032	6.884	4.590	3.442
	Malinau	PT. Sumalindo Lestari Jaya II	109.949	7.696	6.597	4.398	3.298	7.696	6.597	4.398	3.298
Papua	Keerom	PT. Batasan	18.996	1.330	1.140	760	570	1.330	1.140	760	570
Papua Barat			104.922								
	Fak-fak	PT. Hanurata	59.838	4.189	3.590	2.394	1.795	4.189	3.590	2.394	1.795
	Telukbintuni	PT. Rimbakayu Arthamas	32.946	2.306	1.977	1.318	988	2.306	1.977	1.318	988
SUB TOTAL IPL 3				44.117	37.815	25.210	18.907	44.117	37.815	25.210	18.907

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

D.3.2.2. RIL-C di Area PBPH-HT

Target area pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HT berdasarkan skenario di Tabel 32 di atas adalah 20.682 ha dan pelaksanaanya dapat dilakukan pada areal PBPH-HT dengan IPL 3-7. Sesuai dengan skenario, pelaksanaan RIL-C tahun 2023-2024 diprioritaskan pada areal dengan IPL tinggi (IPL5-7), sedangkan pada IPL rendah dapat dilakukan pada sebagian lokasi atau setelah tahun 2024. Pelaksanaan RIL-C diterapkan pada lokasi PBPH yang luasannya di atas 10.000 dan 100.000 ha. Rincian luas areal untuk pelaksanaan RIL-C di PBPH-HT tahun 2023-2030 pada IPL3-7 disajikan pada Tabel 67, sedangkan sebaran area untuk pelaksanaannya menurut konsesi disajikan pada Tabel 68-72.

TABEL 67. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan RIL-C di Area PBPH-HT Tahun 2022-2030 Menurut IPL

Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan (ha)[1]	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sub Total IPL 7	589	208	176	117	88	-	-	-	-
Sub Total IPL 6	2.240	806	662	441	331	-	-	-	-
Sub Total IPL 5	8.470	2.322	1.750	919	503	1.116	744	744	372
Sub Total IPL 4*	3.606	1.262	1.082	721	541	1.262	1.082	721	541
Sub Total IPL 3*	5.787	2.026	1.736	1.157	868	2.026	1.736	1.157	868
Sub Total RIL-C PBPH-HT	20.692	6.624	5.406	3.355	2.331	4.404	3.562	2.623	1.781

KETERANGAN: [1]Total Volume Kegiatan Tahun 2023-2024.

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022. *Pelaksanaan RIL-C pada areal IPL 3-4 dilakukan hanya 50% dari luas

TABEL 68. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat	Melawi	PT Rimba Equator Permai	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	Kutai Timur	PT Permata Borneo Abadi	398	139	119	80	60	-	-	-	-
Sumatera Selatan	Empat Lawang	PT Musi Hutan Persada	187	65	56	37	28	-	-	-	-
		SUB TOTAL IPL 7	589	208	176	117	88	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 69. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi			912								
	Sarolangun	PT Gading Karya Makmur	241	84	72	48	36	-	-	-	-
	Sarolangun	PT Hijau Artha Nusa	234	82	70	47	35	-	-	-	-
	Merangin	PT Jebus Maju	34	34				-	-	-	-
	Bungo	PT Mugitriman International	93	33	28	19	14	-	-	-	-
	Tanjungjabung Barat	PT Wira Karya Sakti	310	109	93	62	47	-	-	-	-
Kalimantan Barat			785								
	Kapuas Hulu	PT Lembah Jatimutiara	430	151	129	86	65	-	-	-	-
	Melawi	PT Segah Bangun Persada	227	79	68	45	34	-	-	-	-
	Ketapang & Sekadau	PT Wana Subur Persada	128	45	38	26	19	-	-	-	-
Kalimantan Timur			544								
	Kutai Timur	PT Santan Borneo Abadi	72	25	22	14	11	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT Silva Selaras Utama	472	165	142	94	71	-	-	-	-
		SUB TOTAL IPL 6	2.240	806	662	441	331	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 70. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bangka-belitung	Bangka	PT Agro Pratama Sejahtera	235	82	71	47	35	-	-	-	-
Kalimantan Barat			6.563								
	Landak	PT Gapura Persada Katulistiwa	135	47	41	27	20	-	-	-	-
	Melawi	PT Kusuma Puspawana	9	9	-	-	-	-	-	-	-
	Sanggau	PT Wana Lestari Jaya	6385	1.596	1.277	639	319	958	639	639	319
	Sintang	PT Boma Plantation	34	34	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	Pulangpisau	PT Kalteng Green Resources	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	Berau	PT Tanjung Redeb Hutani	504	176	151	101	76	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	Bima	PT Koin Nesia	1.055	264	211	106	53	158	106	106	53
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	PT Wono Indotani Niaga	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	Empat Lawang	PT Xylo Indah Pratama	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	Tapanuli Utara & Tobasamosir	PT Toba Pulp Lestari Tbk	95	95	-	-	-	-	-	-	-
		SUB TOTAL IPL 5	8.470	2.322	1.750	919	503	1.116	744	744	372

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 71. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Papua	Merauke	PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III	3.606	1.262	1.082	721	541	1.262	1.082	721	541
		SUB TOTAL IPL 4	3.606	1.262	1.082	721	541	1.262	1.082	721	541

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 72. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi RIL-C di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		Jan - Mar	Apr - Jun	Jul - Sep	Okt - Des	Jan - Mar	Apr - Jun	Jul - Sep	Okt - Des
Papua	Merauke	PT Selaras Inti Semesta	28.936	2.026	1.736	1.157	868	2.026	1.736	1.157	868
		SUB TOTAL IPL 3	5.787	2.026	1.736	1.157	868	2.026	1.736	1.157	868

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

D.3.2.3. SILIN di Area PBPH-HA

Pelaksanaan SILIN di area PBPH-HA berdasarkan skenario pada Tabel 32 adalah mencapai 922.131 ha. Seperti halnya RIL-C, pelaksanaan SILIN di PBPH-HA diprioritaskan pada areal IPL tinggi pada tahun 2023-2024 dan pada areal IPL rendah dapat dilakukan setelah tahun 2024. Rincian luas areal untuk pelaksanaan SILIN di PBPH-HA tahun 2023-2030 pada IPL3-7 disajikan pada Tabel 73, sedangkan sebaran area untuk pelaksanaannya menurut konsesi disajikan pada Tabel 73-78.

TABEL 73. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan SILIN di Area PBPH-HA Tahun 2022-2030 Menurut IPL

Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan (ha)[1]	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sub Total IPL 8	9	9	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 7	36.814	9.207	7.362	3.681	1.841	5.522	3.681	3.681	1.841
Sub Total IPL 6	190.578	48.346	38.573	19.540	10.024	27.786	18.524	18.524	9.262
Sub Total IPL 5	399.021	101.570	81.337	41.465	21.529	57.420	38.280	38.280	19.140
Sub Total IPL 4*	34.343	12.020	10.303	6.869	5.151	12.020	10.303	6.869	5.151
Sub Total IPL 3*	261.340	91.469	78.402	52.268	39.201	91.469	78.402	52.268	39.201
Total SILIN pada PBPH-HA	922.104	262.612	215.977	123.823	77,746	194.216	149.190	119.621	74.595
Kumulatif SILIN pada PBPH-HA		159.131	286.402	351.089	384.482	578.698	727.888	847.509	922.104

KETERANGAN: [1]Total Volume Kegiatan Tahun 2023-2024. *Pelaksanaan RIL-C pada areal IPL 3-4 dilakukan hanya 50% dari luas.
SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 74. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 8

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat	Ketapang	PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa	9	9	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL IPL 8			9	9	-	-	-	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 75. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Riau			4.698								
	Indragiri Hilir	PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Rokan Hilir & Kota Dumai	PT. Diamond Raya Timber	4.696	1.176	939	469	235	704	469	469	235
Kalimantan Timur	Kutai Timur & Kutai Kartanegara	PT. Melapi Timber	8.540	2.136	1.708	854	428	1.282	854	854	428
Kalimantan Utara	Malinau	PT. Permata Borneo Abadi	23.576	5.894	4.715	2.358	1.179	3.536	2.358	2.358	1.179
SUB TOTAL IPL 7			36.814	9.207	7.362	3.681	1.841	5.522	3.681	3.681	1.841

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 76. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Selatan			83.139								
	Tabalong	PT. Aya Yayang Indonesia	51.646	12.912	10.329	5.165	2.582	7.747	5.165	5.165	2.582
	Tabalong	PT. Hasnur Jaya Utama	730	256	219	146	110	-	-	-	-
	Kotabaru	PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut)	4.277	1.069	855	428	214	642	428	428	214
	Kotabaru & Tanahbumbu	PT. Kodeco Timber	26.486	6.621	5.297	2.649	1.324	3.973	2.649	2.649	1.324

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Tengah			19.437								
	Kapuas & Gunungmas	PT. Agromas Kencana Abadi	303	152	70	46	35	-	-	-	-
	Barito Timur & Barito Selatan	PT. Aya Yayang Indonesia	4.130	1.094	888	475	268	527	352	352	176
	Kotawaringin Timur, Katingan & Seruyan	PT. Berkat Cahaya Timber	2.024	566	441	242	141	238	159	159	79
	Gunungmas & Kapuas	PT. Bumimas Permata Abadi	386	135	116	77	58	-	-	-	-
	Katingan	PT. Graha Sentosa Permai	912	319	274	182	137	-	-	-	-
	Barito Selatan & Barito Timur	PT. Hasnur Jaya Utama	8.670	2.168	1.734	867	434	1.301	867	867	434
	Katingan	PT. Hutan Mulya	544	190	163	109	82	-	-	-	-
	Katingan	PT. Kayu Waja	293	103	88	59	44	-	-	-	-
	Katingan & Seruyan	PT. Meranti Mustika	1.233	326	264	142	80	158	106	106	53
	Kapuas & Murungraya	PT. Pandujaya Gemilang Agung	159	159	-	-	-	-	-	-	-
	Katingan & Gunungmas	PT. Rinanda Inti Lestari	783	276	234	156	117	-	-	-	-
Kalimantan Timur			88.002								
	Kutai Barat & Kutai Kartanegara	PT. Triwiraasta Barata	22.302	5.577	4.460	2.230	1.115	3.345	2.230	2.230	1.115
	Kutai Timur	PT. Kiani Lestari	61.289	15.322	12.258	6.129	3.064	9.193	6.129	6.129	3.064
	Kutai Timur	PT. Nadila Indodaya	4.409	1.102	882	441	220	661	441	441	220
SUB TOTAL IPL 6			190.578	48.346	38.573	19.540	10.024	27.786	18.524	18.524	9.262

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 77. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat			29.520								
	Kapuas Hulu	PT. Bhakti Dwipa Kariza	5.204	1.301	1.041	520	260	781	520	520	260
	Kuburaya	PT. Bina Ovivipari Semesta	532	186	160	106	80	-	-	-	-
	Kuburaya	PT. Kandelia Alam	4.429	1.107	886	443	221	664	443	443	221
	Ketapang	PT. Sari Bumi Kusuma (Unit I dan II)	38	38	-	-	-	-	-	-	-
	Kapuas Hulu	PT. Toras Banua Sukses	19.317	4.829	3.863	1.932	966	2.898	1.932	1.932	966
Kalimantan Selatan	Tabalong	PT. Trisetia Citagraha	215	75	65	43	32	-	-	-	-
Kalimantan Tengah			316.768								
	Murungraya	PT. Agathis Alam Indonesia	491	172	147	98	74	-	-	-	-
	Lamandau	PT. Amprah Mitra Jaya	2.394	599	479	239	120	359	239	239	120
	Barito Utara & Murungraya	PT. Austral Byna	87.722	21.937	17.543	8.771	4.386	13.157	8.771	8.771	4.386
	Barito Utara & Murungraya	PT. Barito Putera	11.848	3.038	2.446	1.261	669	1.663	1.108	1.108	554
	Barito Utara	PT. Bina Multi Alam	369	129	111	74	55				
	Gunungmas & Katingan	PT. Carus Indonesia	3.093	792	638	328	173	436	290	290	145
	Seruyan & Kotawaringin Barat	PT. Central Kalimantan Abadi	267	96	79	53	39	-	-	-	-
	Kapuas & Barito Utara	PT. Dasa Intiga	758	289	216	144	108	-	-	-	-
	Katingan & Gunungmas	PT. Dwima Jaya Utama	2.253	761	761	731	-	-	-	-	-
	Gunungmas	PT. East Point Indonesia	929	325	279	186	139	-	-	-	-
	Kotawaringin Barat & Seruyan	PT. Erythrina Nugraha Megah	845	323	241	161	120	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Murungraya & Barito Utara	PT. Fortuna Cipta Sejahtera	558	212	160	106	80	-	-	-	-
	Kapuas & Murungraya	PT. Gunung Meranti	10.829	2.707	2.166	1.083	541	1.625	1.083	1.083	541
	Gunungmas	PT. Hasil Kalimantan Jaya	573	201	172	115	86				
	Gunungmas	PT. Hutan Domas Raya	6.742	1.686	1.348	674	337	1.011	674	674	337
	Seruyan & Kotawaringin Barat	PT. Hutani Lestari Raya Timber	7.271	1.836	1.472	745	381	1.064	710	710	355
	Barito Utara	PT. Indexim Utama Corp.	48.936	12.234	9.787	4.894	2.447	7.340	4.894	4.894	2.447
	Kotawaringin Barat & Seruyan	PT. Intrado Jaya Intiga	386	135	116	77	58	-	-	-	-
	Barito Utara	PT. Joloy Mosak	52	52	-	-	-	-	-	-	-
	Murungraya, Gunungmas & Kapuas	PT. Kahayan Terang Abadi	6.406	1.659	1.338	698	379	875	583	583	292
	Lamandau, Seruyan & Kotawaringin Barat	PT. Karda Trades	2.824	734	593	311	170	381	254	254	127
	Murungraya	PT. Karya Delta Permai	3.540	885	708	354	177	531	354	354	177
	Murungraya	PT. Kayu Ara Jaya Raya	1.968	492	394	197	98	295	197	197	98
	Kotawaringin Timur & Katingan	PT. Kayu Tribuana Rama	846	310	248	165	124	-	-	-	-
	Barito Utara	PT. Lestari Damai Indah Timber	3.775	944	755	378	189	566	378	378	189
	Murungraya	PT. Menorah Loggingindo	1.298	325	260	130	65	195	130	130	65
	Murungraya	PT. Mitra Perdana Palangka	357	125	107	71	54	-	-	-	-
	Murungraya	PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera	9.370	2.343	1.874	937	469	1.406	937	937	469

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Murungraya	PT. Pemantang Abaditama	3.910	978	782	391	196	587	391	391	196
	Kapuas	PT. Praba Nugraha Technology	822	288	247	164	123	-	-	-	-
	Murungraya & Kapuas	PT. Rangau Abdinusa	269	116	71	47	35	-	-	-	-
	Murungraya	PT. Samudera Rejeki Perkasa	4.161	1.040	832	416	208	624	416	416	208
	Murungraya	PT. Sarang Sapta Putra	679	238	204	136	102	-	-	-	-
	Lamandau, Katingan & Seruyan	PT. Sari Bumi Kusuma (Unit I dan II)	4.359	1.264	1.045	610	391	394	263	263	131
	Kotawaringin Timur, Katingan & Seruyan	PT. Sarmiento Parakanca Timber	3.115	841	685	373	218	375	250	250	125
	Barito Selatan & Barito Utara	PT. Sindo Lumber	35.443	8.861	7.089	3.544	1.772	5.316	3.544	3.544	1.772
	Barito Selatan, Barito Utara & Kapuas	PT. Sinergi Hutan Sejati	1.113	390	334	223	167	-	-	-	-
	Gunungmas	PT. Sikatan Wana Raya	1.079	270	216	108	54	162	108	108	54
	Murungraya	PT. Taman Raja Persada	1.912	478	382	191	96	287	191	191	96
	Barito Selatan & Kapuas	PT. Tingang Karya Mandiri	767	268	230	154	115	-	-	-	-
	Barito Selatan & Barito Utara	PT. Trisetia Citagraha	17.168	4.292	3.433	1.717	859	2.575	1.717	1.717	859
	Lamandau & Kotawaringin Barat	PT. Trisetia Intiga	1.433	360	286	143	72	215	143	143	72
	Barito Utara & Murungraya	PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	23.838	5.971	4.780	2.395	1.203	3.558	2.372	2.372	1.186
			49.379								

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kutai Barat	PT. Austral Byna	31	31	-	-	-	-	-	-	-
	Kutai Barat, Paser & Penajampaser Utara	PT. Balikpapan Wana Lestari	21.335	5.354	4.287	2.152	1.087	3.171	2.113	2.113	1.057
	Kutai Barat	PT. Barito Putera	4.791	1.198	958	479	240	719	479	479	240
	Kutai Kartanegara, Paser & Penajampaser Utara	PT. Itci Kartika Utama	17.471	4.368	3.494	1.747	874	2.621	1.747	1.747	874
	Kutai Timur	PT. Oceanis Timber Product	2.477	619	495	248	124	372	248	248	124
	Kutai Barat	PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	3.274	819	655	327	164	491	327	327	164
Sumatera Utara	Dairi, Karo & Langkat	PT. Mulyakarya Jayaco	3.139	799	643	328	170	449	300	300	149
SUB TOTAL IPL 5			399.021	101.570	81.337	41.465	21.529	57.420	38.280	38.280	19.140

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 78. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur			55.665								
	Kutai Barat	PT. Rimba Karya Rayatama	30.948	-	-	-	-	3.250	2.785	1.857	1.393
	Kutai Timur	PT. Borneo Karya Indah Mandiri	10.724	-	-	-	-	1.126	965	643	483
	Paser	PT. Rizki Kacida Reana	12.173	-	-	-	-	1.278	1.096	730	548
Maluku	Maluku Tengah	PT. Waroeng Batok Industries	36.085	-	-	-	-	3.789	3.248	2.165	1.624
Papua Barat	Telukbintuni	PT. Wana Galang Utama	24.545	-	-	-	-	2.577	2.209	1.473	1.105
SUB TOTAL IPL 4			34.343	-	-	-	-	12.020	10.303	6.869	5.151

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 79. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Tengah	Barito Utara	PT. Timber Dana	11.021	771	661	441	331	771	661	441	331
Kalimantan Timur			994.121								
	Berau	PT. Aditya Kirana Mandiri	13.238	927	794	530	397	927	794	530	397
	Berau	PT. Inhutani I (Unit Labanan)	74.388	5.207	4.463	2.976	2.232	5.207	4.463	2.976	2.232
	Berau	PT. Inhutani I Unit Sambarata	82.761	5.793	4.966	3.310	2.483	5.793	4.966	3.310	2.483
	Berau	PT. Inhutani I Unit Segah Hulu	10.878	761	653	435	326	761	653	435	326
	Berau	PT. Mardhika Insan Mulia (Unit Labanan)	15.222	1.066	913	609	457	1.066	913	609	457
	Berau	PT. Puji Sampurna Raharja	14.498	1.015	870	580	435	1.015	870	580	435
	Berau	PT. Rizki Kacida Reana (SK 60)	19.089	1.336	1.145	764	573	1.336	1.145	764	573
	Berau	PT. Sumalindo Lestari Jaya IV	45.770	3.204	2.746	1.831	1.373	3.204	2.746	1.831	1.373
	Kutai Barat	CV Pari Jaya Makmur	10.963	767	658	439	329	767	658	439	329
	Kutai Barat	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam	17.321	1.212	1.039	693	520	1.212	1.039	693	520

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kutai Barat	PT. Dewata Wanatama Lestari (DH. PT. Dharma Putera)	12.142	850	729	486	364	850	729	486	364
	Kutai Barat	PT. Harapan Kaltim Lestari	36.905	2.583	2.214	1.476	1.107	2.583	2.214	1.476	1.107
	Kutai Barat	PT. Kemakmuran Berkah Timber	54.493	3.815	3.270	2.180	1.635	3.815	3.270	2.180	1.635
	Kutai Barat	PT. Rimba Karya Rayatama (SK 384-Malinau)	15.060	1.054	904	602	452	1.054	904	602	452
	Kutai Barat	PT. Rodamas Tbr Kalimantan	37.996	2.660	2.280	1.520	1.140	2.660	2.280	1.520	1.140
	Kutai Barat	PT. Sumalindo Lestari Jaya II	47.428	3.320	2.846	1.897	1.423	3.320	2.846	1.897	1.423
	Kutai Barat	PT. Sumalindo Lestari Jaya V	33.828	2.368	2.030	1.353	1.015	2.368	2.030	1.353	1.015
	Kutai Barat	PT. Timber Dana	38.255	2.678	2.295	1.530	1.148	2.678	2.295	1.530	1.148
	Kutai Kartanegara	KUD Beringin Mulya	20.971	1.468	1.258	839	629	1.468	1.258	839	629
	Kutai Kartanegara	PT. Barito Nusantara Indah	62.989	4.409	3.779	2.520	1.890	4.409	3.779	2.520	1.890
	Kutai Kartanegara	PT. Belayan River Timber	47.560	3.329	2.854	1.902	1.427	3.329	2.854	1.902	1.427
	Kutai Kartanegara & Kutai Barat	PT. Jaya Timber Trading Industri	43.386	3.037	2.603	1.735	1.302	3.037	2.603	1.735	1.302
	Kutai Kartanegara	PT. Mutiara Kalja Permai (SK.506)	15.853	1.110	951	634	476	1.110	951	634	476
	Kutai Kartanegara	PT. Mutiara Kalja Permai (SK.553)	62.740	4.392	3.764	2.510	1.882	4.392	3.764	2.510	1.882

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Paser	PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai	23.680	1.658	1.421	947	710	1.658	1.421	947	710
	Paser	PT. Telagamas Kalimantan Company	75.647	5.295	4.539	3.026	2.269	5.295	4.539	3.026	2.269
Kalimantan Utara			234.623								
	Bulungan		158.800								
		PT. Inhutani I Unit Sambarata	12.580	881	755	503	377	881	755	503	377
		PT. Inhutani I Unit Segah Hulu	12.165	852	730	487	365	852	730	487	365
		PT. Itci Kayan Hutani	113.819	7.967	6.829	4.553	3.415	7.967	6.829	4.553	3.415
		PT. Rizki Kacida Reana (SK 60)	17.025	1.192	1.022	681	511	1.192	1.022	681	511
	Malinau	PT. Sumalindo Lestari Jaya II	68.362	4.785	4.102	2.734	2.051	4.785	4.102	2.734	2.051
Maluku Utara	Halmahera Utara	PT. Nusa Niwe Indah	12.619	883	757	505	379	883	757	505	379
Papua Barat	Fak-fak & Kaimana	PT. Hanurata	40.012	2.801	2.401	1.600	1.200	2.801	2.401	1.600	1.200
Sumatera Utara			110.290								
	Nias Selatan		75.360								
		PT. Gunung Raya Utama Timber	48.500	3.395	2.910	1.940	1.455	3.395	2.910	1.940	1.455
		PT. Teluk Nauli	26.860	75,6	1.612	1.074	806	1.880	1.612	1.074	806
	Padanglawas	PT. Barumun Raya Padang Langkat	10.674	747	640	427	320	747	640	427	320
SUB TOTAL IPL 3			261.340	91.469	78.402	52.268	39.201	91.469	78.402	52.268	39.201

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

D.3.2.4. SILIN di Area PBPH-HT

Pelaksanaan SILIN di area PBPH-HT di tahun 2023 dan 2024 dilakukan pada area PBPH-HT dengan IPL 5-9. Selain itu, implementasi pada tahun 2024, juga mengikutisertakan area dengan IPL 3 meskipun hanya dilakukan pada sebagian lokasi sesuai dengan skenario yang telah dibangun yang diterapkan pada lokasi PBPH yang luasannya di atas 10.000 dan 100.000 ha. Rincian luas areal untuk pelaksanaan SILIN di PBPH-HA tahun 2023-2030 pada IPL3-7 disajikan pada Tabel 80, sedangkan sebaran area untuk pelaksanaannya menurut konsesi disajikan pada Tabel 81-86.

TABEL 80. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan SILIN di Area PBPH-HT Tahun 2022-2030 Menurut IPL

Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sub Total IPL 9	1.411	953	458	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 8	10.984	9.110	1.874	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 7	48.301	2.635	1.756	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 6	150.690	63.126	56.422	17.301	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 5	142.746	60.247	50.203	17.943	14.354	-	-	-	-
Sub Total IPL 4	262.454	-	-	89.091	70.905	64.281	38.177	-	-
Sub Total IPL 3	169.876	-	21.948	21.948	49.211	41.124	35.645	-	-
Rekap SILIN pada Area PBPH-HT	786.462	165.755	146.887	146.281	148.311	105.406	73.822	-	-
Luas pada Tahun 2024 dan 2030			312.642						786.462
Kumulatif		165.755	312.642	458.923	607.234	712.640	786.462	786.462	786.462

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 81. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 9

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi	Batanghari	PT BUMI PERSADA PERMAI (SK 688)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	PT ACASIA ANDALAN UTAMA (SK 87)	1.144	686	458	-	-	-	-	-	-
	Kutai Kartanegara	PT SURYA HUTANI JAYA	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	Musibanyuasin	PT BUMI PERSADA PERMAI (SK 688)	260	260	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 9			1.411	953	458	-	-	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 82. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 8

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat			5.234								
	Ketapang	PT BUANA MEGATAMA JAYA	897	897	-	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI (DH. KERTAS BASUKI R)	606	606	-	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT INDO PUTRA BERSAMA	492	492	-	-	-	-	-	-	-
	Sanggau & Landak	PT LAHAN SUKSES	989	989	-	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI (SK 227)	227	227	-	-	-	-	-	-	-
	Kuburaya	PT MENGGALA RAMBU UTAMA	1.835	1.101	734	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA	150	150	-	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT NUSANTARA KALIMANTAN LESTARI (D/H PT GARUDA KL)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Kuburaya, Landak & Sanggau	PT SINAR KALBAR RAYA	32	32	-	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT WANAKERTA EKALESTARI	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah			1.980								
	Seruyan	PT BARATAMA PUTRA PERKASA	6	6	-	-	-	-	-	-	-
	Kotawaringin Timur & Katingan	PT BUKIT BERINGIN MAKMUR	435	435	-	-	-	-	-	-	-
	Seruyan	PT KASIH HUTAN INDONESIA LESTARI	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	Kotawaringin Barat & Lamandau	PT KORINTIGA HUTANI	1.319	791	528	-	-	-	-	-	-
	Lamandau	PT PANCARAN WANA NUSA	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Gunungmas	PT PUSPAWARNA CEMERLANG	130	130	-	-	-	-	-	-	-

	Kotawaringin Timur	PT RIMBA ARGAMAS	22	22	-	-	-	-	-	-	-
	Barito Utara & Murungraya	PT RIMBA BERLIAN HIJAU	13	13	-	-	-	-	-	-	-
	Seruyan	PT RIMBUN SERUYAN	41	41	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur			1.303								
	Penajampaser Utara	PT BELANTARA SUBUR	695	695	-	-	-	-	-	-	-
	Kutai Kartanegara	PT DHARMA HUTANI MAKMUR	608	608	-	-	-	-	-	-	-
Riau			433								
	Pelalawan	PT BUKIT RAYA PELALAWAN	40	40	-	-	-	-	-	-	-
	Kampar	PT PERAWANG SUKSES PERKASA	393	393	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan			2.034								
	Ogan Komering Ilir	PT BUMI ANDALAS PERMAI	1.531	919	612	-	-	-	-	-	-
	Ogan Komering Ilir	PT BUMI MEKAR HIJAU	63	63	-	-	-	-	-	-	-
	Banyuasin & Musibanyuasin	PT RIMBA HUTANI MAS (SUMSEL)	158	158	-	-	-	-	-	-	-
	Banyuasin	PT SUMBER HIJAU PERMAI	282	282	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 8			10.984	9.110	1.874	-	-	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

Tabel 83. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi	Tebo	PT LESTARI ASRI JAYA	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat			9.545								
	Ketapang	PT ASIA TANI PERSADA	375	375	-	-	-	-	-	-	-
	Pontianak	PT BHATARA ALAM LESTARI	748	748	-	-	-	-	-	-	-
	Kuburaya & Ketapang	PT DAYA TANI KALBAR	1.643	986	657	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Landak & Bengkayang	PT DUTA BINTANG GEMILANG	1.344	806	538	-	-	-	-	-	-
	Bengkayang	PT INDADI VERYO	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	Melawi	PT INHUTANI III NANGAPINAH	3.745	2.247	1.498	-	-	-	-	-	-
	Ketapang & Sekadau	PT PRIMA BUMI SENTOSA	580	580	-	-	-	-	-	-	-
	Melawi & Sintang	PT RIMBA EQUATOR PERMAI	1.103	662	441	-	-	-	-	-	-
	Kuburaya	PT WANA SUBUR LESTARI (DH. SARI BUMI KUSUMA)	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	Tabalong	PT TRIKORINDOTAMA WANAKARYA	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah			685			-	-	-	-	-	-
	Kotawaringin Timur	PT CERIA KARYA PRANAWA	103	103	-	-	-	-	-	-	-
	Kotawaringin Barat	PT E-GREENDO	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	Barito Selatan	PT PARWATA RIMBA	93	93	-	-	-	-	-	-	-
	Barito Utara	PT PURWA PERMAI	443	443	-	-	-	-	-	-	-
	Gunungmas	PT RAMBA ARYA CITRA	21	21	-	-	-	-	-	-	-
	Seruyan	PT RIMBA ELOK	13	13	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur			27.063								
	Penajampaser Utara & Paser	PT FAJAR SURYA SWADAYA	1.327	796	531	-	-	-	-	-	-
	Kutai Kartanegara	PT HUTAN KUSUMA	914	914	-	-	-	-	-	-	-
	Penajampaser Utara, Kutai Kartanegara & Kota Balikpapan	PT INHUTANI I BATUAMPAR - MENTAWIR	2.653	1.592	1.061	-	-	-	-	-	-
	Kutai Barat	PT INHUTANI I MELAK	379	379	-	-	-	-	-	-	-
	Penajampaser Utara & Kutai Kartanegara	PT ITCI HUTANI MANUNGGAL	836	836	-	-	-	-	-	-	-
	Kutai Barat	PT KELAWIT WANA LESTARI I	2.816	1.690	1.126	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kutai Timur	PT MULTI KUSUMA CEMERLANG (D/H BARITO PACIFIC)	669	669	-	-	-	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT PERMATA BORNEO ABADI	8.392	5.035	3.357	-	-	-	-	-	-
	Kutai Kartanegara	PT SENDAWAR ADHI KARYA	7.922	4.753	3.169	-	-	-	-	-	-
	Berau	PT SUMALINDO ALAM LESTARI I (D/H SUMALINDO LJ I)	323	323	-	-	-	-	-	-	-
	Kutai Kartanegara & Kota Bontang	PT SUMALINDO HUTANI JAYA II	832	832	-	-	-	-	-	-	-
Riau			5.827								
	Siak, Pelalawan & Bengkalis	PT ARARA ABADI	1.611	967	644	-	-	-	-	-	-
	Indragiri Hilir	PT BINA DUTA LAKSANA	11	11	-	-	-	-	-	-	-
	Pelalawan	PT MERBAU PELALAWAN LESTARI	160	160	-	-	-	-	-	-	-
	Pelalawan	PT MITRA TANI NUSA SEJATI	11	11	-	-	-	-	-	-	-
	Pelalawan	PT NUSA WANA RAYA	251	251	-	-	-	-	-	-	-
	Kampar	PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (D/H SIAK RAYA TBR)	453	453	-	-	-	-	-	-	-
	Kepulauan Meranti	PT PERKASA BARU	14	14	-	-	-	-	-	-	-
	Siak, Kampar, Pelalawan & Kuantan Singingi	PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	3.009	1.805	1.204	-	-	-	-	-	-
	Bengkalis	PT SUMATERA RIANG LESTARI	307	307	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan			782								
	Musirawas	PT BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA	68	68	-	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Empat Lawang, Lahat & Ogan Komering Ulu Timur	PT MUSI HUTAN PERSADA	661	661	-	-	-	-	-	-	-
	Musibanyuasin	PT WAHANA AGRO MULIA	53	53	-	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan & Padanglawas	PT SUMATERA RIANG LESTARI	4.391	2.635	1.756	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 7			48.301	32.319	15.982	-	-	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 84. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi			13.017								
	Sarolangun & Batanghari	PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA	454	-	454	-	-	-	-	-	-
	Sarolangun	PT ALAM LESTARI NUSANTARA (D/H PT BUKIT KAUSAR)	83	-	83	-	-	-	-	-	-
	Sarolangun	PT BUMI PERSADA PERMAI (SK 79)	9	-	9	-	-	-	-	-	-
	Sarolangun	PT GADING KARYA MAKMUR	1.020	612	408	-	-	-	-	-	-
	Merangin & Sarolangun	PT HIJAU ARTHA NUSA	393	-	393	-	-	-	-	-	-
	Merangin	PT JEBUS MAJU	255	-	255	-	-	-	-	-	-
	Batanghari & Tebo	PT LIMBAH KAYU UTAMA	319	-	319	-	-	-	-	-	-
	Bungo	PT MALAKA AGRO PERKASA	822	-	822	-	-	-	-	-	-
	Bungo	PT MUGITRIMAN INTERNATIONAL	763	-	763	-	-	-	-	-	-
	Batanghari	PT RIMBA TANAMAN INDUSTRI	130	-	130	-	-	-	-	-	-
	Sarolangun	PT SAMHUTANI	199	-	199	-	-	-	-	-	-
	Batanghari	PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA	7	-	7	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Batanghari	PT WANA PERINTIS	73	-	73	-	-	-	-	-	-
	Sarolangun	PT WANAKASITA NUSANTARA	23	-	23	-	-	-	-	-	-
	Tanjungjabung Barat, Batanghari, Tanjungjabung Timur, Tebo & Muarojambi	PT WIRA KARYA SAKTI	8.467	5.080	3.387	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat			29.221								
	Sanggau	PT DUTA ANDALAN SUKSES	5.955	3.573	2.382	-	-	-	-	-	-
	Sekadau, Sintang & Sekadau	PT FINNANTARA INTIGA	4.418	2.651	1.767	-	-	-	-	-	-
	Sanggau & Landak	PT GAMBARU SELARAS ALAM	74	-	74	-	-	-	-	-	-
	Kapuas Hulu	PT LEMBAH JATIMUTIARA	4.417	2.650	1.767	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT MAHKOTA RIMBA UTAMA	1.297	778	519	-	-	-	-	-	-
	Ketapang, Sanggau & Kuburaya	PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI (SK 480)	2.996	1.798	1.198	-	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT MAYAWANA PERSADA	828	-	828	-	-	-	-	-	-
	Melawi	PT MERANTI LAKSANA	832	-	832	-	-	-	-	-	-
	Landak & Bengkayang	PT NITIYASA IDOLA	1.848	1.109	739	-	-	-	-	-	-
	Melawi	PT SEGAH BANGUN PERSADA	237		237	-	-	-	-	-	-
	Sanggau	PT SUVARNABHUMI RIMBA HIJAU	5.692	3.415	2.277	-	-	-	-	-	-
	Sekadau & Sanggau	PT WANA SUBUR PERSADA	627	-	627	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan			31.944								
	Tabalong	PT AYA YAYANG INDONESIA	817	-	817	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tanahbumbu, Kotabaru, Banjar & Tanahlaut	PT HUTAN RINDANG BANUA	26.044	7.813	6.511	6.511	5.209	-	-	-	-
	Kotabaru	PT INHUTANI II TANAH GROGOT	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Tabalong	PT JENGGALA SEMESTA	1.728	1.037	691	-	-	-	-	-	-
	Kotabaru	PT KODECO TIMBER	2.427	1.456	971	-	-	-	-	-	-
	Balangan	PT WANA DIPA PERKASA	927	-	927	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah			7.656								
	Katingan	PT BALANGAN INDAH LESTARI	305	-	305	-	-	-	-	-	-
	Barito Timur	PT BORNEO GREEN LESTARI	111	-	111	-	-	-	-	-	-
	Kapuas	PT HIJAU LESTARI MAKMUR	220	-	220	-	-	-	-	-	-
	Barito Utara	PT HUTAN MAHLIGAI	17	-	17	-	-	-	-	-	-
	Barito Utara	PT MERANTI SEMBADA	3.406	2.044	1.362	-	-	-	-	-	-
	Barito Selatan	PT NUSA LESTARI INDAH	1.452	871	581	-	-	-	-	-	-
	Barito Utara & Kapuas	PT PERINTIS ADIWANA	441	-	441	-	-	-	-	-	-
	Murungraya	PT POLA INTI RIMBA	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	Katingan	PT PUNDIWANA SEMESTA	34	-	34	-	-	-	-	-	-
	Pulangpisau	PT RAMANG AGRO LESTARI	1.665	999	666	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur			60.871								
	Kutai Kartanegara	PT BAKAYAN JAYA ABADI	1.877	1.126	751	-	-	-	-	-	-
	Berau	PT BELANTARA PUSAKA	256	-	256	-	-	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT BUANA INTI ENERGI	81	-	81	-	-	-	-	-	-
	Kutai Barat	PT HUTAN MAHLIGAI	3.611	2.167	1.444	-	-	-	-	-	-
	Paser	PT INHUTANI II TANAH GROGOT	2.069	1.241	828	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kutai Barat	PT KELAWIT HUTANI LESTARI	2.034	1.220	814	-	-	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT KELAWIT WANA LESTARI II	11.962	3.589	2.991	2.991	2.392	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT SANTAN BORNEO ABADI	331	-	331	-	-	-	-	-	-
	Kutai Kartanegara & Kutai Barat	PT SILVA RIMBA LESTARI	31.197	9.359	7.799	7.799	6.239	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT SILVA SELARAS UTAMA	1.941	1.165	776	-	-	-	-	-	-
	Kutai Barat	PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES	5.512	3.307	2.205	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan			7.981								
	Musibanyuasin	PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Musibanyuasin	PT BUMI PERSADA PERMAI (SK 79)	1.545	927	618	-	-	-	-	-	-
	Musirawas	PT ESA YASA DINAMIKA	513	-	513	-	-	-	-	-	-
	Musirawas	PT GADING KARYA MAKMUR	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	Musibanyuasin	PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA	5.232	3.139	2.093	-	-	-	-	-	-
	Banyuasin	PT TRI PUPAJAYA	678		678	-	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 6			150.690	63.126	56.422	17.301	13.841	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 85. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bangka-belitung			14.989								
	Belitung, Bangka & Bangka Tengah	PT AGRO PRATAMA SEJAHTERA	7.164	4.298	2.866	-	-	-	-	-	-
	Belitung Timur	PT ANDALAN KARYA PERTIWI	6.671	4.003	2.668	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Bangka Selatan & Bangka Tengah	PT BANGKANESIA	1.154	692	462	-	-	-	-	-	-
Jambi			554								
	Tebo	PT ARANGAN HUTANI LESTARI	17	-	17	-	-	-	-	-	-
	Tanjungjabung Barat & Batanghari	PT RIMBA HUTANI MAS (JAMBI)	537	-	537	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat			13.787								
	Sanggau & Ketapang	PT BANGUN ALAM INDONESIA	18	-	18	-	-	-	-	-	-
	Sintang	PT BOMA PLANTATION	3.931	2.359	1.572	-	-	-	-	-	-
	Pontianak & Bengkayang	PT BUMIMAS ALAM MAKMUR	1.424	854	570	-	-	-	-	-	-
	Landak & Sanggau	PT GAPURA PERSADA KATULISTIWA	1.584	950	634	-	-	-	-	-	-
	Kapuas Hulu	PT KAYNA RESOURCES	1.077	646	431	-	-	-	-	-	-
	Melawi	PT KUSUMA PUSPAWANA	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	Melawi	PT LAHAN CAKRAWALA	296	-	296	-	-	-	-	-	-
	Sintang	PT MITRA JAYA NUSAINDAH	1.257	754	503	-	-	-	-	-	-
	Kapuas Hulu	PT SINAR MAKMUR DWISESA	160	-	160	-	-	-	-	-	-
	Sintang	PT UNGGUL KARYA INTI JAYA	2.728	1.637	1.091	-	-	-	-	-	-
	Sanggau & Sekadau	PT WANA LESTARI JAYA	1.192	715	477	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan			21.051								
	Banjar	PT DWIMA INTIGA	28	-	28	-	-	-	-	-	-
	Tabalong	PT HUTAN SEMBADA	1.774	1.064	710	-	-	-	-	-	-
	Kotabaru	PT INHUTANI II UNIT P. LAUT (SEMARAS)	9.957	5.974	3.983	-	-	-	-	-	-
	Banjar	PT INHUTANI III (EKS PT.INHUTANI III RIAM KIWA)	85	-	85	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tanahbumbu	PT INNI JOA	3.897	2.338	1.559	-	-	-	-	-	-
	Banjar	PT PRIMA BUWANA LESTARI	2.483	1.490	993	-	-	-	-	-	-
	Banjar	PT PRIMA MULTI BUANA	2.827	1.696	1.131	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah			7.041								
	Gunungmas & Katingan	PT AGRO BORNEO LESTARI	200	-	200	-	-	-	-	-	-
	Kapuas	PT BABUGUS WAHANA LESTARI	501	-	501	-	-	-	-	-	-
	Katingan & Kota Palangkaraya	PT BORNEO SUBUR AGRO	1.020	612	408	-	-	-	-	-	-
	Kapuas & Gunungmas	PT BUMI HIJAU PRIMA	623	-	623	-	-	-	-	-	-
	Lamandau	PT GRACE PUTRI PERDANA	168	-	168	-	-	-	-	-	-
	Kapuas	PT HUTAN PRODUKSI LESTARI	18	-	18	-	-	-	-	-	-
	Kapuas	PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION	2.813	1.688	1.125	-	-	-	-	-	-
	Pulangpisau, Kapuas & Gunungmas	PT KALTENG GREEN RESOURCES	380	-	380	-	-	-	-	-	-
	Kota Palangkaraya & Gunungmas	PT LANGGENG BAKTI PERSADA	728	-	728	-	-	-	-	-	-
	Gunungmas	PT TAIYOUNG ENGREEN	383	-	383	-	-	-	-	-	-
	Kapuas	PT WOYLA RAYA ABADI	207	-	207	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur			46.346								
	Kutai Barat	PT BORNEO KUTAI LESTARI	7.279	4.367	2.912	-	-	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT CAHAYA MITRA WIRATAMA	333		333	-	-	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT DIVA PERDANA PESONA	12.382	3.715	3.096	3.096	2.476	-	-	-	-
	Berau	PT HARBI KARYA PERKASA	51	-	51	-	-	-	-	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kutai Timur	PT SUMALINDO ALAM LESTARI II (D/H SUMALINDO LJ II)	42	-	42	-	-	-	-	-	-
	Berau	PT TANJUNG REDEB HUTANI	26.259	7.878	6.565	6.565	5.252	-	-	-	-
Kalimantan Utara	Bulungan	PT TANJUNG REDEB HUTANI	2.375	1.425	950	-	-	-	-	-	-
Maluku	Buru	PT SENTOSA PRATAMA	1.919	1.151	768	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	Bima & Kota Bima	PT KOIN NESIA	18.999	5.700	4.750	4.750	3.800	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya & Sumba Barat	PT WONO INDOTANI NIAGA	588	-	588	-	-	-	-	-	-
Riau	Pelalawan	PT NUSA PRIMA MANUNGGAL	193	-	193	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan			563			-	-	-	-	-	-
	Ogan Komering Ulu	PT LANTABURA MENTARI SEJAHTERA	235	-	235	-	-	-	-	-	-
	Ogan Komering Ulu Selatan	PT PARAMITRA MULIA LANGGENG	25	-	25	-	-	-	-	-	-
	Empat Lawang	PT XYLO INDAH PRATAMA	303	-	303	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara			14.341								
	Padanglawas	PT SUMATERA SILVA LESTARI	211	-	211	-	-	-	-	-	-
	Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Tobasamosir, Pakpakbharat, Tapanuli Tengah, Asahan & Tapanuli Selatan	PT TOBA PULP LESTARI Tbk	14.130	4.239	3.533	3.533	2.826	-	-	-	-
Sub Total IPL 5			142.746	60.247	50.203	17.943	14.354	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 85. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aceh	Aceh Timur & Aceh Tamiang	PT RIMBA WAWASAN PERMAI	276	-	-	276	-	-	-	-	-
Bangka-belitung			6.110								
	Bangka Tengah	PT AGRINDO PERSADA LESTARI	3.346	-	-	1.338	1.171	837	-	-	-
	Bangka Barat & Bangka	PT BANGUN RIMBA SEJAHTERA	2.764	-	-	1.106	967	691	-	-	-
Jambi	Merangin	PT DELONIX LESTARI RAYA	47	-	-	47	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat			28.975								
	Landak & Sanggau	PT CITRA MULIA INTI	10.632	-	-	3.190	2.658	2.658	2.126	-	-
	Bengkayang	PT DIAN KAPUAS SEDAYA	1.293	-	-	517	453	323	-	-	-
	Sambas	PT FAJAR WANA LESTARI	12.559	-	-	3.768	3.140	3.140	2.512	-	-
	Melawi & Sintang	PT INHUTANI III SANGGAU	992	-	-	992	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT KUMALA RIMBA LESTARI	1.746	-	-	698	611	437	-	-	-
	Melawi	PT MERANTI LESTARI	450	-	-	450	-	-	-	-	-
	Ketapang	PT WANA HIJAU PESAGUAN	1.303	-	-	521	456	326	-	-	-
Kalimantan Selatan			18.748								
	Tanahbumbu, Banjar & Tanahlaut	PT BATULICIN BUMI BERSUJUD	11.011	-	-	3.303	2.753	2.753	2.202	-	-
	Tanahbumbu & Kotabaru	PT JHONLIN AGRO MANDIRI	7.737	-	-	3.095	2.708	1.934	-	-	-
Kalimantan Tengah	Lamandau	PT WANA HIJAU PESAGUAN	28	-	-	28	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur			22.729								
	Berau	PT HUTAN BERAU LESTARI	222	-	-	222	-	-	-	-	-
	Paser	PT JAYA BUMI PASER	16.874	-	-	5.062	4.219	4.219	3.375	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Paser	PT TAMAN DAULAT WANANUSA	5.633	-	-	2.253	1.972	1.408	-	-	-
Kalimantan Utara			58.504								
	Malinau, Nunukan, Tanatidung & Bulungan	PT ADINDO HUTANI LESTARI	39.236	-	-	11.771	9.809	9.809	7.847	-	-
	Tanatidung, Bulungan & Malinau	PT INTRACA HUTANI LESTARI	12.623	-	-	3.787	3.156	3.156	2.525	-	-
	Bulungan	PT KAYAN MAKMUR SEJAHTERA	3.571	-	-	1.428	1.250	893	-	-	-
	Bulungan	PT LENTERA SAWIT MAKMUR	3.074	-	-	1.230	1.076	769	-	-	-
Maluku	Buru & Buru Selatan	PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES	11.162	-	-	3.349	2.791	2.791	2.232	-	-
Maluku Utara			11.395								
	Kepulauan Sula	PT KALPIKA WANATAMA UNIT II	3.725	-	-	1.490	1.304	931	-	-	-
	Halmahera Timur	PT KIRANA CAKRAWALA	7.670	-	-	3.068	2.685	1.918	-	-	-
Nusa Tenggara Barat			6.738								
	Lombok Barat	CV BANGUN PERSADA NUSANTARA	459	-	-	459	-	-	-	-	-
	Dompu & Bima	PT USAHATANI LESTARI (NTB)	6.279	-	-	2.512	2.198	1.570	-	-	-
Papua			85.053								
	Merauke	PT MEDCOPAPUA ALAM LESTARI	36.040	-	-	10.812	9.010	9.010	7.208	-	-
	Merauke	PT PLASMA NUFTAH MARIND PAPUA	8.265	-	-	3.306	2.893	2.066	-	-	-
	Merauke, Mappi & Boven Digoel	PT WANAMULIA SUKSES SEJATI UNIT III	40.748	-	-	12.224	10.187	10.187	8.150	-	-

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan	Waktu Kegiatan							
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sulawesi Barat	Mamuju	PT BIO ENERGI INDOCO	671	-	-	671	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	Maros	PT GITA GUNUNG KEMIRI	19	-	-	19	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah			5.622								
	Banggai	PT BERKAT HUTAN PUSAKA	292	-	-	292	-	-	-	-	-
	Tojounauna	PT INDOKARET	5.330	-	-	2.132	1.866	1.333	-	-	-
Sulawesi Utara	Bolaang-mongondow Selatan	PT KAWANUA KAHURIPAN PANTERA	1.840	-	-	736	644	460	-	-	-
Sumatera Barat			4.508								
	Dharmasraya & Solok Selatan	PT BUKIT RAYA MUDISA	607	-	-	607	-	-	-	-	-
	Dharmasraya	PT DHARA SILVA LESTARI	265	-	-	265	-	-	-	-	-
	Dharmasraya	PT INHUTANI IV (EKS PT RAGUSA)	947	-	-	947	-	-	-	-	-
	Pasaman Barat	PT INKUD AGRITAMA	2.664	-	-	1.066	932	666	-	-	-
	Pesisir Selatan	PT SUKSES JAYA WOOD	25	-	-	25	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	Mandailing Natal	PT INKUD AGRITAMA	29	-	-	29	-	-	-	-	-
Sub Total IPL 4			262.454	-	-	89.091	70.905	64.281	38.177	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 86. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin	Volume Kegiatan (ha)	2023-2026				2027-2030			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aceh			10.139								
	Aceh Besar & Pidie	PT ACEH NUSA INDRAPURI	7.461	-	-	-	2.984	2.611	1.865	-	-
	Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah & Bener Meriah	PT TUSAM HUTANI LESTARI	2.678	-	-	-	1.071	937	670	-	-

Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin	Volume Kegiatan (ha)	2023-2026				2027-2030			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bangka-belitung	Bangka	PT ISTANA KAWI KENCANA	751	-	-	-	751	-	-	-	-
Gorontalo			30.137								
	Gorontalo Utara & Gorontalo	PT GEMA NUSANTARA JAYA	12.288	-	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	-	-
	Gorontalo & Gorontalo Utara	PT GORONTALO CITRA LESTARI	17.849	-	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	-	-
Kalimantan Barat	Melawi	PT ALFA BORNEO LESTARI	898	-	-	-	898	-	-	-	-
Kalimantan Selatan			11.325								
	Banjar & Tanahlaut	PT BORNEO INDO TANI	11.282	-	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	-	-
	Tanahbumbu	PT KIRANA CHATULISTIWA	43	-	-	-	43	-	-	-	-
Kalimantan Timur			21.443								
	Kutai Timur	PT BELANTARA PERSADA	21	-	-	-	21	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT HANUJAYA HUTANINDO	13	-	-	-	13	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT INDOSUBUR SUKSES MAKMUR	144	-	-	-	144	-	-	-	-
	Kutai Timur	PT MAHAKAM PERSADA SAKTI	1.008	-	-	-	403	353	252	-	-
	Paser & Penajampaser Utara	PT MITRA MULIA MAHAKAM	6.945	-	-	-	2.778	2.431	1.736	-	-
	Kutai Barat	PT RIMBA RAYA LESTARI	9.646	-	-	-	3.858	3.376	2.412	-	-
	Berau	PT SURYA MANDALA SEMPURNA	3.663	-	-	-	1.465	1.282	916	-	-
	Berau	PT SWADAYA PERKASA	3	-	-	-	3	-	-	-	-
Maluku Utara			8.150								

Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin	Volume Kegiatan (ha)	2023-2026				2027-2030			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pulau Taliabu & Kepulauan Sula	PT MANGOLE TIMBER PRODUCERS	6.290	-	-	-	2.516	2.202	1.573	-	-
	Halmahera Timur, Halmahera Barat & Kota Tidore Kepulauan	PT NNE PLANTATION	1.860	-	-	-	744	651	465	-	-
Nusa Tenggara Barat			3.110								
	Sumbawa	PT ESA SAMPOERNA AGRO	2.701	-	-	-	1.080	945	675	-	-
	Lombok Timur, Lombok Utara & Lombok Tengah	PT SADHANA ARIFNUSA	409	-	-	-	409	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	Kupang & Sumba Barat	PT USAHA TANI LESTARI (NTT)	16.381	-	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	-	-
Papua	Merauke	PT SELARAS INTI SEMESTA	51.938	-	10.388	10.388	10.388	10.388	10.388	-	-
Sulawesi Barat	Mamuju	PT BARA INDOCO	1.719	-	-	-	688	602	430	-	-
Sulawesi Selatan			5.702								
	Gowa & Maros	PT INHUTANI I (GOWA MAROS)	4.543	-	-	-	1.817	1.590	1.136	-	-
	Maros & Gowa	PT SUMBER ALAM PERTIWI	1.159	-	-	-	464	406	290	-	-
Sulawesi Tengah			1.871								
	Morowali	PT ECOGREEN RESOURCES	1.128	-	-	-	451	395	282	-	-
	Parigimoutong	PT KILAU ALAM LESTARI	743	-	-	-	743	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	Bombana	PT SAMPE WALI	3.990	-	-	-	1.596	1.397	998	-	-
Sumatera Utara			2.322								

Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin	Volume Kegiatan (ha)	2023-2026				2027-2030			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mandailing Natal & Tapanuli Selatan	PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR	591	-	-	-	591	-	-	-	-
	Simalungun	PT TANAMAN INDUSTRI LESTARI SIMALUNGUN	1.731	-	-	-	1.731	-	-	-	-
Sub Total IPL 3			169.876	-	21.948	21.948	49.211	41.124	35.645	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

D.3.2.5. SILIN di Area PBPH-RE

Pelaksanaan SILIN di tahun 2023 dan 2024 pada area PBPH-RE dengan IPL 6-7 karena sedikitnya luas PBPH-RE yang ada. Rincian luas areal untuk pelaksanaan SILIN di PBPH-RE tahun 2023-2030 pada IPL6-7 disajikan pada Tabel 87, sedangkan sebaran area untuk pelaksanaannya menurut konsesi disajikan pada Tabel 88-89.

TABEL 87. Rekapitulasi Total Luas Pelaksanaan SILIN di Area PBPH-RE Tahun 2022-2030 Menurut IPL

Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan (ha)	2022-2030				2024			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sub Total IPL 7	1.871	586	440	258	167	158	105	105	53
Sub Total IPL 6	2.555	531	425	213	106	510	323	286	161
Luas Total (ha)	4.426	1.117	865	471	274	668	428	391	214
Luas Menurut Tahun (ha)					2.726				1.700
Luas Kumulatif (ha)		1.117	1.981	2.452	2.726	3.393	3.821	4.212	4.426

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 8. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-RE pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi	Batanghari & Sarolangun	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	1.051	263	210	105	53	158	105	105	53
Riau	Kepulauan Meranti & Pelalawan	PT. Gemilang Cipta Nusantara	808	321	230	153	115				

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sumatera Selatan	Musibanyuasin	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	12	12							
		Sub Total IPL 7	1.871	586	440	258	167	158	105	105	53

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 9. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi SILIN di PBPH-RE pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi			62								
	Batanghari & Sarolangun	PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia)	5	5				5			
	Tebo	SP_1 Alam Bukit Tiga Puluh	57	57				57			
Kalimantan Barat	Kuburaya	PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari	367	128	110	73	55	128	110	73	55
Kalimantan Tengah	Katingan	PT. Rimba Makmur Utama	1	1				1			
Sumatera Selatan	Musibanyuasin	PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia)	2.125	531	425	213	106	319	213	213	106
		Sub Total IPL 6	2.555	722	535	286	161	510	323	286	161

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

D.3.3. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi

Pelaksanaan aksi miitigasi degradasi konsesi dilakukan pada areal PBPH-HA, PBPH-HT dan PBPH-RE.

D.3.3.1. Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-HT

Upaya perlindungan hutan primer dari degradasi pada area konsesi PBPH-HT melibatkan sebanyak 83 PBPH-HT pada area seluas 402.225 ha. Jumlah ini, terbagi menjadi upaya pencegahan Degradasi Terencana seluas 192.903 ha yang lokasinya tersebar di 62 PBPH-HT dan upaya pencegahan Degradasi Tidak terencana seluas 209.322 ha yang lokasinya

tersebar di 75 PBPH-HT. Berdasarkan hasil analisis luasan, area ini diharapkan tetap terjaga seluruhnya di tahun 2024.

Area yang dialokasikan untuk upaya pencegahan degradasi di wilayah konsesi yang terencana dilakukan pada areal seluas 192.902 ha yang secara proyeksi dapat terselesaikan pada tahun 2024. Aksi ini diimplementasikan pada areal dengan IPL 3-7 di tahun 2023 dan sebagian area dengan IPL 2 di tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 90 berikut. Rincian sebaran areal untuk pelaksanaan aksi menurut IPL disajikan pada Tabel 91-96.

TABEL 90. Rekapitulasi Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT Menurut Indeks Prioritas Lokasi

Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sub Total IPL 7	588	208	176	117	88	-	-	-	-
Sub Total IPL 6	2.244	998	575	383	288	-	-	-	-
Sub Total IPL 5	8.611	3.138	2.526	1.684	1.263	-	-	-	-
Sub Total IPL 4	19.063	6.783	5.668	3.778	2.834	-	-	-	-
Sub Total IPL 3	42.817	15.171	12.760	8.506	6.380	-	-	-	-
Sub Total IPL 2	119.580	42.026	35.794	23.863	17.897	42.026	35.794	23.863	17.897
Total Degradasi Konsesi "Terencana" pada Area KPHP-HTI	192.903	68.324	57.499	38.331	28.750	42.026	35.794	23.863	17.897
Luas Kumulatif Degradasi Konsesi "Terencana" pada Area KPHP-HTI		26.298	48.002	62.471	73.323	115.349	151.143	175.006	192.903

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 91. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sumatera Selatan	Empat Lawang	PT Musi Hutan Persada	187	65	56	37	28				
Kalimantan Barat	Melawi	PT Rimba Equator Permai	3	3							
Kalimantan Timur	Kutai Timur	PT Permata Borneo Abadi	398	139	119	80	60				
		Sub Total IPL 7	588	208	176	117	88	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 92. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi			913								
	Bungo	PT Mugitriman International	93	93							
	Merangin	PT Jebus Maju	34	34							
	Sarolangun	PT Gading Karya Makmur	242	85	73	48	36				
	Sarolangun	PT Hijau Artha Nusa	234	82	70	47	35				
	Tanjungjabung Barat	PT Wira Karya Sakti	310	109	93	62	47				
Kalimantan Barat			787								
	Kapuas Hulu	PT Lembah Jatimutiara	430	151	129	86	65				
	Ketapang	PT Wana Subur Persada	68	68							
	Melawi	PT Segah Bangun Persada	229	80	69	46	34				
	Sekadau	PT Wana Subur Persada	60	60							
Kalimantan Timur			544								
	Kutai Timur	PT Santan Borneo Abadi	72	72							
	Kutai Timur	PT Silva Selaras Utama	472	165	142	94	71				
Sumatera Barat	Dharmasraya	PT Mugitriman International	-	-							
Sub Total IPL 6			2.244	998	575	383	288	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 93. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bangka-belitung	Bangka	PT Agro Pratama Sejahtera	235	82	71	47	35				

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat			6.564								
	Landak	PT Gapura Persada Katulistiwa	135	47	41	27	20				
	Melawi	PT Kusuma Puspawana	10	10							
	Sanggau	PT Wana Lestari Jaya	6.385	2.235	1.916	1.277	958				
	Sintang	PT Boma Plantation	34	34							
Kalimantan Tengah	Pulangpisau	PT Kalteng Green Resources	6	6							
Kalimantan Timur	Berau	PT Tanjung Redeb Hutani	504	176	151	101	76				
Nusa Tenggara Barat	Bima	PT Koin Nesia	1.161	406	348	232	174				
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	PT Wono Indotani Niaga	43	43							
Sumatera Selatan	Empat Lawang	PT Xylo Indah Pratama	3	3							
Sumatera Utara	Tobasamosir & Tapanuli Utara	PT Toba Pulp Lestari Tbk	95	95							
		Sub Total IPL 5	8.611	3.138	2.526	1.684	1.263	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 94. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bangka-belitung	Bangka Barat	PT Bangun Rimba Sejahtera	194	68	58	39	29				
Jambi	Merangin	PT Delonix Lestari Raya	37	37							

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat			884								
	Bengkayang	PT Dian Kapuas Sedaya	297	104	89	59	45				
	Ketapang	PT Wana Hijau Pesaguan	34	34							
	Melawi	PT Inhutani III Sanggau	430	151	129	86	65				
	Sambas	PT Fajar Wana Lestari	123	43	37	25	18				
Kalimantan Timur	Berau	PT Hutan Berau Lestari	17	17							
Kalimantan Utara	Nunukan	PT Adindo Hutani Lestari	115	40	35	23	17				
Maluku	Buru	PT Waenibe Wood Industries	3	3							
Nusa Tenggara Barat	Dompu	PT Usahatani Lestari (NTB)	620	217	186	124	93				
Papua			16.278								
	Merauke & Mappi	PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III	12.068	4.224	3.620	2.414	1.810				
	Merauke	PT Medcopapua Alam Lestari	26	26							
	Merauke	PT Plasma Nuftah Marind Papua	4.184	1.464	1.255	837	628				
Sulawesi Tengah			757								
	Banggai	PT Berkat Hutan Pusaka	54	54							
	Tojounauna	PT Indokaret	703	246	211	141	105				
Sulawesi Utara	Bolaangmongondow Selatan	PT Kawanua Kahuripan Pantera	158	55	47	32	24				
Sub Total IPL 4			19.063	6.783	5.668	3.778	2.834	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 95. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aceh			160								
	Pidie & Aceh Besar	PT Aceh Nusa Indrapuri	91	91							
	Aceh Tengah	PT Tusam Hutani Lestari	69	69							
Gorontalo	Gorontalo & Gorontalo Utara	PT Gorontalo Citra Lestari	425	149	128	85	64				
Kalimantan Barat	Melawi	PT Alfa Borneo Lestari	97	97							
Maluku Utara	Halmahera Timur	PT NNE Plantation	9	9							
Nusa Tenggara Timur	Kupang & Sumba Barat	PT Usaha Tani Lestari (NTT)	10.860	3.801	3.258	2.172	1.629				
Papua	Merauke	PT Selaras Inti Semesta	28.936	10.128	8.681	5.787	4.340				
Sulawesi Barat	Mamuju	PT Bara Indoco	10	10							
Sulawesi Tengah			2.188								
	Morowali	PT Ecogreen Resources	2.179	763	654	436	327				
	Parigimoutong	PT Kilau Alam Lestari	9	9							
Sumatera Utara	Mandailing Natal	PT Anugerah Rimba Makmur	132	46	40	26	20				
		Sub Total IPL 3	42.817	15.171	12.760	8.506	6.380	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 96. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 2

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aceh	Aceh Timur	PT Rimba Timur Sentosa	5	5				5			
Maluku	Kepulauan Aru	PT Projo Agawe Mukti	25.964	9.087	7.789	5.193	3.895	9.087	7.789	5.193	3.895

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Papua	Merauke	PT Wanamulia Sukses Sejati Unit I & II	25.771	9.020	7.731	5.154	3.866	9.020	7.731	5.154	3.866
Papua Barat	Fak-fak & Telukbintuni	PT Kesatuan Mas Abadi	61	61				61			
Sulawesi Tengah			51.352								
	Parigimoutong, Poso & Donggala	PT Coltan Agro	16.760	5.866	5.028	3.352	2.514	5.866	5.028	3.352	2.514
	Parigimoutong	PT Hutan Langgeng Lestari	200	200				200			
	Donggala	PT Rimba Elok Lestari	2.421	847	726	484	363	847	726	484	363
	Morowali & Tojounauna	PT Wana Rindang Lestari	31.971	11.190	9.591	6.394	4.796	11.190	9.591	6.394	4.796
Sulawesi Tenggara			16.427								
	Konawe	PT Denvhi Nuranesia Rayadipta	10.757	3.765	3.227	2.151	1.614	3.765	3.227	2.151	1.614
	Konawe Utara	PT Indo Sunshine Lestari	5.670	1.985	1.701	1.134	851	1.985	1.701	1.134	851
		Sub Total IPL 2	119.580	42.026	35.794	23.863	17.897	42.026	35.794	23.863	17.897

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

Area yang dialokasikan untuk upaya pencegahan degradasi di wilayah konsesi yang tidak terencana dilakukan pada areal seluas 209.322 ha yang secara proyeksi belum dapat terselesaikan di tahun 2024. Aksi ini diimplementasikan pada areal dengan IPL 4-8 di tahun 2023 dan sebagian area dengan IPL 2-3 di tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 97 dan tata waktu pelaksanaannya pada masing-masing IPL pada Tabel 98-104.

TABEL 97. Rekapitulasi Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak terencana" di Area KPHP-PBPH-HT Menurut Indeks Prioritas Lokasi

	Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sub Total IPL 8	716	275	204	136	102	-	-	-	-
Sub Total IPL 7	4.810	1.786	1.396	931	698	-	-	-	-
Sub Total IPL 6	35.456	12.698	10.504	7.002	5.252	-	-	-	-
Sub Total IPL 5	17.988	6.352	5.370	3.580	2.685	-	-	-	-
Sub Total IPL 4	22.697	7.962	6.801	4.534	3.400	-	-	-	-
Sub Total IPL 3	54.225	19.016	16.250	10.834	8.125	19.016	16.250	10.834	8.125
Sub Total IPL 2	73.430	25.702	22.028	14.686	11.014	25.702	22.028	14.686	11.014
Total Degradasi Konsesi "Tidak terencana " pada Area KPHP-PBPH-HT	209.322	73.791	62.553	41.703	31.276	44.718	38.279	25.519	19.139
Luas Kumulatif Degradasi Konsesi "Tidak terencana " pada Area KPHP-PBPH-HT		29.073	53.347	69.530	81.667	126.385	164.663	190.183	209.322

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 98. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 8

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Selatan	Tanahlaut	PT Inhutani III Pelaihari	37	37							
Sumatera Selatan	Banyuasin	PT Sumber Hijau Permai	679	238	204	136	102				
		Sub Total IPL 8	716	275	204	136	102	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

Tabel 99. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat	Melawi	PT Rimba Equator Permai	39	39							

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur			493								
	Kutai Timur	PT Permata Borneo Abadi	56	56							
	Penajampaser Utara & Kota Balikpapan	PT Inhutani I Batuampar - Mentawir	21	21							
	Penajampaser Utara	PT Itci Hutani Manunggal	416	146	125	83	62				
Riau			4.276								
	Bengkalis	PT Sumatera Riang Lestari	3.943	1.380	1.183	789	591				
	Kota Dumai	PT Suntara Gajapati	39	39							
	Siak	PT Balai Kayang Mandiri	165	58	50	33	25				
	Siak	PT Seraya Sumber Lestari	129	45	39	26	19				
Sumatera Selatan	Empat Lawang	PT Musi Hutan Persada	2	2							
		Sub Total IPL 7	4.810	1.786	1.396	931	698	-	-	-	-

Sumber: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 100. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi			23.184								
	Bungo	PT Mugitriman International	4.401	1.540	1.320	880	660				
	Merangin	PT Jebus Maju	1.097	384	329	219	165				
	Muarojambi	PT Tri Pupajaya	1.531	536	459	306	230				
	Sarolangun & Merangin	PT Gading Karya Makmur	5.958	2.085	1.787	1.192	894				
	Sarolangun	PT Hijau Artha Nusa	10.192	3.567	3.058	2.038	1.529				
	Tanjungjabung Barat	PT Wira Karya Sakti	5	5							

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat			7.943								
	Ketapang & Sekadau	PT Wana Subur Persada	5.640	1.974	1.692	1.128	846				
	Melawi	PT Segah Bangun Persada	2.303	806	691	461	345				
Kalimantan Tengah	Pulangpisau	PT Ramang Agro Lestari	4	4							
Kalimantan Timur			3.890								
	Kutai Timur	PT Santan Borneo Abadi	799	280	240	160	120				
	Kutai Timur	PT Silva Selaras Utama	3.091	1.082	927	618	464				
Sumatera Barat	Dharmasraya	PT Mugitriman International	1	1							
Sumatera Selatan	Banyuasin	PT Tri Pupajaya	434	434							
		Sub Total IPL 6	35.456	12.698	10.504	7.002	5.252	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 101. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bangka-belitung	Bangka & Belitung	PT Agro Pratama Sejahtera	408	143	122	82	61				
Kalimantan Barat			1.919								
	Melawi	PT Kusuma Puspawana	207	72	62	41	31				
	Sintang	PT Boma Plantation	1.712	599	514	342	257				
Kalimantan Tengah			62								
	Kapuas	PT Industrial Forest Plantation	45	45							
	Pulangpisau & Kapuas	PT Kalteng Green Resources	17	17							

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur			13.873								
	Berau	PT Tanjung Redeb Hutani	12.550	4.393	3.765	2.510	1.883				
	Kutai Timur	PT Sumalindo Alam Lestari II (D/H Sumalindo LJ II)	1.323	463	397	265	198				
Nusa Tenggara Barat	Bima	PT Koin Nesia	25	25							
Sumatera Selatan	Empat Lawang	PT Xylo Indah Pratama	111	39	33	22	17				
Sumatera Utara	Tapanuli Utara & Tobasamosir	PT Toba Pulp Lestari Tbk	1.590	557	477	318	239				
		Sub Total IPL 5	17.988	6.352	5.370	3.580	2.685	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 102. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bangka-belitung	Bangka Barat & Bangka	PT Bangun Rimba Sejahtera	3.405	1.192	1.022	681	511				
Jambi	Merangin	PT Delonix Lestari Raya	2.710	949	813	542	407				
Kalimantan Barat			10.390								
	Bengkayang	PT Dian Kapuas Sedaya	3.267	1.143	980	653	490				
	Ketapang	PT Kumala Rimba Lestari	611	214	183	122	92				
	Ketapang	PT Wana Hijau Pesaguan	1.621	567	486	324	243				
	Melawi & Sintang	PT Inhutani III Sanggau	4.891	1.712	1.467	978	734				
Kalimantan Timur	Berau	PT Hutan Berau Lestari	137	48	41	27	21				
Kalimantan Utara	Nunukan & Tanatidung	PT Adindo Hutani Lestari	1.085	380	326	217	163				

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maluku Utara	Kepulauan Sula	PT Kalpika Wanatama Unit II	8	8							
Nusa Tenggara Barat	Dompu & Bima	PT Usahatani Lestari (NTB)	9	9							
Papua	Merauke	PT Plasma Nuftah Marind Papua	1	1							
Sulawesi Barat	Mamuju	PT Bio Energi Indoco	10	10							
Sulawesi Tengah			4.942								
	Banggai	PT Berkat Hutan Pusaka	4.576	1.602	1.373	915	686				
	Tojounauna	PT Indokaret	366	128	110	73	55				
Sub Total IPL 4			22.697	7.962	6.801	4.534	3.400	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 103. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aceh			30.851								
	Aceh Besar & Pidie	PT Aceh Nusa Indrapuri	24.602	8.611	7.381	4.920	3.690	8.611	7.381	4.920	3.690
	Aceh Tengah & Bener Meriah	PT Tusam Hutani Lestari	6.249	2.187	1.875	1.250	937	2.187	1.875	1.250	937
Kalimantan Barat	Melawi	PT Alfa Borneo Lestari	4.734	1.657	1.420	947	710	1.657	1.420	947	710
Kalimantan Timur	Kutai Timur	PT Belantara Persada	970	340	291	194	146	340	291	194	146
Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	PT Sadhana Arifnusa	7	7				7			
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat & Kupang	PT Usaha Tani Lestari (NTT)	39	39				39			
Papua	Merauke	PT Selaras Inti Semesta	451	158	135	90	68	158	135	90	68

Sulawesi Barat	Mamuju	PT Bara Indoco	2	2				2			
Sulawesi Selatan	Luwu Utara & Luwu Timur	PT Mija Raya Utama	4.436	1.553	1.331	887	665	1.553	1.331	887	665
Sulawesi Tengah			9.135								
	Morowali	PT Ecogreen Resources	9.126	3.194	2.738	1.825	1.369	3.194	2.738	1.825	1.369
	Parigimoutong	PT Kilau Alam Lestari	9	9				9			
Sumatera Utara	Mandailing Natal & Tapanuli Selatan	PT Anugerah Rimba Makmur	3.600	1.260	1.080	720	540	1.260	1.080	720	540
		Sub Total IPL 3	54.225	19.016	16.250	10.834	8.125	19.016	16.250	10.834	8.125

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 103. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi "Tidak Terencana" di Area KPHP-PBPH-HT pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 2

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aceh			3.443								
	Aceh Timur	PT Rimba Penyangga Utama	1.444	505	433	289	217	505	433	289	217
	Aceh Timur	PT Rimba Timur Sentosa	1.999	700	600	400	300	700	600	400	300
Maluku	Kepulauan Aru	PT Projo Agawe Mukti	7.838	2.743	2.351	1.568	1.176	2.743	2.351	1.568	1.176
Maluku Utara	Pulau Taliabu	PT Kalpika Wanatama Unit I	2	2				2			
Papua	Merauke	PT Wanamulia Sukses Sejati Unit I & II	111	39	33	22	17	39	33	22	17
Papua Barat	Telukbintuni & Fak-fak	PT Kesatuan Mas Abadi	5.639	1.974	1.692	1.128	846	1.974	1.692	1.128	846

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sulawesi Tengah			24.379								
	Donggala, Parigimoutong, Poso & Kota Palu	PT Coltan Agro	11.705	4.097	3.512	2.341	1.756	4.097	3.512	2.341	1.756
	Donggala	PT Rimba Elok Lestari	1.314	460	394	263	197	460	394	263	197
	Donggala, Parigimoutong & Kota Palu	PT Hutan Langgeng Lestari	9.623	3.368	2.887	1.925	1.443	3.368	2.887	1.925	1.443
	Morowali & Tojounauna	PT Wana Rindang Lestari	1.737	608	521	347	261	608	521	347	261
Sulawesi Tenggara			31.890								
	Konawe	PT Denvhi Nuranesia Rayadipta	12.550	4.393	3.765	2.510	1.883	4.393	3.765	2.510	1.883
	Konawe Utara & Konawe	PT Indo Sunshine Lestari	19.340	6.769	5.802	3.868	2.901	6.769	5.802	3.868	2.901
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	PT Biomass Andalan Energi	128	45	38	26	19	45	38	26	19
Sub Total IPL 2			73.430	25.702	22.028	14.686	11.014	25.702	22.028	14.686	11.014

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

D.3.3.2. Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-HA

Upaya perlindungan hutan primer dari degradasi pada area konsesi PBPH-HA melibatkan sebanyak 206 PBPH pada area seluas 5.444.315 ha sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan hasil analisis luasan, area yang diharapkan tetap terjaga sampai tahun 2024 adalah seluas 1.423.690 ha atau sebesar 26,15% dari total area. Sebagian dari areal ini berada di areal dengan IPL cukup tinggi (IPL6-7) yang artinya memiliki ancaman terjadinya degradasi konsesi tidak terencana yaitu adanya pembalakan liar. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi faktor penyebab degradasi tidak terencana harus mendapat perhatian. Data rekapitulasi luas areal PBPH-HA untuk pelaksanaan mitigasi degradasi konsesi menurut IPL disajikan pada Tabel 104 dan sebaran lokasi menurut pemegang izin konsesi disajikan pada Tabel 105-110.

TABEL 105. Rekapitulasi Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA Menurut Indeks Prioritas Lokasi

Lokasi Kegiatan	Volume Kegiatan (ha)[1]	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sub Total IPL 7	18.040	6.314	5.412	3.608	2.706	-	-	-	-
Sub Total IPL 6	14.506	5.163	4.312	2.875	2.156	-	-	-	-
Sub Total IPL 5	216.700	75.936	64.968	43.312	32.484	-	-	-	-
Sub Total IPL 4	225.167	78.860	67.526	45.018	33.763	78.860	67.526	45.018	33.763
Sub Total IPL 3	883.411	171.546	146.912	97.942	73.456	137.745	118.066	78.711	59.033
Sub Total IPL 2	65.866	23.063	19.755	13.170	9.878	23.063	19.755	13.170	9.878
Total Degradasi Konsesi pada Area KPHP-HPH	1.423.690	360.882	308.885	205.925	154.443	239.667	205.348	136.898	102.674
Luas Kumulatif Degradasi Konsesi pada Area KPHP-HPH		258.959	480.564	628.301	739.103	978.770	1.184.118	1.321.016	1.423.690
Luas pada Tahun 2023 dan 2024					739.103				684.587

KETERANGAN: [1]Volume kegiatan sampai dengan tahun 2024

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 106. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 7

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur	Kutai Timur & Kutai Kartanegara	PT Melapi Timber	9.145	3.201	2.744	1.829	1.372				
Kalimantan Utara	Malinau	PT Permata Borneo Abadi	8.896	3.114	2.669	1.779	1.334				
Sub Total IPL 7			18.041	6.314	5.412	3.608	2.706	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 107. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 6

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Selatan	Tabalong	PT Aya Yayang Indonesia	639	224	192	128	96				
Kalimantan Tengah			13.799								
	Gunungmas & Kapuas	PT Bumimas Permata Abadi	260	91	78	52	39				
	Katingan	PT Graha Sentosa Permai	6.131	2.146	1.839	1.226	920				
	Katingan	PT Kayu Waja	7.343	2.570	2.203	1.469	1.101				
	Kotawaringin Timur	PT Berkat Cahaya Timber	65	65							
Kalimantan Timur	Kutai Timur	PT Nadila Indodaya	67	67							
		Sub Total IPL 6	14.505	5.163	4.312	2.875	2.156	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

Tabel 108. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 5

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat			988								
	Kapuas Hulu	PT Toras Banua Sukses	933	327	280	187	140				
	Ketapang	PT Sari Bumi Kusuma (Unit I dan II)	54	54							
	Melawi	PT Hutani Lestari Raya Timber	1	1							
Kalimantan Tengah			206.013								
	Murungraya	PT Agathis Alam Indonesia	11.772	4.120	3.532	2.354	1.766				
	Gunungmas & Katingan	PT Carus Indonesia	18.116	6.341	5.435	3.623	2.717				
	Katingan	PT Dwima Jaya Utama	1.562	547	469	312	234				

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Seruyan & Kotawaringin Barat	PT Erythrina Nugraha Megah	5.395	1.888	1.619	1.079	809				
	Murungraya	PT Fortuna Cipta Sejahtera	3.128	1.095	938	626	469				
	Murungraya & Kapuas	PT Gunung Meranti	7.588	2.656	2.276	1.518	1.138				
	Gunungmas	PT Hutan Domas Raya	9.758	3.415	2.927	1.952	1.464				
	Murungraya, Kapuas & Gunungmas	PT Kahayan Terang Abadi	15.918	5.571	4.775	3.184	2.388				
	Kotawaringin Barat & Seruyan	PT Hutani Lestari Raya Timber	3.632	1.271	1.090	726	545				
	Lamandau	PT Karda Trades	907	317	272	181	136				
	Murungraya	PT KARYA DELTA PERMAI	7.690	2.692	2.307	1.538	1.154				
	Murungraya	PT Kayu Ara Jaya Raya	22.489	7.871	6.747	4.498	3.373				
	Murungraya	PT Menorah Loggingindo	7.383	2.584	2.215	1.477	1.107				
	Murungraya	PT Mitra Perdana Palangka	19.931	6.976	5.979	3.986	2.990				
	Murungraya	PT Nusantara Alam Raya Sejahtera	47.287	16.550	14.186	9.457	7.093				
	Kapuas	PT Praba Nugraha Technology	2.751	963	825	550	413				
	Murungraya	PT Samudera Rejeki Perkasa	11.311	3.959	3.393	2.262	1.697				
	Murungraya	PT Sarang SaPTa Putra	2.261	791	678	452	339				
	Katingan, Lamandau & Seruyan	PT Sari Bumi Kusuma (Unit I dan II)	5.412	1.894	1.624	1.082	812				
	Gunungmas	PT Sikatan Wana Raya	164	57	49	33	25				
	Murungraya	PT Taman Raja Persada	1.523	533	457	305	228				
	Barito Utara	PT Wana Inti Kahuripan Intiga	35	35							

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur			5.875								
	Kutai Barat	PT Wana Inti Kahuripan Intiga	9	9							
	Kutai Timur	PT Oceanis Timber Product	5.866	2.053	1.760	1.173	880				
Riau	Indragiri Hilir	PT Bhara Induk (D/H Brajatama)	3.784	1.324	1.135	757	568				
Sumatera Utara	Langkat	PT Mulyakarya Jayaco	41	41							
Sub Total IPL 5			216.701	75.936	64.968	43.312	32.484	-	-	-	-

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 109. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 4

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Barat			15.237								
	Ketapang	PT Agra Primera Plantation (D/H. Wanakayu Batuputih)	74	74				74			
	Melawi	PT Kalimantan Satya Kencana	7.769	2.719	2.331	1.554	1.165	2.719	2.331	1.554	1.165
	Sintang	CV Pangkar Begili	7.394	2.588	2.218	1.479	1.109	2.588	2.218	1.479	1.109
Kalimantan Selatan	Tabalong	PT Rizki Kacida Reana	5	5				5			
Kalimantan Tengah			11.416								
	Gunungmas & Katingan	PT Fitamaya Asmapara	4.398	1.539	1.319	880	660	1.539	1.319	880	660
	Katingan	PT Gaung Satya Graha Agrindo	3.355	1.174	1.007	671	503	1.174	1.007	671	503
	Katingan	PT Sarana Piranti Utama	2.770	970	831	554	416	970	831	554	416
	Lamandau	PT Agra Primera Plantation (DH. Wanakayu Batuputih)	105	37	32	21	16	37	32	21	16
	Seruyan	PT Erna Juliawati	788	276	236	158	118	276	236	158	118

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Timur			431								
	Kutai Barat	PT Kedap Sayaaq	123	43	37	25	18	43	37	25	18
	Kutai Timur	PT Borneo Karya Indah Mandiri	199	70	60	40	30	70	60	40	30
	Paser	PT Rizki Kacida Reana	109	38	33	22	16	38	33	22	16
Maluku			1.276								
	Buru Selatan	PT Reminal Utama Sakti	127	44	38	25	19	44	38	25	19
	Maluku Tengah	PT Waroeng Batok Industries	1.149	402	345	230	172	402	345	230	172
Papua	Sami. Memberamoraya & Jayapura	PT Sumber Mitra Jaya (SK.396)	99.218	34.726	29.765	19.844	14.883	34.726	29.765	19.844	14.883
Papua Barat	Telukbintuni & Maybrat	PT Wana Galang Utama	97.584	34.154	29.275	19.517	14.638	34.154	29.275	19.517	14.638
		Sub Total IPL 4	225.167	78.860	67.526	45.018	33.763	78.860	67.526	45.018	33.763

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 110. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 3

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jambi	Muarojambi	PT Putra Duta Indah Wood	447	156	134	89	67				
Kalimantan Barat			199.403								
	Sintang & Kapuas Hulu	PT Batasan	25.615	8.965	7.685	5.123	3.842				
	Ketapang & Sekadau	PT Boma Resources	11.016	3.856	3.305	2.203	1.652				
	Sintang	PT Borneo Kurnia Mandiri	10.954	3.834	3.286	2.191	1.643				
	Sintang	PT Cahaya Karya Dayaindo	5.441	1.904	1.632	1.088	816				
	Ketapang & Sekadau	PT Duaja Corp. II	2.652	928	796	530	398				
	Sintang & Kapuas Hulu	PT Harapan Kita Utama	20.929	7.325	6.279	4.186	3.139				

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ketapang	PT Karunia Hutan Lestari	1.262	442	379	252	189				
	Kapuas Hulu & Sintang	PT Karya Rekanan Binabersama	2.468	864	740	494	370				
	Kapuas Hulu & Sintang	PT Kawedar Wood Industry	31.810	11.134	9.543	6.362	4.772				
	Sintang	PT Sari Bumi Kusuma	13.706	4.797	4.112	2.741	2.056				
	Ketapang	PT Sewaka Lahan Sentosa	9.693	3.393	2.908	1.939	1.454				
	Melawi	PT Sinergi Bumi Lestari	5.714	2.000	1.714	1.143	857				
	Ketapang & Melawi	PT Suka Jaya Makmur	28.518	9.981	8.555	5.704	4.278				
	Sintang	PT Utan Sibau Persada	4.886	1.710	1.466	977	733				
	Ketapang	PT Wana Mukti Lestari	1.867	653	560	373	280				
	Melawi & Ketapang	PT Wanasokan Hasilindo	22.872	8.005	6.862	4.574	3.431				
Kalimantan Tengah			787								
	Murungraya	PT Karya Wijaya Sukses	25	25							
	Murungraya	PT Seroja Universum Narwastu	762	267	229	152	114				
Kalimantan Timur			518.147								
	Berau	PT Aditya Kirana Mandiri	20.305	7.107	6.092	4.061	3.046	7.107	6.092	4.061	3.046
	Berau	PT Amindo Wana Persada	33.468	11.714	10.040	6.694	5.020	11.714	10.040	6.694	5.020
	Berau	PT Aquila Silva	53.173	18.611	15.952	10.635	7.976	18.611	15.952	10.635	7.976
	Berau	PT Daisy Timber	6.225	2.179	1.868	1.245	934	2.179	1.868	1.245	934
	Berau	PT Gunung Gajah Abadi	2.474	866	742	495	371	866	742	495	371
	Berau	PT Hanurata	1.631	571	489	326	245	571	489	326	245
	Berau	PT Inhutani I (Unit Labanan)	13.484	4.719	4.045	2.697	2.023	4.719	4.045	2.697	2.023
	Berau	PT Inhutani I Unit Meraang	15.617	5.466	4.685	3.123	2.343	5.466	4.685	3.123	2.343

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Berau	PT Inhutani I Unit Sambarata	1.757	615	527	351	264	615	527	351	264
	Berau	PT Inhutani I Unit Segah Hulu	1.858	650	557	372	279	650	557	372	279
	Berau	PT Itci Kayan Hutani	1	1				1			
	Berau	PT Karya Lestari	4.492	1.572	1.348	898	674	1.572	1.348	898	674
	Berau	PT Kedung Madu Tropical Wood	110	39	33	22	17	39	33	22	17
	Berau	PT Mardhika Insan Mulia (Unit Tabalar)	5.362	1.877	1.609	1.072	804	1.877	1.609	1.072	804
	Berau	PT Rizki Kacida Reana (SK 60)	1.907	667	572	381	286	667	572	381	286
	Berau	PT Segara Indochem	783	274	235	157	117	274	235	157	117
	Berau	PT Sumalindo Lestari Jaya IV	12.831	4.491	3.849	2.566	1.925	4.491	3.849	2.566	1.925
	Berau	PT Utama Damai Indah Timber	7.348	2.572	2.204	1.470	1.102	2.572	2.204	1.470	1.102
	Berau	PT Wana Bhakti Persada Utama	23.448	8.207	7.034	4.690	3.517	8.207	7.034	4.690	3.517
	Berau	PT Widya Artha Perdana	2.368	829	710	474	355	829	710	474	355
Kalimantan Utara			256.580								
	Bulungan	PT Inhutani I Unit Sambarata	980	343	294	196	147				
	Bulungan	PT Inhutani I Unit Segah Hulu	3.901	1.365	1.170	780	585				
	Malinau	PT Dewata Wanatama Lestari (DH.PT Dharma Putera)	2.429	850	729	486	364				
	Bulungan & Malinau	PT Itci Kayan Hutani	20.104	7.036	6.031	4.021	3.016				
	Malinau	PT Kemakmuran Berkah Timber	3.631	1.271	1.089	726	545				
	Malinau	PT Rimba Karya Rayatama (SK 384-Malinau)	115.290	40.352	34.587	23.058	17.294				
	Malinau	PT Sumalindo Lestari Jaya II	110.245	38.586	33.074	22.049	16.537				

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maluku Utara	Halmahera Barat & Halmahera Utara	PT Nusa Niwe Indah	495	173	149	99	74	173	149	99	74
Papua	Keerom	PT Batasan	25.461	8.911	7.638	5.092	3.819	8.911	7.638	5.092	3.819
Papua Barat			158.956								
	Fak-fak & Kaimana	PT Hanurata	67.399	23.590	20.220	13.480	10.110	23.590	20.220	13.480	10.110
	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak & Telukbintuni	PT Rimbakayu Arthamas	91.557	32.045	27.467	18.311	13.734	32.045	27.467	18.311	13.734
Riau	Kuantan Singingi	PT Multikarya Lisun Prima	13	13							
Sumatera Barat	Sawahlunto Sijunjung	PT Multikarya Lisun Prima	2.481	868	744	496	372				
Sumatera Utara			30.145								
	Kota Padangsidempuan & Tapanuli Selatan	PT Panei Lika Sejahtera	110	110							
	Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan & Mandailing Natal	PT Teluk Nauli	30.035	10.512	9.011	6.007	4.505				
Sub Total IPL 3			883.411	309.291	264.979	176.651	132.491	137.745	118.066	78.711	59.033

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

TABEL 111. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-HA pada Area dengan Indeks Prioritas Lokasi 2

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aceh			55.852								
	Aceh Jaya	PT Aceh Inti Timber	21.879	7.658	6.564	4.376	3.282	7.658	6.564	4.376	3.282
	Aceh Jaya & Pidie	PT Lamuri Timber	33.973	11.891	10.192	6.795	5.096	11.891	10.192	6.795	5.096
Bengkulu			7.831								
	Bengkulu Utara & Muko-muko	PT Anugerah Pratama Inspirasi	4.248	1.487	1.274	850	637	1.487	1.274	850	637
	Muko-muko	PT Bentara Agra Timber	3.583	1.254	1.075	717	537	1.254	1.075	717	537

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sumatera Barat			2.183								
	Kepulauan Mentawai	PT Minas Pagai Lumber	15	15				15			
	Kepulauan Mentawai	PT Salaki Summa Sejahtera	2.168	759	650	434	325	759	650	434	325
Sub Total IPL 2			65.866	23.063	19.755	13.170	9.878	23.063	19.755	13.170	9.878

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

D.3.3.3. Degradasi Konsesi pada Area KPHP-PBPH-RE

Upaya perlindungan hutan primer dari degradasi pada area konsesi PBPH-RE melibatkan sebanyak 4 PBPH pada area seluas 84.277 ha. Berdasarkan hasil analisis luasan, area ini diharapkan tetap terjaga seluruhnya di tahun 2023 (Tabel 111).

TABEL 112. Tata Waktu Pelaksanaan Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi di Area KPHP-PBPH-RE

Lokasi Kegiatan			Volume Kegiatan (ha)	Tahun 2022-2026				Tahun 2027-2030			
Provinsi	Kabupaten	Pemegang Izin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Riau	Pelalawan	PT Sinar Mutiara	2.043	715	613	409	306				
	Pelalawan	PT. Gemilang Cipta Nusantara	965	338	290	193	145				
Sub Total IPL 7			3.008	1.053	902	602	451	-	-	-	-
Bengkulu	Muko-muko	PT. Sipef Biodiversity Indonesia	3.677	1.287	1.103	735	552				
Kalimantan Timur	Kutai Timur & Kutai Kartanegara	PT. Restorasi Habitat Orang Hutan Indonesia	77.592	27.157	23.278	15.518	11.639				
Sub Total IPL 4			81.269	28.444	24.381	16.254	12.190	-	-	-	-
Total Degradasi Konsesi pada Area KPHP-RE			84.277	29.497	25.283	16.855	12.642	-			

SUMBER: Spatial Indikatif Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030; Olah Data, 2022

E. Dukungan Para Pihak

Para pihak dalam kegiatan yang terlibat pada Bidang 1 Pengelolaan Hutan Lestari terdiri dari: 1) Kementerian Dalam Negeri; 2) Bappenas; 3) Setjen KLHK; 4) Ditjen PHL; 5) Ditjen PKTL; 6) Ditjen PSKL; 7) Ditjen KSDAE; 8) Dinas LH Provinsi; 9) Dinas Kehutanan Provinsi; 10) KPH; 11) Akademisi; 12) Peneliti; 13) Media publikasi; 14) Lembaga Non Pemerintah (NGO); dan 15) Donor, serta para pihak lainnya yang relevan.

E.1. Para Pihak Kegiatan Kelompok Kerja 1.1.

Implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen PPI (Tabel 113). Dalam perencanaan implementasi ke depan, Dit PKHL bersama-sama dengan unit di daerah melaksanakan minimal 4 (empat) jenis kegiatan utama dan 14 (empat belas) jenis kegiatan operasional.

TABEL 112. Kegiatan Pengendalian Karhutla oleh Dit. PKHL

Kegiatan Pengendalian Karhutla	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1. Pencegahan karhutla 2. Penanggulangan karhutla melalui Pemadaman Darat 3. Penanggulangan karhutla melalui Pemadaman Udara 4. Penanganan paska kebakaran	Pengurangan luas karhutla	1. Terjaminnya Efektivitas dan jangkauan dalkarhutla
		2. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
		3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
		4. Penguatan Pencegahan Karhutla
		5. Penyadartahuan Pencegahan Karhutla
		6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla
		7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla
		8. Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla
		9. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla
		10. Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla
		11. Operasi Bidang Penanganan Bencana
		12. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat
		13. Deteksi dan Peringatan Dini
		14. Pelaksanaan Pemadaman Darat

2. Implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan program dan kegiatan di lingkup KLHK dan di luar KLHK, meliputi Ditjen PPI, Ditjen PKTL, Ditjen PHL, Ditjen PPKL, Ditjen PSKL, Ditjen PDASRH, Ditjen KSDAE, BP2SDM, Ditjen Gakkum, dan BRGM, (Tabel 114).

TABEL 114. Hubungan Kegiatan Pengendalian Karhutla dengan Program dan Kegiatan Ditjen di Lingkup KLHK dan Institusi di Luar KLHK

Institusi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Ditjen PPI	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Penurunan luas areal karhutla di provinsi rawan karhutla.
	Mitigasi Perubahan Iklim	Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim.
	Pengendalian karhutla	Penurunan luas karhutla di provinsi rawan karhutla dari baseline 2019.
		Pemantauan pencegahan penebangan liar.
		Pemantauan pengelolaan areal PBPH-HT yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		Pemantauan kebakaran hutan dan lahan.
		Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
Ditjen PKTL	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pematauan pencegahan penebangan liar.
		Pemantauan pengelolaan areal PBPH-HT yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		Pemantauan kebakaran hutan dan lahan.
		Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemantauan pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemantau Pemberdayaan dan pemberian akses pada masyarakat melalui Perhutanan Sosial. Pemantau Pemberdayaan dan pemberian akses pada masyarakat melalui Perhutanan Sosial.
Ditjen PHL	Pengembangan sistem insentif bagi pencegahan degradasi hutan primer	Pencegahan penebangan liar
		Pengelolaan areal PBPH-HT yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.

Institusi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Ditjen PDASRH	Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	Pencegahan penebangan liar di wilayah DAS
	Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan wilayah DAS yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		Kebakaran hutan dan lahan di wilayah DAS.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan wilayah DAS Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan wilayah DAS Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
Ditjen KSDAE	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Pencegahan penebangan liar di areal hutan konservasi
	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan areal hutan konservasi yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di areal hutan konservasi.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal hutan konservasi Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal hutan konservasi Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
Ditjen PSKL	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Pencegahan penebangan liar di areal Perhutanan Sosial.
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan areal Perhutanan Sosial yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		Kebakaran hutan dan lahan di areal Perhutanan Sosial.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal Perhutanan Sosial Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal Perhutanan Sosial Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemberdayaan dan pemberian akses pada masyarakat melalui Perhutanan Sosial.

Institusi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Ditjen PPKL	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan
	Peningkatan Penyuluhan	Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan
Ditjen Gakkum	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Pencegahan penebangan liar.
		Kegiatan Patroli, Sosialisasi dan Operasi Lapang untuk Penjagaan Hutan dari ancaman dan Gangguan.
		Penegakkan hukum pidana untuk mencegah kebakaran hutan, penambangan/pembalakan liar, dan perambahan hutan.
		Penyadartahuan tentang Pengamanan Hutan (Pembalakan Liar / Perambahan / Ladang Berpindah).
Badan BP2SDM	Peningkatan Penyuluhan	Pencegahan penebangan liar di areal KHDTK.
		Pengelolaan areal PBPH-HT berbatasan dengan areal KHDTK yang rawan konflik dan dekat dengan pemukiman masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
		Kebakaran hutan dan lahan di areal KHDTK.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal KHDTK Lahan Mineral dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
		Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA berbatasan dengan areal KHDTK Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan.
BRGM	Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut di 7 Provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua).	Kebakaran hutan dan lahan
	Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di 9 Provinsi (Sumut, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumsel, Kalbar, Kalut, Papua, dan Papua Barat).	Pemberdayaan masyarakat di areal PBPH-HA Lahan Gambut yang masuk wilayah budidaya Ekosistem Gambut dekat pemukiman dengan cara peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui kerjasama pengelolaan hutan pola kemitraan

Setiap Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung atau hutan produksi; Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi atau HTR; Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan; Pengelola Hutan Kemasyarakatan; Pengelola Hutan Desa; dan Pemilik Hutan wajib melaksanakan program dan kegiata pengendalian kebakaran hutan dan lahan di areal kerja masing-masing.

E.2. Para Pihak Kegiatan Kelompok Kerja 1.2.

Kegiatan perhutanan sosial dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari melibatkan para pihak di tingkat nasional (pemerintah pusat, dunia usaha), sub-nasional (pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, Pokja PS daerah, pemerintah desa, dunia usaha), masyarakat lokal (KPS, KUPS) dan para mitra pembangunan PSKL.

Peran masing-masing pihak beserta output capaiannya disajikan pada Tabel 115 berikut:

TABEL 115. Peran Masing-Masing Pihak Beserta Output Capaiannya

NO	KEGIATAN	IKK	SUB-KEGIATAN	PELAKSANA	
1	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD,HKm, HTR,KK	1. Sosialisasi dan koordinasi penyiapan dan pemberian akses Perhutanan Sosial 2. Sinkronisasi dan Ground Chek PIAPS 3. Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial 4. Verifikasi teknis Perhutanan Sosial 5. Monitoring izin Perhutanan Sosial	1. Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BIG, Kemendes, Kemendagri, Kemen ATR/BPN) 2. Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, OPD terkait lainnya) 3. Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. 4. Mitra Pembangunan. 5. Pendamping Perhutanan Sosial	
		Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm,Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	1. Pemutakhiran PIAPS 2. Verifikasi Administrasi 3. Sinkronisasi Persetujuan 4. Bantuan Teknis Penyiapan Persetujuan PS 5. Penyusunan dan Penerbitan SK Persetujuan PS	Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, Ditjen PKTL, Ditjen PPKL, Ditjen Gakkum, Ditjen PHL)	
2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	1. Penataan Areal (Penandaan batas, inventarisasi potensi, penetapan ruang perlindungan/pemanfaatan, andil garapan, pemetaan) 2. Penyusunan RKPS/RKT (pemanfaatan hutan, rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan hutan, pencegahan kebakaran hutan, pengembangan usaha/ produk/pasar 3. Pembentukan KUPS dan Penguatan Kelembagaan	1. Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BP2SDM - Pusluh, Ditjen PKTL). 2. Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, KPH). 3. Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. 4. Mitra Pembangunan. 5. Pendamping Perhutanan Sosial	

	PERAN	OUTPUT PELAKSANA
	1. Menyiapkan regulasi dan kebijakan. 2. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan. 3. Melakukan sosialisasi. 4. Melakukan Pembentukan/ penguatan kelembagaan. 5. Memfasilitasi penyusunan dokumen usulan Perhutanan Sosial 6. Memfasilitasi kegiatan verifikasi teknis.	1. Tersedianya regulasi dan kebijakan. 2. Terlaksananya pemantauan dan pengawasan. 3. Terlaksananya sosialisasi. 4. Terlaksananya Pembentukan/ penguatan kelembagaan. 5. Terfasilitasinya penyusunan dokumen usulan Perhutanan Sosial 6. Terfasilitasinya kegiatan verifikasi teknis.
	Memfasilitasi penerbitan persetujuan Perhutanan Sosial.	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan Perhutanan Sosial.
	1. Pemerintah Pusat: - Menyiapkan regulasi, - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan, - Mengesahkan RKPS. 2. Pemerintah Daerah: - Melakukan penilaian dokumen RKPS, - Mengesahkan RKT. 3. Pokja PS Provinsi: - Melakukan pendampingan, - Meningkatkan kapasitas Kelompok PS. 4. Mitra Pembangunan: - Memfasilitasi penyusunan dokumen RKPS dan RKT. 5. Pendamping PS: - Memfasilitasi penyusunan dokumen RKPS dan RKT.	1. Pemerintah Pusat: - Tersusunnya regulasi, - Terlaksananya pemantauan dan pengawasan, - Terlaksananya pengesahan RKPS. 2. Pemerintah Daerah: - Terlaksananya penilaian dokumen RKPS - Terlaksananya pengesahan dokumen RKT. 3. Pokja PS Provinsi: - Terlaksananya pendampingan - Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelompok PS. 4. Mitra Pembangunan: - Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen RKPS dan RKT. 5. Pendamping PS: - Terlaksananya penyusunan dokumen RKPS dan RKT.

NO	KEGIATAN	IKK	SUB-KEGIATAN	PELAKSANA	
		Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah	1. Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL; Kementan; KemenKop UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf). 2. Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, OPD terkait lainnya). 3. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS) 4. Mitra Pembangunan.	
		Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum	1. Peningkatan akses pemasaran 2. Fasilitasi akses permodalan 3. Fasilitasi kerjasama usaha	1. Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, Kementan; Kemenko UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf). 2. Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, OPD terkait lainnya). 3. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES). 4. Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. 5. Mitra Pembangunan. 6. Pendamping Perhutanan Sosial	
3	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Penetapan hutan adat dan hutan hak	1. Percepatan penetapan hutan adat 2. Pemberian SK Hutan Adat 3. Penyusunan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat 4. Validasi usulan penetapan hutan adat 5. Verifikasi MHA dan Hutan Adat 6. Penyusunan dan Pembahasan legalisasi Penetapan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal	1. Pemerintah Pusat: KLHK (Ditjen PSKL, Ditjen PKTL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL); BIG; Kemendagri; Akademisi (Perguruan Tinggi setempat) 2. Pemerintah Daerah: Gubernur/ Bupati/ Walikota/Dishut/ DLHK dan OPD terkait lainnya 3. Masyarakat Hukum Adat (MHA) 4. Pendamping MHA	

	PERAN	OUTPUT PELAKSANA
	1. Pemerintah Pusat: - Menyusun pedoman teknis peningkatan produktivitas, - Memberikan bantuan, - Melaksanakan bimtek, pemantauan dan pengawasan. 2. Pemerintah Daerah: - Memberikan bantuan, - Melaksanakan bimtek, pemantauan dan pengawasan. 3. Dunia Usaha: - Memberikan bantuan, - Melaksanakan bimtek. 4. Mitra Pembangunan: - Memberikan bantuan, - Melaksanakan bimtek.	1. Pemerintah Pusat: - Tersusunnya pedoman teknis peningkatan produktivitas, - Tersalurkannya bantuan, - Terlaksananya bimtek, pemantauan dan pengawasan. 2. Pemerintah Daerah: - Tersalurkannya bantuan, - Terlaksananya bimtek, pemantauan dan pengawasan. 3. Dunia Usaha: - Tersalurkannya bantuan, - Terlaksananya bimtek 4. Mitra Pembangunan: - Tersalurkannya bantuan, - Terlaksananya bimtek
	1. Pemerintah Pusat: - Menyusun pedoman teknis, - Memberikan fasilitasi, - Melaksanakan bimtek, pemantauan dan pengawasan. 2. Pemerintah Daerah: - Memberikan fasilitasi, - Melaksanakan bimtek, pemantauan dan pengawasan. 3. Dunia Usaha: - Memberikan fasilitasi, - Melaksanakan bimtek, - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan. 4. Pokja PS Provinsi: - Melakukan pendampingan, - Meningkatkan kapasitas. 5. Mitra Pembangunan: - Memberikan fasilitasi, - Melakukan pendampingan, - Meningkatkan kapasitas. 6. Pendamping PS: - Melakukan pendampingan, - Meningkatkan kapasitas.	1. Pemerintah Pusat: - Tersusunnya pedoman teknis, - Terlaksananya fasilitasi, - Terlaksana bimtek, pemantauan dan pengawasan. 2. Pemerintah Daerah: - Terlaksananya fasilitasi, - Terlaksananya bimtek, pemantauan dan pengawasan. 3. Dunia Usaha: - Terlaksananya fasilitasi, - Terlaksananya bimtek, - Terlaksananya pemantauan dan pengawasan. 4. Pokja PS Provinsi: - Terlaksananya pendampingan, - Terlaksananya peningkatan kapasitas. 5. Mitra Pembangunan: - Terlaksananya fasilitasi, - Melakukan pendampingan - Terlaksananya peningkatan kapasitas. 6. Pendampingan PS: - Terlaksananya pendampingan, - Terlaksananya peningkatan kapasitas.
	1. Pemerintah Pusat: - Melaksanakan proses penetapan status hutan adat - Menetapkan fungsi kawasan hutan adat dan status dan fungsi lainnya sebagai bagian dari prioritas penataan kawasan hutan 2. Pemerintah Daerah - Menetapkan wilayah adat - Memfasilitasi usulan penetapan status hutan adat 3. MHA: - Menyampaikan usulan Hutan Adat 4. Pendamping MHA: - Fasilitasi usulan penetapan status hutan adat	1. SK Penetapan Status Hutan Adat 2. Dokumen usulan hutan adat

NO	KEGIATAN	IKK	SUB-KEGIATAN	PELAKSANA	
		Identifikasi dan inventarisasi MHA, calon hutan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional	1. Identifikasi dan inventarisasi MHA, calon hutan adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional 2. Fasilitasi verifikasi MHA, HA dan Hutan Hak 3. Fasilitasi etnografi MHA, peta hutan adat dan data kearifan lokal	1. Pemerintah Pusat: KLHK (Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL); BIG; Kemendagri; Akademisi (Perguruan Tinggi setempat) 2. Pemerintah Daerah: Gubernur/ Bupati; Dishut/DLHK dan OPD terkait lainnya 3. Masyarakat Hukum Adat (MHA) 4. Pendamping MHA	
4	Kemitraan Lingkungan	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	1. Perencanaan dan Koordinasi 2. Pengembangan NSPK Pendampingan Perhutanan Sosial 3. Sosialisasi, Forum, Apresiasi Pendampingan Perhutanan Sosial 4. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL) 2. Pokja Perhutanan Sosial Nasional dan Provinsi (Divisi Pendampingan) 3. Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, OPD terkait lainnya) 4. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) 5. Mitra Pembangunan. 6. Pendamping Perhutanan Sosial: - Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, - Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, - Bakti Rimbawan, - Penyuluh K/L Terkait, - Penyuluh Kehutanan Swasta, - Badan Usaha Milik Negara, - Lembaga Swadaya Masyarakat, - Organisasi Masyarakat, - Praktisi, - Akademisi, - Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat.	
		Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	1. Fasilitasi kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 2. Peningkatan kapasitas kemitraan perhutanan sosail dan kemitraan lingkungan 3. Pengembangan jejaring kemitraan perhutanan soasial dan kemitraan lingkungan 4. Monitoring dan evaluasi pemberdyaan kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	1. Pemerintah Pusat (KLHK dan K/L terkait) 2. Pemerintah Daerah (OPD Terkait) 3. Lembaga Legislatif 4. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) 5. Akademisi/Perguruan Tinggi 6. Mitra Pembangunan 7. Lembaga Penelitian 8. Tokoh Masyarakat.	

	PERAN	OUTPUT PELAKSANA
	1. Pemerintah Pusat: - Memfasilitasi pengakuan MHA dan calon hutan adat 2. Pemerintah Daerah: - Menetapkan pengakuan MHA melalui perda atau produk hukum lainnya dan penetapan wilayah adat 3. MHA: - Menyampaikan usulan pengakuan MHA dan wilayah adat 4. Pendamping MHA: - Fasilitasi usulan pengakuan MHA dan wilayah adat	1. Produk hukum pengakuan MHA dan wilayah adat 2. Usulan Penetapan Status Hutan Adat
	1. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial 2. Menyusun NSPK Pendampingan Perhutanan Sosial 3. Melaksanakan sosialisasi, dan forum, pendampingan perhutanan sosial 4. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi	1. Tersusunnya perencanaan dan terlaksananya koordinasi kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial 2. Tersusunnya NSPK Pendampingan Perhutanan Sosial 3. Terlaksananya sosialisasi, dan forum, pendampingan Perhutanan Sosial 5. Terlaksananya supervisi, pemantauan dan evaluasi
	1. Melakukan fasilitasi pertemuan kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 3. Menyediakan jejaring kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdyaan kemitraan perhutanan sosail dan kemitraan lingkungan 5. Melakukan kerjasama mitra PSKL	1. Terfasilitasinya pertemuan kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas kemitraan perhutanan sosail dan kemitraan lingkungan 3. Tersedianya jejaring kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pemberdyaan kemitraan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 5. Keberhasilan kerjasama mitra PSKL

E.3. Para Pihak Kegiatan Kelompok Kerja 1.3.

Para pihak dalam kegiatan yang terlibat pada Pokja 1.3. terdiri dari 15 (lima belas) stakeholder yaitu: 1) Kementerian Dalam Negeri; 2) Bappenas; 3) Setjen KLHK; 4) Ditjen PHL; 5) Ditjen PKTL; 6) Ditjen PSKL; 7) Ditjen KSDAE; 8) Dinas LH Provinsi; 9) Dinas Kehutanan Provinsi; 10) KPH; 11) Akademisi; 12) Peneliti; 13) Media publikasi; 14) Lembaga Non Pemerintah (NGO); dan 15) Donor.

E.3.1. Implementasi Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman di areal PBPH-HT

PBPH-HT, Ditjen PHL, Ditjen PKTL, BPHL dan KPH bersinergis dalam:

TABEL 116. Tata waktu implementasi aksi mitigasi oleh PBPH-HT, Ditjen PHL, Ditjen PKTL, BPHL dan KPH

		Implementasi pada Triwulan ke-n															
		2022				2023				2024				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Ditjen PKTL menyiapkan citra awal sebagai baseline dan melakukan interpretasi citra tahun 2022 yang akan dishare ke BPHL dan KPH untuk melakukan monitoring di tapak.			Ö													
2	KPH melakukan identifikasi lapangan di tapak pada areal yang ditunjuk sebagai lokasi kegiatan aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman				Ö	Ö	Ö	Ö									
3	PBPH-HT yang lokasi targetnya berada dalam IPL 7-9, melakukan penanaman Hutan Tanaman sebagai upaya aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman.					Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö				
4	KPH dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PBPH yang telah melakukan penanaman tahun 2023 di lokasi target *Net Sink*.									Ö	Ö	Ö	Ö				

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

KPH dan Dinas LHK Provinsi bersinergis dalam kegiatan sebagaimana tabel 117:

TABEL 117. Tata waktu implementasi aksi mitigasi oleh KPH dan Dinas LHK

		Implementasi pada Triwulan ke-n															
		2022				2023				2024				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada upaya aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman.					Ö												

KPH, PBPH dan Ditjen PHL bersinergis dalam kegiatan sebagaimana tabel 118:

TABEL 118. Tata waktu implementasi aksi mitigasi oleh KPH , PBPH dan Ditjen PHL

		Implementasi pada Triwulan ke-n															
		2022				**2023**				**2024**				**2025**			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Melakukan koordinasi terkait dengan integrasi RPHJP dan RPHJPd di KPH dan RKUPH di PBPH dengan lokasi target Rencana FOLU *Net Sink* 2030 pada upaya mitigasi pembangunan hutan tanaman di area PBPH-HT seluas 1.346.368 ha.				Ö	Ö												

E.3.2. Implementasi Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari

KPH, PBPH dan Ditjen PHL bersinergis dalam kegiatan seperti terdapat pada tabel 119:

TABEL 119. Tata waktu mplementasi aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari pada KPH, PBPH dan Ditjen PHL

		Implementasi pada Triwulan ke-n															
		2022				**2023**				**2024**				**2025**			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Melakukan koordinasi terkait dengan integrasi RPHJP dan RPHJPd di KPH dan RKUPH di PBPH dengan lokasi target Rencana FOLU *Net Sink* 2030 pada upaya mitigasi implementasi RIL-C di area PBPH-HA seluas 4.380.952 ha dan di area PBPH-HT seluas 192.369 ha; serta penerapan SILIN di area PBPH-HA seluas 5.881.305 ha.			Ö	Ö												

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				**2027**				**2028**				**2029**				**2030**			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

		Implementasi pada Triwulan ke-n															
		2022				2023				2024				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Menyusun rencana aksi mitigasi pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HA dan PBPH-HT			Ö													
3	Menyusun rencana dan metode pemantauan dan evaluasi pada area target pelaksanaan kegiatan RIL-C di area PBPH-HA dan PBPH-HT				Ö												
4	Menyusun rencana aksi mitigasi pelaksanaan SILIN di area PBPH-HA			Ö													
5	Menyusun rencana dan metode pemantauan dan evaluasi pada area target pelaksanaan SILIN di area PBPH-HA				Ö												
6	Pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HA dengan IPL 7-8					Ö	Ö	Ö	Ö								
7	Pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HA dengan IPL 5-6									Ö	Ö	Ö	Ö				
8	Melakukan pemantauan pada area PBPH-HA dengan IPL 7-8 yang telah melaksanakan RIL-C di lokasi target *Net Sink*.									Ö	Ö	Ö	Ö				
9	Pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HT dengan IPL 7-8					Ö	Ö	Ö	Ö								
10	Pelaksanaan RIL-C di area PBPH-HT dengan IPL 5-6									Ö	Ö	Ö	Ö				
11	Pelaksanaan SILIN di area PBPH-HA dengan IPL 7-8					Ö	Ö	Ö	Ö								
12	Melakukan pemantauan pada area PBPH-HA dengan IPL 7-8 yang telah melaksanakan SILIN di lokasi target *Net Sink*.									Ö	Ö	Ö	Ö				
13	Pelaporan hasil kegiatan			Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö				

Dalam melakukan pemantauan di tapak, KPH dapat berkoordinasi dengan **Balai Pengelolaan Hutan Lestari** (BPHL) selaku UPT dari Ditjen PHL. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022, BPHL merupakan UPT yang menyelenggarakan pengelolaan hutan lestari yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

BPHL memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan. BPHL tersebar dan berkedudukan di 16 (enam belas) Kota dengan wilayah kerja mencakup 34 Provinsi, sebagaimana pada Gambar 3.

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

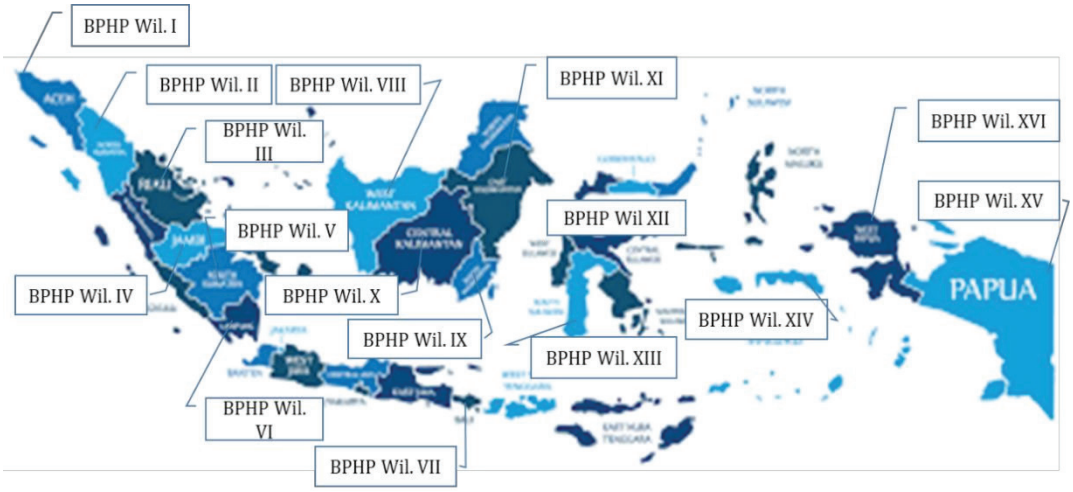

GAMBAR 3. Sebaran dan Kedudukan UPT BPHL Lingkup Ditjen PHL

TABEL 120. Implementasi aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari pada KPH dan Dinas LHK Provinsi

	Implementasi pada Triwulan ke-n															
	2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada upaya aksi mitigasi pengelolaan hutan lestari.				Ö												

E.3.3. Implementasi Aksi Mitigasi Degradasi Konsesi

Bappenas, Kemendagri, Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, Pemda Provinsi, Dinas LHK Provinsi bersinergis dalam kegiatan seperti terdapat pada tabel 121.

TABEL 121. Tata waktu implementasi aksi mitigasi pengurangan laju degradasi konsesi

		Implementasi pada Triwulan ke-n															
		2022				2023				2024				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mendorong upaya perlindungan hutan dengan kerangka pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).			Ö	Ö												
2	Penguatan peran pengelolaan hutan di KPH			Ö	Ö												
3	Ditjen KSDAE & Ditjen PSKL mendampingi KPH dalam implementasi perlindungan kawasan hutan, sebagai upaya mengurangi ancaman degradasi di area konsesi.					Ö	Ö	Ö	Ö								

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

KPH, PBPH dan Ditjen PHL bersinergis dalam implementasi aksi mitigasi pengurangan laju degradasi konsesi sebagaimana terdapat pada tabel 121.

TABEL 121. Tata waktu implementasi aksi mitigasi pengurangan laju degradasi konsesi pada KPH, PBPH dan Ditjen PHL

		Implementasi pada Triwulan ke-n															
		2022				2023				2024				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Melakukan koordinasi terkait dengan integrasi RPHJP dan RPHJPd di KPH dan RKUPH di PBPH dengan lokasi target Rencana FOLU *Net Sink* 2030 pada upaya mitigasi Degradasi Konsesi.			Ö	Ö												
2	Integrasi RKUPH PBPH dengan Rencana FOLU *Net Sink* 2030.				Ö												
3	Implementasi aksi mitigasi pengurangan degradasi di areal konsesi untuk PBPH-HA dan PBPH-HT yang berada pada IPL 7-9.					Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	/			

KPH dan Dinas LHK Provinsi bersinergis dalam dalam implementasi aksi mitigasi pengurangan laju degradasi konsesi sebagaimana terdapat pada tabel 122.

TABEL 122. Tata waktu implementasi aksi mitigasi pengurangan laju degradasi konsesi pada KPH dan Dinas LHK

	Implementasi pada Triwulan ke-n															
	2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada upaya aksi mitigasi degradasi konsesi.				Ö												

	Implementasi pada Triwulan ke-n																			
	2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

		Implementasi pada Triwulan ke-n																		
	2026				2027				2028				2029				2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

F. Pendanaan Kegiatan

Skema Pendanaan

Ketersediaan pendanaan memiliki peran penting dalam implementasi LTS menuju *Net Sink*, terutama investasi untuk sektor FOLU yang merupakan sektor kunci keberhasilan target *net zero emission* Indonesia pada tahun 2060. Pendanaan kegiatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan dapat dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/ Kabupaten/Kota, kemitraan pemerintah pusat dan daerah, kemitraan pemerintah dan swasta, hibah Luar Negeri/Dalam Negeri, serta sumber dana lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan pendanaan yang berlaku.

Pendanaan dari APBN/APBD menggambarkan komitmen pemerintah pusat/daerah terhadap aksi mitigasi perubahan iklim, sedangkan pendanaan internasional dapat berupa bilateral maupun multilateral. Pembiayaan bilateral pada umumnya berupa hibah yang disalurkan melalui lembaga pembangunan bilateral atau multilateral, sedangkan pembiayaan multilateral yang dapat berupa hibah, maupun pembayaran berbasis hasil (RBP REDD+), maupun bentuk pendanaan lainnya.

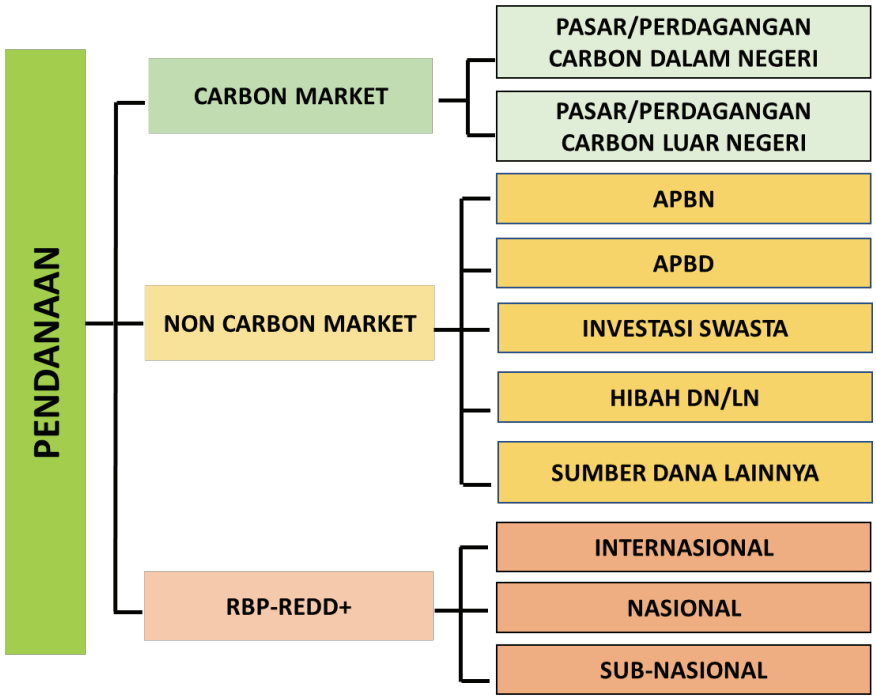

GAMBAR 4. Skema Pendanaan Menuju Pencapaian FOLU *Net Sink* 2030

Hibah sendiri merupakan pendanaan tanpa pengembalian, sedangkan ekuitas dan hutang

swasta melibatkan proses pengembalian dana dari hasil hutan, maupun jasa ekosistem seperti ekowisata. Meskipun terdapat potensi penggunaan dana dari pasar karbon internasional untuk sektor kehutanan, seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Paris, namun skema ini masih dalam pembahasan tingkat internasional terkait dengan kerangka akuntansi untuk menghindari perhitungan ganda (*double counting*) dan memastikan pemenuhan kaidah *additionality* (penurunan emisi tambahan murni dari adanya dukungan internasional). Di samping itu perlu dikaji konsekuensi terhadap keberlanjutan/ketersediaan pendanaan REDD+ berupa *Result Based Payment*/RBP tanpa pemindahan kredit karbon ke luar negeri sejalan dengan kesepakatan dalam *Warsawa Framework* tentang REDD+.

Seperti yang tertuang dalam dokumen LTS-LCCR Indonesia, skenario paling ambisius LTS-LCCP diestimasikan akan menghasilkan pertumbuhan tahunan investasi nasional sebesar 4.13% dengan total investasi sebesar Rp. 73.3 milyar rupiah pada tahun 2050 yang diikuti dengan peningkatan tenaga kerja di bidang *green jobs* (*Republic of Indonesia* 2021). Namun, apabila komitmen sektor FOLU menuju *net-sink* 2030 tidak diikuti dengan pendanaan yang memadai dalam waktu yang cepat, aksi mitigasi dapat terhambat dan meningkatkan risiko sektor FOLU untuk memasuki kondisi *locked-in* yang justru akan membutuhkan pendanaan yang jauh lebih besar untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan terdegradasi parah. Ambisi Indonesia yang ditunjukkan dalam LTS skenario LCCP, tidak akan mungkin dicapai tanpa dukungan berbagai pihak baik nasional maupun internasional (situasi *conditional* dan *unconditional* seharusnya tidak menjadi batasan).

Sebagaimana diuraikan pendanaan tidak hanya bersumber dari pemerintah, namun dukungan pendanaan dan keterlibatan berbagai pihak menjadi sangat penting. Beragam skenario kombinasi pendanaan dan kebijakan juga telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebagai contoh: aspek pendanaan tidak selalu akan berasal dari APBN dan APBD, namun secara praktis juga telah berkembang upaya-upaya dengan dukungan dana swasta dalam bentuk KPBU, dan CSR swasta serta dalam bentuk *in-natura* yang merupakan pelaksanaan kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk tambang yaitu berupa kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Bentuk-bentuk pembiayaan antara lain seperti yang telah berlangsung selama ini melalui kegiatan kerjasama antara masyarakat dan dunia usaha dalam penanaman pohon termasuk oleh anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat serta bentuk adopsi pohon. Bentuk kewajiban lain dunia usaha juga melalui penetapan dan pemeliharaan kawasan lindung serta langkah teknis mengurangi deforestasi melalui *reduce-impact logging* serta pengembangan *site silviculture* yang akan menghasilkan tanaman kayu keras jenis endemik.

Dalam perkembangan pengaturan dan pengakuan nilai ekonomi karbon dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, maka inisiatif masyarakat dunia usaha dan kelompok komunitas, untuk memanfaatkan nilai ekonomi karbon dengan langkah-langkah spontan melalui penanaman pohon yang nantinya dapat dihitung dengan sistem *Result-Based Payment* dan sistem distribusi pendapatan yang sedang terus dibangun oleh KLHK dengan format pembinaan serta aturan main (*rule base*). Upaya lain yang sedang terus dibangun ialah kerjasama teknis seperti program pengelolaan mangrove dan tata kelola gambut serta Perhutanan Sosial dengan dukungan dana internasional seperti *World Bank*, Jerman, Uni-Eropa, ASEAN dan lain-lain.

Dalam hal ini, konsep pembiayaan untuk mencapai target FOLU *Net Sink* 2030 membutuhkan strategi yang komprehensif, dimulai dari meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan kapasitas lembaga keuangan, hingga meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengakses pendanaan. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem dan mekanisme pendanaan untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti yang ditujukkan pada Gambar 5.

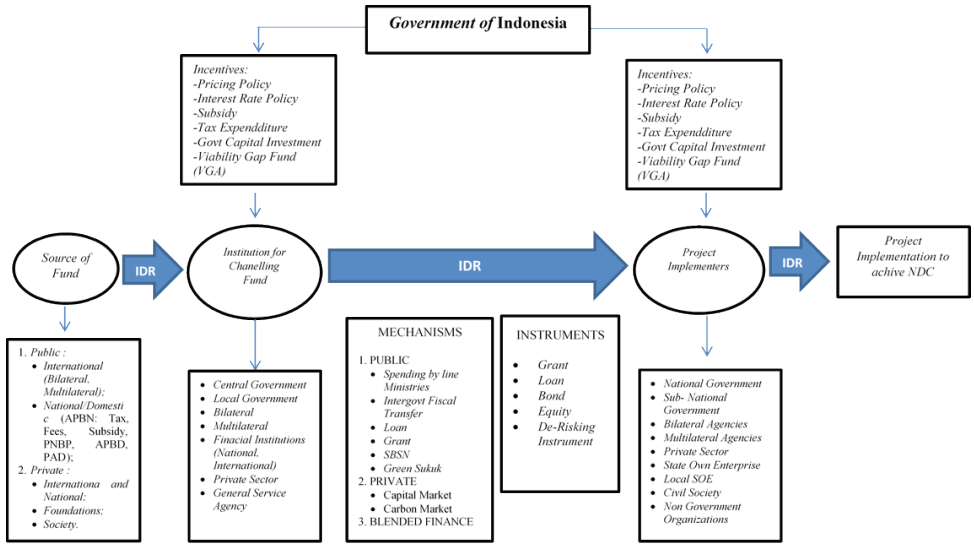

GAMBAR 5. Sistem pendanaan untuk mendukung implementasi aksi mitigasi perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019)

Identifikasi sumber pendanaan untuk pelaksanaan aksi mitigasi sektor kehutanan periode 2021-2030 menghasilkan estimasi pembagian dana sebesar 45% dari pemerintah dan 55% dari pihak swasta (KLHK, 2021). Sumber pendanaan dari pemerintah yang di distribusikan berasal dari optimasi pendanaan di tingkat pusat (APBN) melalui: a) instrumen green sukuk dan pasar karbon domestik (Nilai Ekonomi Karbon), b) transfer anggaran berbasis ekologi, c) optimasi pendanaan di tingkat daerah melalui intrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan obligasi hijau daerah dan d) optimasi skema *Result-Based Payment* untuk REDD+. Sementara untuk sumber swasta akan diarahkan pada instrumen investasi, hibah, obligasi hijau, pinjaman, ekuitas swasta, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lain-lain.

Untuk optimasi pendanaan pusat dan daerah (APBN dan APBD), peluang pendanaan yang potensial adalah *green sukuk*/*green bonds*, Nilai Ekonomi Karbon, dan transfer fiskal antar pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah memiliki rekam jejak yang baik dalam menarik investasi sebesar USD 1,25 miliar melalui skema obligasi hijau *green sukuk* pada tahun 2018. Meskipun pasar obligasi hijau/*green bonds* sudah berkembang pesat di tingkat internasional, implementasi pasar obligasi hijau di negara berkembang masih memerlukan evaluasi tahap awal untuk proses teknis pelaksanaannya (definisi kelas aset, penetapan standar, penataan transaksi, dan upaya menarik investor). Selain obligasi hijau, instrumen transfer fiskal antar pemerintah yang dimodifikasi dengan menggunakan parameter ekologi.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam tahap pengembangan pasar domestik karbon yang akan diarahkan melalui skema pungutan dan pajak dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Mekanisme NEK dan kerangka transparansi sebagiamana tertera pada Gambar 6 dan Gambar 7.

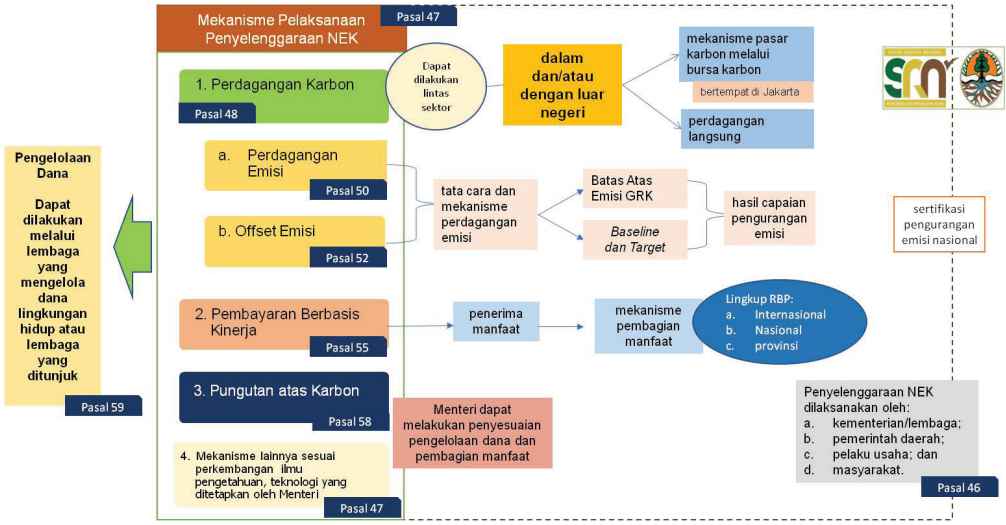

GAMBAR 6. Tata Laksana Penyelenggaraan Instrumen NEK

GAMBAR 7. Kerangka Transparansi dalam Implementasi NEK

Dibandingkan dengan sumber pendanaan dari pemerintah, pembiayaan dari swasta untuk aksi mitigasi sektor kehutanan masih sangat minim dan didominasi oleh kegiatan komersial dan produk kehutanan. Namun, minimnya kontribusi swasta juga dapat dikarenakan ketidaktersediaan informasi pembiayaan dari swasta akibat sistem pengumpulan data yang belum terintegrasi. Meskipun banyak skema potensial yang dapat digunakan untuk melibatkan pihak swasta (ekuitas, hutang swasta, CSR, obligasi hijau, asuransi, kredit mikro, dll). Opsi yang dapat dilakukan adalah dengan mempertimbangkan skema jaminan yang fungsinya menanggung pembagian risiko agar dapat mendorong investasi swasta terkait perubahan iklim di sektor kehutanan.

Pendanaan melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) juga menjadi alternatif pendanaan yang potensial, mengingat potensi dukungan BPDLH dalam upaya membangun lingkungan melalui skema; *small grants*, investasi dan *capacity building* bagi masyarakat dan bagi aparat pemerintah. Pada saat ini, BPDLH telah selesai tahapan untuk penetapan Lembaga penyalur pendanaan.

Selain sumber pembiayaan swasta dan pemerintah, eksplorasi terhadap potensi sumber lain juga harus dilakukan, misalnya *Payment for Ecosystem Services* (PES) yang sudah banyak dikaji dalam berbagai studi. Perlindungan terhadap ekosistem dengan jasa regulasi penting, yang didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, dapat dijadikan dasar penentuan pembayaran dari skema PES. Namun dalam mengidentifikasi sumber pendanaan lain, perlu dilakukan analisis kelayakan terkait besar potensi pendanaan dan ketersediaan dana yang akan berkaitan erat dengan potensi keberlanjutan program.

Kebutuhan Pendanaan

Jumlah total kebutuhan pembiayaan bidang 1 sebesar 184,24 Trilyun rupiah dengan masing-masing penjabaran kebutuhan pembiayaan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel . Kebutuhan terbesar dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman dan multiusaha (RIL-C dan ENR) karena mengingat besarnya target lokasi prioritas FOLU pada kegiatan mitigasi tersebut.

TABEL 123. Tabel Kebutuhan Pendanaan untuk Masing-Masing Aksi Mitigasi

Kegiatan	Kebutuhan pendanaan (trilyun rupiah)
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	37,17
Perhutanan Sosial	0,96
Multiusaha (RIL-C dan ENR)	69,55
Pembangunan hutan tanaman	76,56
Total	184,24

Rencana pendanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan difokuskan untuk areal dengan tingkat kerawanan sangat tinggi seluas 3.496.467 juta hektar dengan asumsi dana yang dibutuhkan sebesar Rp.10,63 juta/ha sehingga total kebutuhan dana sebesar Rp.37.17 trilyun. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan

Negara Tahun Anggaran 2021 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa APBN Indonesia tahun 2021 sebesar Rp 1.743,65 trilyun. Berdasarkan perhitungan, maka kebutuhan dana yang diperlukan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan mencapai 2.13% dari total APBN Indonesia. Anggaran Kementerian LHK tahun 2021 total sebesar Rp 8,57 trilyun didalamnya ada dana untuk "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" sebesar Rp 2,74 trilyun. Perhitungan dana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan mencapai 10.4 kali lebih besar dari total anggaran KLHK dan 13.56 kali lebih besar dari anggaran Perubahan Iklim.

Diprediksikan dana yang bersumber dari Pemerintah (APBN dan APBD) untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan Rp 0,7 trilyun dihitung sebesar 25% dari total anggaran Perubahan Iklim sebesar Rp 2,74 trilyun. Kekurangan dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih sangat besar sekitar Rp 30,17 trilyun diharapkan dari *carbon market* (*mandatory carbon market* dan *voluntary carbon market*) dan *non carbon market* (investasi swasta, hibah dalam negeri, hibah luar negeri, dan sumber lainnya yang tidak mengikat).

Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung pengelolaan hutan lestari memerlukan total pendanaan sebesar Rp 963.035.550.000,- pada periode 2022 – 2030. Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 ditampilkan pada Tabel 24 dan Tabel 25. Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 ditampilkan pada Tabel 26 dan Tabel 27. Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 ditampilkan pada Tabel 28 dan Tabel 29. Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 ditampilkan pada Tabel 30, Tabel 31, Tabel 32 dan Tabel 33. Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 ditampilkan pada Tabel 34 dan Tabel 35. Pendanaan kegiatan PS dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 ditampilkan pada Tabel 36, Tabel 37 dan Tabel 38. Sedangkan pendanaan kegiatan Multiusaha (RIL-C dan ENR) dan Pembangunan hutan tanaman pada luas lokasi prioritas FOLU dikalikan dengan standar kebutuhan biaya untuk masisng-masing aksi mitigasi berdasarkan Buku Renop's Indonesia FOLU Netsink Tabel 146.

Sistem Insentif Pendanaan

Alternatif insentif anggaran program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan:

1. Semua dana hibah perubahan iklim dimasukkan dalam APBN, selanjutnya disalurkan melalui BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup);
2. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 mekanisme insentif melalui DID (Dana Insentif Daerah) untuk daerah yang melakukan konservasi atau penurunan emisi; dan
3. Dalam Perpres 98 Tahun 2021 semua pendanaan perubahan iklim melalui *focal point* Pemerintah (KLHK).

03

Penutup

BAB III. KESIMPULAN

Indonesia's FOLU *Net Sink* 2030 merupakan sebuah program yang akan dijalankan, sebagai terobosan baru dalam rangka percepatan pengutanan tata kelola lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan. Aksi mitigasi yang akan dilaksanakan pada dasarnya adalah kegiatan *business as usual* yang telah tersedia di sektor kehutanan. Namun demikian, aksi mitigasi akan dilaksanakan dengan target kinerja yang lebih ambisius, melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis.

Indonesia's FOLU *Net Sink* 2030 memberikan target pembangunan yang sangat terfokus dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan sektor kehutanan, seluruh program kegiatan memiliki satuan volume ukur yang sama, yaitu CO2e. Sebelumnya target-target kinerja menggunakan berbagai satuan volume, seperti Rupiah, m^3, ton, dan lain sebagainya. *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

Berdasarkan Buku Renop FOLU NET SINK 2030,target luasan dan lokasi bidang PHL Seluas 8.715.438ha. Sedangkan target total bidang PHL seluas 20.386.187ha yang terdiri dari deforestasi mineral seluas 1.823.630, deforestasi gambut seluas 962.461, degradasi konsesi 5.930.955 , ENR 7.095.778,dan RIL-C 4.573.363 ha. Maka dari itu terdapat selisih luas target LTS 2030 dan luas eksisting sebesar 11.670.749 ha lebih besar. Dimaksudkan bahwa target lokasi 2,5 kali lebih besar dari target LTS sehingga bidang PHL dapat memberikan kontribusi besar dalam tercapainya FOLU Net Sink ditahun 2030.

Luasnya target lokasi bidang PHL berimplikasi pula pada kebutuhan dana yang diperlukan. Pendanaan yang diperlukan untuk seluruh kegiatan sebesar 407 Trilyun rupiah. Yang nantinya dapat dialokasikan dari APBN dan Non APBN seperti a) instrumen green sukuk dan pasar karbon domestik (Nilai Ekonomi Karbon), b) transfer anggaran berbasis ekologi, c) optimasi pendanaan di tingkat daerah melalui intrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan obligasi hijau daerah dan d) optimasi skema *Result-Based Payment* untuk REDD+. Sementara untuk sumber swasta akan diarahkan pada instrumen investasi, hibah, obligasi hijau, pinjaman, ekuitas swasta, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lain-lain.

Indonesia's FOLU *Net Sink* 2030 menggunakan modalitas kerja atas 3 (tiga) pijakan dasar utama yaitu: *Sustainable Forest Management*, *Environmental Governance*, dan *Carbon Governance*. Pada saat ini Indonesia masih membutuhkan upaya untuk menyelesaikan berbagai prakondisi *Carbon Governance*. Isu tata cara perdagangan karbon masih terus dibahas dan dikembangkan oleh pemerintah bersama pihak, dan tentunya ini akan menjadi modalitas utama berikutnya yang menjadi sangat prioritas diselesaikan sebagai salah satu kondisi pemungkin terimplementasikannya *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjen PPI KLHK. (2016). Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia. In *Http://Ditjenppi.Menlhk.Go.Id/* (pp. 1–18). http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf

Gunarso, P., Setyawati, T., Sunderland, T., & Shackleton, C. (2009). Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi: pelajaran yang dipetik dari hutan penelitian Malinau, Kalimantan Timur, Indonesia. In *Laporan teknis ITTO PD 39/00 Rev. 3(F)* (Issue March 2015). Cifor. https://doi.org/10.17528/cifor/002985

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Peta Jalan Implementasi Nationally Determined Contribution Mitigasi*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KLHK. (2021). *Kerangka Kerja Investasi untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peningkatan Stok Karbon Hutan (REDD+) di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Napitu, J. P., Hidayat, A., Basuni, S., & Sjaf, S. (2017). Mekanisme Akses Pada Hak Kepemilikan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, *14*(2), 101–118. https://doi.org/10.20886/jpsek.2017.14.2.101-118

Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). Penyuluhan perhutanan sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Jurnal BUDIMAS*, *03*(02), 545–549.

Republic of Indonesia. (2021). *Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)*.

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, *68*(2), 153–181.

Saharjo, B. H., & Yungan, A. (2014). Pengaruh kebijakan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. *Jurnal Silvikultur Tropika*, *05*(2), 124–130.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL 124. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Utara	1	2,22	-	20	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Barat	1	0,01	-	20	-	-	-	-	-	-	-
3	Riau	24	793,11	-	20	40	100	100	100	60	40	20
4	Jambi	6	203,15	-	20	20	20	20	20	20	-	-
5	Sumatera Selatan	4	11,05	-	-	20	20	20	20	-	-	-
6	Bengkulu	2	0,11	-	20	20	-	-	-	-	-	-
7	Lampung	1	0,95	-	20	-	-	-	-	-	-	-
8	Kepulauan Bangka Belitung	3	0,02	-	20	20	20	-	-	-	-	-
9	Nusa Tenggara Barat	1	1,22	-	-	20	-	-	-	-	-	-
10	Nusa Tenggara Timur	1	181,57	-	-	20	-	-	-	-	-	-
11	Kalimantan Barat	17	337,11	-	20	40	60	60	60	40	40	20
12	Kalimantan Tengah	37	1.759,17	-	40	40	120	180	180	100	40	40
13	Kalimantan Selatan	5	2,52	-	20	20	20	20	20	-	-	-
14	Kalimantan Timur	20	824,85	-	20	60	60	60	60	60	40	40
15	Kalimantan Utara	6	16,69	-	20	20	20	20	20	20	-	-
16	Sulawesi Utara	1	0,00	-	20	-	-	-	-	-	-	-
17	Sulawesi Tengah	9	260,00	-	20	20	40	40	20	20	20	-
18	Maluku	13	689,80	-	20	40	40	40	40	40	20	20
19	Maluku Utara	6	205,15	-	20	20	20	20	20	20	-	-
20	Papua	3	60,10	-	20	20	20	-	-	-	-	-
21	Papua Barat	1	0,13	-	20	-	-	-	-	-	-	-
	Total	162	5.349	-	380	440	560	580	560	380	200	140

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	200	500	500	500	300	200	100	-	80	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
	-	0	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	200	300	300	300	200	200	100	-	80	80	-	-	-	-	-	-
	-	200	200	600	900	900	500	200	200	-	80	80	80	80	-	-	-	-
	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	300	300	300	300	300	200	200	-	-	80	80	0	-	-	-	-
	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	200	200	100	100	100	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
	-	100	200	200	200	200	200	100	100	-	-	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.900	2.200	2.800	2.900	2.800	1.900	1.000	700	-	320	640	240	80	-	-	-	-

TABEL 125. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pengayaan alami pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Sumatera Utara	1	2,22	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2	Sumatera Barat	1	0,01	36	36	36	36	36	36	36	36	36
3	Riau	24	793,11	864	864	864	864	864	864	864	864	864
4	Jambi	6	203,15	216	216	216	216	216	216	216	216	216
5	Sumatera Selatan	4	11,05	144	144	144	144	144	144	144	144	144
6	Bengkulu	2	0,11	72	72	72	72	72	72	72	72	72
7	Lampung	1	0,95	36	36	36	36	36	36	36	36	36
8	Kepulauan Bangka Belitung	3	0,02	108	108	108	108	108	108	108	108	108
9	Nusa Tenggara Barat	1	1,22	36	36	36	36	36	36	36	36	36
10	Nusa Tenggara Timur	1	181,57	36	36	36	36	36	36	36	36	36
11	Kalimantan Barat	17	337,11	612	612	612	612	612	612	612	612	612
12	Kalimantan Tengah	37	1.759,17	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332
13	Kalimantan Selatan	5	2,52	180	180	180	180	180	180	180	180	180
14	Kalimantan Timur	20	824,85	720	720	720	720	720	720	720	720	720
15	Kalimantan Utara	6	16,69	216	216	216	216	216	216	216	216	216
16	Sulawesi Utara	1	0,00	36	36	36	36	36	36	36	36	36
17	Sulawesi Tengah	9	260,00	324	324	324	324	324	324	324	324	324
18	Maluku	13	689,80	546	546	546	546	546	546	546	546	546
19	Maluku Utara	6	205,15	252	252	252	252	252	252	252	252	252
20	Papua	3	60,10	126	126	126	126	126	126	126	126	126
21	Papua Barat	1	0,13	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	Total	162	5.349	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5
	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
	260	260	260	260	260	260	260	260	260
	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198

TABEL 126. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Aceh	11	2.471,34	-	20	40	40	40	40	20	20	-
2	Sumatera Utara	11	473,49	-	20	40	40	40	40	20	20	-
3	Sumatera Barat	5	252,57	-	20	20	20	20	20	-	-	-
4	Jambi	78	23.742,43	-	120	180	240	300	220	200	180	120
5	Sumatera Selatan	20	4.442,33	-	40	40	60	80	60	40	40	40
6	Bengkulu	1	16,24	-	20	-	-	-	-	-	-	-
7	Lampung	27	777,95	-	20	60	100	140	100	60	40	20
8	Kepulauan Bangka Belitung	38	3.096,22	-	40	40	100	200	200	100	40	40
9	Kepualaun Riau	6	707,63	-	20	20	20	20	20	20	-	-
10	Jawa Barat	15	1.699,26	-	20	40	40	60	40	40	40	20
11	Jawa Tengah	36	3.703,54	-	40	40	100	180	180	100	40	40
12	Jawa Timur	146	12.759,55	-	200	360	400	400	400	400	400	360
13	Banten	6	362,65	-	20	20	20	20	20	20	-	-
14	Bali	4	485,41	-	-	20	20	20	20	-	-	-
15	Nusa Tenggara Barat	26	2.223,21	-	20	60	100	120	100	60	40	20
16	Nusa Tenggara Timur	37	2.499,88	-	40	40	120	180	180	100	40	40
17	Kalimantan Barat	21	1.793,55	-	20	60	80	80	80	40	40	20
18	Kalimantan Tengah	67	11.442,29	-	60	120	200	240	240	240	200	40
19	Kalimantan Selatan	23	3.081,81	-	20	60	80	80	80	60	40	40
20	Kalimantan Timur	25	8.561,48	-	20	60	100	100	100	60	40	20
21	Kalimantan Utara	8	2.076,71	-	20	20	40	40	20	20	0	0
22	Sulawesi Utara	7	463,28	-	20	20	20	40	20	20	0	0
23	Sulawesi Tengah	28	3.347,44	-	40	60	100	140	100	60	40	20
24	Sulawesi Selatan	23	4.145,71	-	20	60	80	80	80	60	40	40
25	Sulawesi Tenggara	74	7.571,45	-	120	180	220	240	220	200	180	120
26	Gorontalo	17	1.389,12	-	20	40	60	60	60	40	40	20
27	Sulawesi Barat	1	659,79	-	20	-	-	-	-	-	-	-
28	Maluku	32	10.839,02	-	40	40	100	160	120	100	40	40

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	100	200	200	200	200	100	100	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	200	200	200	200	100	100	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
	-	600	900	1200	1500	1100	1000	900	600	-	80	80	80	80	80	80	80	80
	-	200	200	300	400	300	200	200	200	-	80	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	300	500	700	500	300	200	100	-	-	80	80	80	-	-	-	-
	-	200	200	500	1000	1000	500	200	200	-	-	80	80	80	80	-	-	-
	-	100	100	100	100	100	100	0	0	-	80	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	200	200	300	200	200	200	100	-	-	80	80	-	-	-	-	-
	-	200	200	500	900	900	500	200	200	-	-	80	80	80	80	-	-	-
	-	1000	1800	2000	2000	2000	2000	2000	1800	-	160	160	160	160	160	160	160	80
	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	300	500	600	500	300	200	100	-	-	80	80	80	-	-	-	-
	-	200	200	600	900	900	500	200	200	-	80	80	80	80	-	-	-	-
	-	100	300	400	400	400	200	200	100	-	0	0	80	80	-	-	-	-
	-	300	600	1000	1200	1200	1200	1000	200	-	0	80	80	80	80	80	80	80
	-	100	300	400	400	400	300	200	200	-	0	80	80	-	-	-	-	-
	-	100	300	500	500	500	300	200	100	-	80	80	80	-	-	-	-	-
	-	100	100	200	200	100	100	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	200	100	100	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	300	500	700	500	300	200	100	-	-	80	80	80	-	-	-	-
	-	100	300	400	400	400	300	200	200	-	-	80	80	-	-	-	-	-
	-	600	900	1100	1200	1100	1000	900	600	-	-	80	80	80	80	80	80	80
	-	100	200	300	300	300	200	200	100	-	80	80	-	-	-	-	-	-
	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	200	500	800	600	500	200	200	-	-	80	80	80	-	-	-	-

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
29	Maluku Utara	5	775,80	-	20	20	20	20	20	-	-	-
30	Papua	2	44,69	-	-	20	20	-	-	-	-	-
31	Papua Barat	6	135,28	-	20	20	20	20	20	20	-	-
	Total	806	116.041	-	1.120	1.800	2.560	3.120	2.800	2.100	1.560	1.060

TABEL 127. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Aceh	11	2.471,34	396	396	396	396	396	396	396	396	396
2	Sumatera Utara	11	473,49	396	396	396	396	396	396	396	396	396
3	Sumatera Barat	5	252,57	180	180	180	180	180	180	180	180	180
4	Jambi	78	23.742,43	2808	2808	2808	2808	2808	2808	2808	2808	2808
5	Sumatera Selatan	20	4.442,33	720	720	720	720	720	720	720	720	720
6	Bengkulu	1	16,24	36	36	36	36	36	36	36	36	36
7	Lampung	27	777,95	972	972	972	972	972	972	972	972	972
8	Kepulauan Bangka Belitung	38	3.096,22	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368
9	Kepualaun Riau	6	707,63	216	216	216	216	216	216	216	216	216
10	Jawa Barat	15	1.699,26	540	540	540	540	540	540	540	540	540
11	Jawa Tengah	36	3.703,54	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296
12	Jawa Timur	146	12.759,55	5256	5256	5256	5256	5256	5256	5256	5256	5256
13	Banten	6	362,65	216	216	216	216	216	216	216	216	216
14	Bali	4	485,41	144	144	144	144	144	144	144	144	144
15	Nusa Tenggara Barat	26	2.223,21	936	936	936	936	936	936	936	936	936
16	Nusa Tenggara Timur	37	2.499,88	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	100	100	100	100	100	100	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
	-	5.600	9.000	12.800	15.600	14.000	10.500	7.800	5.300	-	960	1.680	1.440	1.040	560	400	400	320

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5
	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5
	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
	975	975	975	975	975	975	975	975	975
	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5	337,5
	475	475	475	475	475	475	475	475	475
	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5
	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825
	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	325	325	325	325	325	325	325	325	325
	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
17	Kalimantan Barat	21	1.793,55	756	756	756	756	756	756	756	756	756
18	Kalimantan Tengah	67	11.442,29	2412	2412	2412	2412	2412	2412	2412	2412	2412
19	Kalimantan Selatan	23	3.081,81	828	828	828	828	828	828	828	828	828
20	Kalimantan Timur	25	8.561,48	900	900	900	900	900	900	900	900	900
21	Kalimantan Utara	8	2.076,71	288	288	288	288	288	288	288	288	288
22	Sulawesi Utara	7	463,28	252	252	252	252	252	252	252	252	252
23	Sulawesi Tengah	28	3.347,44	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
24	Sulawesi Selatan	23	4.145,71	828	828	828	828	828	828	828	828	828
25	Sulawesi Tenggara	74	7.571,45	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2664
26	Gorontalo	17	1.389,12	612	612	612	612	612	612	612	612	612
27	Sulawesi Barat	1	659,79	36	36	36	36	36	36	36	36	36
28	Maluku	32	10.839,02	1344	1344	1344	1344	1344	1344	1344	1344	1344
29	Maluku Utara	5	775,80	210	210	210	210	210	210	210	210	210
30	Papua	2	44,69	84	84	84	84	84	84	84	84	84
31	Papua Barat	6	135,28	252	252	252	252	252	252	252	252	252
	Total	806	116.041	29.286	29.286	29.286	29.286	29.286	29.286	29.286	29.286	29.286

TABEL 128. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/ pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Barat	2	16,04	-	40	-	-	-	-	-	-	-
2	Riau	33	17.067,46	-	40	40	80	180	160	80	40	40
3	Jambi	4	45,31	-	-	40	40	0	0	0	0	-

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5
	837,5	837,5	837,5	837,5	837,5	837,5	837,5	837,5	837,5
	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5
	312,5	312,5	312,5	312,5	312,5	312,5	312,5	312,5	312,5
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5	287,5
	925	925	925	925	925	925	925	925	925
	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	200	400	900	800	400	200	200	-	80	80	80	-	-	-	-	-
	-	-	200	200	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	Sumatera Selatan	16	891,32	-	-	40	40	80	80	40	40	-
5	Bengkulu	5	915,68	-	40	60	-	-	-	-	-	-
6	Lampung	3	277,43	-	-	20	40	-	-	-	-	-
7	Kalimantan Barat	38	13.735,29	-	40	40	100	200	200	100	40	40
8	Kalimantan Tengah	70	24.639,64	-	160	160	200	200	200	160	160	160
9	Kalimantan Selatan	8	494,79	-	-	40	40	40	40	-	-	-
10	Kalimantan Timur	21	4.776,93	-	60	60	60	60	60	60	60	-
	TOTAL	200	62.859,91	-	380	500	600	760	740	440	340	240

TABEL 129. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Barat	2	16,04	72	72	72	72	72	72	72	72	72
2	Riau	33	17.067,46	1188	594	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188
3	Jambi	4	45,31	144	72	144	144	144	144	144	144	144
4	Sumatera Selatan	16	891,32	576	288	576	576	576	576	576	576	576
5	Bengkulu	5	915,68	180	90	180	180	180	180	180	180	180
6	Lampung	3	277,43	108	54	108	108	108	108	108	108	108
7	Kalimantan Barat	38	13.735,29	1368	684	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368
8	Kalimantan Tengah	70	24.639,64	2520	1260	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520
9	Kalimantan Selatan	8	494,79	288	144	288	288	288	288	288	288	288
10	Kalimantan Timur	21	4.776,93	756	378	756	756	756	756	756	756	756
	TOTAL	200	62.859,91	7200	3636	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	-	200	200	400	400	200	200	0	-	80	80	-	-	-	-	-	-
	-	200	300	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	200	500	1000	1000	500	200	200	-	80	80	80	80	-	-	-	-
	-	800	800	1000	1000	1000	800	800	800	-	80	80	80	80	80	80	80	-
	-	-	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
	-	300	300	300	300	300	300	300	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-
	-	1900	2500	3000	3800	3700	2200	1700	1200	-	400	320	400	240	80	80	80	-

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5	412,5
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	475	475	475	475	475	475	475	475	475
	875	875	875	875	875	875	875	875	875
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	262,5	262,5	262,5	756	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5
	2500	2500	2500	2993,5	2500	2500	2500	2500	2500

TABEL 130. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	SUMATERA BARAT	1	134	13,35	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RIAU	46	9.180	918,02	-	-	-	-	-	-	-	-
3	JAMBI	13	870	87,03	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUMATERA SELATAN	7	41	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BENGKULU	8	1.249	124,86	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KALIMANTAN BARAT	65	28.822	2.882,16	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KALIMANTAN TENGAH	38	12.634	1.263,36	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KALIMANTAN SELATAN	9	2.588	-	258,82	-	-	-	-	-	-	-
9	KALIMANTAN TIMUR	21	20.369	-	2.036,86	-	-	-	-	-	-	-
10	KALIMANTAN UTARA	1	1	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		75.886	5.292,89	2.295,74	-	-	-	-	-		-

TABEL 131. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan serta jasling

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	SUMATERA BARAT	1	134	-	20	-	-	-	-	-	-	-
2	RIAU	46	9.180	-	40	40	160	200	200	200	40	40
3	JAMBI	13	870	-	20	40	40	40	40	40	20	20
4	SUMATERA SELATAN	7	41	-	20	20	20	20	20	20	20	-
5	BENGKULU	8	1.249	-	20	20	20	20	20	20	20	20
6	KALIMANTAN BARAT	65	28.822	-	40	100	240	240	240	240	100	100
7	KALIMANTAN TENGAH	38	12.634	-	40	40	100	160	180	160	40	40
8	KALIMANTAN SELATAN	9	2.588	-	20	20	20	40	20	20	20	20
9	KALIMANTAN TIMUR	21	20.369	-	20	40	80	80	80	40	40	40
10	KALIMANTAN UTARA	1	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		75.886	-	260	320	680	800	800	740	300	280

	INDIKATOR KINERJA : Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	6,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	459,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	43,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	62,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.441,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	631,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	129,41	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.018,43	-	-	-	-	-	-	-
	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-
	2.646,44	1.147,87	-	-	-	-	-	-	-

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	100	-	-	-	-	-	-	-
	-	200	200	800	1.000	1.000	1.000	200	200
	-	100	200	200	200	200	200	100	100
	-	100	100	100	100	100	100	100	-
	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	200	500	1.200	1.200	1.200	1.200	500	500
	-	200	200	500	800	900	800	200	200
	-	100	100	100	200	100	100	100	100
	-	100	200	400	400	400	200	200	200
	-	100	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.300	1.600	3.400	4.000	4.000	3.700	1.500	1.400

TABEL 132. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kelompok KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum, jumlah tenaga pendamping Perhutanan Sosial

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	SUMATERA BARAT	1	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RIAU	46	9.180	-	80	80	80	80	80	-	-	-
3	JAMBI	13	870	-	80	-	-	-	-	-	-	-
4	SUMATERA SELATAN	7	41	-	80	-	-	-	-	-	-	-
5	BENGKULU	8	1.249	-	80	-	-	-	-	-	-	-
6	KALIMANTAN BARAT	65	28.822	-	80	80	80	80	80	80	80	-
7	KALIMANTAN TENGAH	38	12.634	-	80	80	80	80	-	-	-	-
8	KALIMANTAN SELATAN	9	2.588	-	80	-	-	-	-	-	-	-
9	KALIMANTAN TIMUR	21	20.369	-	80	80	-	-	-	-	-	-
10	KALIMANTAN UTARA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		75.886	-	640	320	240	240	160	80	80	-

TABEL 133. Target volume aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah mineral pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	SUMATERA BARAT	1	134	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
2	RIAU	46	9.180	-	575	575	575	575	575	575	575	575
3	JAMBI	13	870	-	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
4	SUMATERA SELATAN	7	41	-	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
5	BENGKULU	8	1.249	-	100	100	100	100	100	100	100	100
6	KALIMANTAN BARAT	65	28.822	-	812,5	812,5	812,5	812,5	812,5	812,5	812,5	812,5
7	KALIMANTAN TENGAH	38	12.634	-	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0	475,0
8	KALIMANTAN SELATAN	9	2.588	-	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
9	KALIMANTAN TIMUR	21	20.369	-	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5
10	KALIMANTAN UTARA	1	1	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	TOTAL		75.886	-	2.612,5	2.612,5	2.612,5	2.612,5	2.612,5	2.612,5	2.612,5	2.612,5

	INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	-	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
	-	468	468	468	468	468	468	468	468
	-	252	252	252	252	252	252	252	252
	-	288	288	288	288	288	288	288	288
	-	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	-	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
	-	324	324	324	324	324	324	324	324
	-	756	756	756	756	756	756	756	756
	-	36	36	36	36	36	36	36	36
	-	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524

TABEL 134. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja rencana kerja/ pengelolaan KPS yang disahkan, fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Utara	1	19,07	-	200	-	-	-	-	-	-	-
2	Riau	37	26.945,33	-	400	400	1000	2000	1800	1000	400	400
3	Jambi	6	6.965,35	-	-	400	400	400	-	-	-	-
4	Sumatera Selatan	1	1.705,55	-	200	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalimantan Barat	29	30.121,00	-	400	600	1000	1400	1000	600	400	400
6	Kalimantan Tengah	19	32.250,36	-	400	400	600	600	600	400	400	400
7	Kalimantan Timur	2	20,12	-	400	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	95	98.026,79	-	2000	1800	3000	4400	3400	2000	1200	1200

TABEL 135. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal definitif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja jumlah tenaga pendamping PS, kemitraan kelompok PS dan KL

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Sumatera Utara	1	19,07	36	36	36	36	36	36	36	36	36
2	Riau	37	26.945,33	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332	1332
3	Jambi	6	6.965,35	216	216	216	216	216	216	216	216	216
4	Sumatera Selatan	1	1.705,55	36	36	36	36	36	36	36	36	36
5	Kalimantan Barat	29	30.121,00	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044
6	Kalimantan Tengah	19	32.250,36	684	684	684	684	684	684	684	684	684
7	Kalimantan Timur	2	20,12	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	TOTAL	95	98.026,79	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420

	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2000	2000	5000	10000	9000	5000	2000	2000	-	-	-	800	800	800	800	-
	-	-	-	2000	2000	2000	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-
	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2000	3000	5000	7000	5000	3000	2000	2000	-	-	-	-	800	800	800	-
	-	-	2000	2000	3000	3000	3000	2000	2000	2000	-	-	-	-	800	800	-	-
	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10000	9000	15000	22000	17000	10000	6000	6000	-	-	-	1600	2400	2400	1600	-

	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5	462,5
	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5	362,5
	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5
	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188

TABEL 136. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja luas prakondisi persetujuan PS, luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS, rencana kerja/pengelolaan KPS yang disahkan

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RIAU	12	1.128	13,35	-	112,8	-	-	-	-	-	-
2	KALIMANTAN BARAT	16	2.399	918,02	-	239,92	-	-	-	-	-	-
3	KALIMANTAN TENGAH	9	870	87,03	-	87,01	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	37	4.397	1.018,41	-	439,73	-	-	-	-	-	-

TABEL 137. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja fasilitas peningkatan produktivitas & nilai tambah HH serta jasling, KUPS yang ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum, jumlah tenaga pendamping PS

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA : Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan (UNIT SATUAN: KUPS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RIAU	12	1.128	-	100	200	200	200	200	200	100	-
2	KALIMANTAN BARAT	16	2.399	-	100	200	200	300	300	200	200	100
3	KALIMANTAN TENGAH	9	870	-	100	100	100	200	100	100	100	100
	TOTAL	37	4.397	-	300	500	500	700	600	500	400	200

	INDIKATOR KINERJA : Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat									INDIKATOR KINERJA : Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan (UNIT SATUAN: KUPS)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	56,4	-	-	-	-	-	-	-	-	20	40	40	40	40	40	20	-
	-	119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	20	40	40	60	60	40	40	20
	-	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	40	20	20	20	20
	-	219,86	-	-	-	-	-	-	-	-	60	100	100	140	120	100	80	40

	INDIKATOR KINERJA: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum (UNIT SATUAN: KUPS)									INDIKATOR KINERJA: Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (UNIT SATUAN: ORANG)								
	TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)									TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	-	-	80	80	-	-	80	-	-	432	432	432	432	432	432	432	432
	-	-	-	80	80	-	-	80	-	-	576	576	576	576	576	576	576	576
	-	-	-	80	80	-	-	80	-	-	324	324	324	324	324	324	324	324
	-	-	-	240	240	-	-	240	-	-	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332

TABEL 138. Pendanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan deforestasi di tanah gambut pada areal indikatif PS pada tahun 2022-2030 berdasarkan indikator kinerja kemitraan kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan

NO	PROVINSI	TOTAL UNIT	TOTAL LUAS	INDIKATOR KINERJA: Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (UNIT SATUAN: PKS)								
				TARGET ANGGARAN (x Rp1.000.000)								
				22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RIAU	12	1.128	-	150	150	150	150	150	150	150	150
2	KALIMANTAN BARAT	16	2.399	-	200	200	67	200	200	200	200	200
3	KALIMANTAN TENGAH	9	870	-	113	113	38	113	113	113	113	113
	TOTAL	37	4.397	-	463	463	254	463	463	463	463	463

Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia